



PBHI

JARI KEADILAN DI KEPAL TANGAN JOHNSON PANJAITAN

Bukan Sekadar Tak Gemetar Tapi Juga Tak Gentar. Dari Pembelaan Menuju Pembebasan.



Jari Keadilan di Kepal Tangan Johnson Panjaitan

Bukan Sekadar Tak Gemetar Tapi Juga Tak Gentar,

Dari Pembelaan Menuju Pembebasan

Penulis:

A.D. Handoko (Dedi)
Arfiandi
Bambang Widjajanto
Dwiyanto Prihartono
Edy Burmansyah
Gunawan
Gustaf R. Kawer
Dr. Nasiruddin Pasigai, S.H. M.H.
Hasudungan Sirait
Helio Freitas
Hendardi
I Sandyawan Sumardi
I Wayan Suardana
Islah
Ismail Hasani
J. Danang Widoyoko
Luhut M.P. Pangaribuan
Laurent Mayasari
Nasrul Saftiar Dongoran
Paskah Irianto
Poengky Indarti
Robert Manaku
Suryadi Radjab
Syamsul Alam Agus
Tuti Pujiarti
Usman Hamid
Veronica P
Wilson Obrigados

Penyunting : Syarif Arifin

Penulis Judul Obituari : Julius Ibrani

Pengumpul Tulisan : Gina Sabrina & Julius Ibrani

Tata Letak : Catur Sasongko

Cetakan Pertama
November 2025

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)

Jari Keadilan di Kepal Tangan Johnson Panjaitan

Bukan Sekadar Tak Gemetar Tapi Juga Tak Gentar, Dari Pembelaan Menuju Pembebasan

Penulis:

A.D. Handoko (Dedi)
Arfiandi
Bambang Widjajanto
Dwiyanto Prihartono
Edy Burmansyah
Gunawan
Gustaf R. Kawer
Dr. Nasiruddin Pasigai, S.H. M.H.
Hasudungan Sirait
Helio Freitas
Hendardi
I Sandyawan Sumardi
I Wayan Suardana
Islah
Ismail Hasani
J. Danang Widoyoko
Luhut M.P. Pangaribuan
Laurent Mayasari
Nasrul Saftiar Dongoran
Paskah Irianto
Poengky Indarti
Robert Manaku
Suryadi Radjab
Syamsul Alam Agus
Tuti Pujiarti
Usman Hamid
Veronica P
Wilson Obrigados

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
2025

Daftar Isi

Kata Pengantar "Bukan Sekedar Tak Gemetar, Tapi Juga Tak Gentar: Dari Pembelaan Menuju Pembebasan.....	6
Julius Ibrani (Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI).....	6
Johnson Panjaitan: Pembela HAM Sejati.....	8
Hendardi.....	8
Aktivis cum Advokat Johnson Sotarduga Panjaitan.....	12
Luhut M.P. Pangaribuan.....	12
Selamat Jalan Bang JP!: Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia yang Cerdas, Tangguh, dan Bernyali Besar.....	16
Arfiandi.....	16
Bung JSP, Terima Kasih atas Semua Lelahmu.....	19
Bambang Widjajanto.....	19
Selamat Jalan, Sahabat Johnson Panjaitan.....	22
Dwiyanto Prihartono.....	22
Johnson Panjaitan dan Cerita dari Batam.....	26
Edy Burmansyah.....	26
Sepenggal Kenangan Bersama Bang JP.....	35
I Wayan Suardana.....	35
Bang JP dalam Ingatan.....	39
Gunawan.....	39
Sang Advokat dan Guru Hak Asasi Manusia bagi Papua.....	42
Gustaf R. Kawer.....	42
Johnson Panjaitan, Pengacara Pembela Rakyat.....	45
Hasudungan Sirait.....	45
Cerita Kecil Tentang Memoria Johnson Panjaitan.....	50
Helio Freitas.....	50
Johnson Panjaitan, Keberanian dan Semangat Perjuangan.....	56
Islah.....	56
Bukan Hanya di Arena Litigasi, Tapi Juga “Singa” di Penelitian.....	58
Ismail Hasani.....	58
Berawal dari Advokasi Becak: Perjuangan Bersama Johnson Panjaitan....	62
Laurent Mayasari.....	62
Menjaga Warisan Johnson Panjaitan.....	64
Dr. Nasiruddin Pasigai, S.H. M.H.....	64
Johnson Panjaitan Pejuang HAM & Inspirator.....	67

<i>Nasrul Saftiar Dongoran</i>	67
Johnson Kawan Seiring, sang Gladiator	71
<i>Paskah Irianto</i>	71
Obituari Bang Johnson Panjaitan: Si Pemberani itu Telah Berpulang	78
<i>Poengky Indarti</i>	78
Kenangan Pribadi Bersama Bang Johnson Panjaitan	80
<i>Robert Manaku</i>	80
Kenangan Bersama Johnson Panjaitan	82
<i>Tuti Pujiarti</i>	82
Johnson, Teladan Keberanian Pembela HAM	84
<i>Usman Hamid</i>	84
Belajar dari Trotoar	91
<i>Veronica P.</i>	91
Johnson Panjaitan, Xanana Gusmao dan Antimiliterisme	95
<i>Wilson Obrigados</i>	95
Mengenang Johnson Panjaitan: Sosok yang Terus Hidup untuk Membela yang Tertindas	100
<i>Syamsul Alam Agus</i>	100
Akhirnya Lu Bersikap Adil, Son!	103
<i>A.D. Handoko (Dedi)</i>	103
Selamat Jalan Pulang Kembali ke Haribaan Allah Maha Rahim, Johnson Panjaitan	107
<i>I Sandyawan Sumardi</i>	107
Johnson Panjaitan dan Inspirasi bagi Para aktivis	109
<i>J. Danang Widoyoko</i>	109
Johnson Panjaitan dan Perjuangan Pembelaan Hak-Hak Manusia	112
<i>Suryadi Radjab</i>	112

KATA PENGANTAR

Jari Keadilan di Kepal Tangan Johnson Panjaitan: Bukan Sekadar Tak Gemetar Tapi Juga Tak Gentar, Dari Pembelaan Menuju Pembebasan

Julius Ibrani

Harimau sumatera dikenal “berbeda” dari harimau lain. Ukurannya lebih kecil, warna bulunya lebih gelap, belangnya lebih sempit. Tiga kata kunci yang merefleksikan Johnson Panjaitan, yakni kecil, gelap dan sempit. Seorang pengacara/advokat yang bernafaskan pembela hak asasi manusia dan berdarah batak (sumatera).

Di tangan Johnson Panjaitan, kasus kecil jadi besar, koq bisa? Bukan dalam arti dibesar-besarkan dalam konteks negatif. Johnson melihat secara detil dan tajam, adanya dimensi hak asasi manusia yang terlanggar, lalu membangun konstruksi kasus berupa relasi antara politik hukum dan kebijakan negara, lalu tindakan pelanggaran oleh negara, dan kondisi sosial budaya masyarakat dengan ketimpangan struktural dan ketiadaan akses keadilan. Johnson mampu menggambarkan representasi situasi dan kondisi negara dalam satu kasus yang ditanganinya. Kasus PHK buruh, penggusuran paksa, dan lainnya.

Dalam setiap penanganan kasus dan pendampingan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, Johnson sadar dan paham betul, bahwa dirinya menghadapi rejim Orde Baru dengan situasi Keadilan dan Hak Asasi Manusia yang gelap gulita. Makanya, Johnson juga punya strategi hegemoni dan propaganda sebagai “alat penerangan”, selain mampu membawa kasus yang ditangani ke tengah publik hingga mendapat dukungan penuh dari publik sebagai peluru tambahan untuk menekan.

Tangan Johnson Panjaitan juga dihadapkan pada sempitnya ruang dan peluang pembelaan atau advokasi korban untuk mendapatkan keadilan. Bagaimana tidak, di rejim Orde Baru, masyarakat baru berfikir saja sudah masuk penjara, itu pun masih bagus, yang lain bahkan diculik dan dihilangkan, banyak contohnya, aktivis Pro-Demokrasi, Wiji Thukul, pengurus PRD seperti Petrus Heriyanto, dan lainnya.

Risiko mendapatkan serangan fisik yang berbahaya hingga mengancam nyawa bukan barang yang jarang. Rejim otoritarian-militer Orde Baru menggunakan kekerasan fisik dan operasi intelijen militer sebagai platform

standar dalam merespon aktivitas masyarakat sipil apalagi pembelaan korban pelanggaran hak asasi manusia, tidak terkecuali yang dialami oleh Johnson Panjaitan. Pada puncaknya, Johnson bahkan melakukan advokasi korban pelanggaran berat hak asasi manusia di Abepura, Papua, dan Timor Timur. Pengadilan HAM pertama di Indonesia untuk Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Abepura, dan pembebasan untuk bangsa Timor Lorosae dalam bentuk Kemerdekaan Timor Leste yang telah nyata dirasakan oleh rakyat Timor Leste hingga saat ini.

Perkara pendampingan korban, dengan pembelaan berbasis pasal per pasal adalah hal yang lumrah di kalangan aktivis. Tapi, di tangan harimau Sumatera ini, pembelaan jadi tidak biasa, langsung diarahkan ke titik jantung pertahanan lawan: Kemerdekaan Diri lewat strategi Pembebasan. Karena Pembebasan adalah kunci bagi kemerdekaan diri setiap manusia, dan kemerdekaan diri adalah pertanda bahwa hak asasi telah terpenuhi. Manusia bebas menentukan nasibnya sendiri, bebas menentukan jalan hidupnya, bebas menentukan pendidikannya, dan setiap hak dasarnya, dan negara bertanggung jawab penuh untuk melakukan pemenuhan dan perlindungannya.

Tapi jangan kira, terminologi “pembebasan” dan “kemerdekaan” ini adalah barang haram di rejim otoritarian-militer Orde Baru. Sejak muncul di alam pikiran pun langsung sudah dikuntit, diciduk dan dipenjarakan oleh rejim. Dengan tuduhan makar atau subversif. Yang belakangan muncul lagi di tiga tahun terakhir kemudian dibungkus oleh KUHP Baru UU No 1 Tahun 2023 dan berlaku untuk seterus begitu kedepannya.

Dari keseluruhan jurus maut rejim otoritarian-militer Orde Baru yang menghantam johnson Panjaitan -meski mobilnya dirusak di era post reformasi- harimau Sumatera yang satu ini tidak gemetar dan tidak gentar dalam pembelaan.

AUMAN HARIMAU SUMATERA YANG BERNAMA JOHNSON PANJAITAN,
TETAP MENGELEGAR!

Jakarta, 5 November 2025

Johnson Panjaitan: Pembela HAM Sejati

Hendardi



Sumber foto : antarafoto.com

Tahun 1996, terjadi konflik internal di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait demokratisasi lembaga tersebut. Namun sebelum konflik tersebut, sebenarnya, saya telah mengenal Johnson Sotarduga Panjaitan – lebih dikenal dengan Johnson Panjaitan – yang saat itu masih magang kerja di LBH Jakarta di bawah Direktur Luhut MP Pangaribuan. Saya juga pernah mengetahui bahwa Johnson ikut dalam mengelola lembaga lain, Institut Sosial Jakarta (ISJ) bersama Romo Sandyawan Sumardi SJ., belakangan juga aktif di WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia).

Terjadinya konflik internal YLBHI itulah saya dan rekan-rekan lainnya tidak punya pilihan lain selain hengkang dari YLBHI. Saya, Luhut Pangaribuan, Almarhum Mulyana W Kusuma, Rambun Tjajo, Benny K. Harman, Paskah Irianto, serta Dwiyanto Prihartono dan almarhum Tedja Bayu memilih mendirikan organisasi baru bernama Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) melalui kongres pertama pada 5 November 1996 di Pondok Labu, Jakarta Selatan.

PBHI didirikan oleh 50-an pendiri yang sebagian adalah mantan pengurus YLBHI yang hengkang dan sebagian lagi banyak aktivis dari luar YLBHI, antara lain almarhum Permadi, S.H., Almarhum Ondos (Theodorus KS.), Soenjati S.H., Ir. Pramono Anung, Petrus Selestinus, S.H., Paskalis Pieter, S.H., Robert Keytimu, S.H., Erick S Paat, S.H., Dwi Ria Latifa, S.H.,

Helmy Fauzi, Aboeprijadi Santoso (Belanda), Yenny Rosa Damayanti, Bonar Tigor Naipospos, Roy Pakpahan, Ismail Hasani, Trimedya Panjaitan, Pipit R. Kartawijaya (Jerman), Romo Sandyawan, Johnson Panjaitan, S.H., Rafendi Djamin (Belanda), Almarhumah Amartiwi Saleh, Almarhum Mochtar Lubis, Almarhum Arbi Sanit, Nasaruddin Pasigai, Sugeng Teguh Santoso, Syarief Bastaman, Rachlan Nasidhik, Damianus Taufan, Syarifuddin Suding, Almarhum Boy Sampotan, Almarhum Aries Merdeka Sirait, Roy Simbiak, Ecoline Situmorang, Rita Serena Kalibonso, Zoemrotin, Almarhumah Tumbu Saraswati, Stanley PA, Rocky Gerung, Maria Pakpahan, Hermasari, Almarhum Harry Wibowo, Almarhum Freddy Sutedi, Almarhum Angerjati Wijaya, Almarhum Andi R Asappa dan lainnya.

Secara Organisasi, PBHI kemudian berkembang menjadi beberapa Perhimpunan lokal di provinsi (PBHI Daerah) antara lain di Makassar (Sulsel), Medan (Sumut), Jakarta, Bandung (Jabar), Yogyakarta, Semarang (Jateng), Manado (Sulut), Denpasar (Bali) dan lain-lain.

Sewaktu saya terpilih menjadi Ketua Badan Pengurus PBHI, saya memilih Dwiyanto Prihatono, S.H., sebagai Sekretaris Badan Pengurus. Sementara Mulyana, Luhut, mendiang Arbi Sanit dan Almarhum Arist Merdeka Sirait menempati posisi Majelis Anggota Nasional (MAN). Sejak itu, Dwiyanto Prihatono, Johnson Panjaitan, dan advokat lainnya bukan sekadar advokat, tetapi juga pembela hak-hak asasi manusia (*human rights defender*). Johnson Panjaitan dan beberapa advokat di PBHI dan aktivis-aktivis PRD (Partai Rakyat Demokratik) pernah menjadi pembela atau advokat terhadap José Alexandre “Xanana” Gusmão – lebih dikenal dengan Xanana Gusmão – seorang mantan pemberontak, mantan presiden dan mantan perdana menteri Republik Demokratik Timor-Leste. Johnson Panjaitan dan kawan-kawan dari PBHI juga pernah menjadi pembela mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Budiman Sudjatmiko.

Sebelumnya ketika kasusnya ditangani YLBHI, Xanana Gusmao ditangani oleh Luhut Pangaribuan tetapi setelah PBHI lahir ditangani oleh PBHI dan advokat-advokatnya bersama Johnson Panjaitan, kami bahu-membahu membangun PBHI sebagai organisasi pembela HAM yang berbentuk perkumpulan (memiliki anggota). Menjelang akhir rezim Soeharto, banyak kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi seperti di Aceh, Timor Timur, Papua, serta kasus penculikan aktivis prodemokrasi, kasus Tragedi Trisakti Semanggi hingga Tragedi Mei 1998.

Untuk kasus penghilangan paksa, PBHI menangani kasus Pius Lustrianang dan Almarhum Desmond Mahesa dan selanjutnya Almarhum Hendrik (Iblis) Sirait. Banyak pula penangkapan dan penahanan yang

sewenang-wenang terkait protes-protes di masyarakat terhadap rezim Soeharto menjelang kekuasaannya berakhir. PBHI disibukkan dengan berbagai kasus ini agar para korban mendapatkan pembelaan. PBHI juga menangani kasus mantan Sekjen PSI (Partai Sosialis Indonesia) Soebadio Sastrosatomo dan kasus-kasus politik lainnya.

PBHI juga sangat peduli dengan pelanggaran HAM di Aceh, selain Timor Timur dan Papua yang dikenal sebagai “daerah konflik”. Begitu juga konflik SARA di Ambon. Johnson Panjaitan berkontribusi dalam kasus-kasus tersebut. Johnson Panjaitan juga dipercaya memegang kendali Desk Papua untuk menangani kasus-kasus di Papua karena PBHI belum memiliki cabang di sana. Dan, secara umum, Johnson Panjaitan telah turut mengubah PBHI dari hanya organisasi bantuan hukum menjadi organisasi pembela HAM. Para korban pelanggaran HAM dapat menjadi bagian dalam pembelaan HAM bersama PBHI.

Tahun 2000, PBHI menyambut baik langkah Presiden Abdurrahman Wahid yang memberlakukan Jeda Kemanusiaan di Aceh untuk mencegah kontak senjata dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dapat menimbulkan lebih banyak korban. Seorang menterinya mendiang Bondan Gunawan – juga seorang anggota PBHI, diutus untuk bernegosiasi dengan pimpinan GAM di Aceh.

Namun upaya Presiden Wahid itu buyar, karena presiden penggantinya, Megawati Soekarnoputri malah memberlakukan keadaan darurat militer di Aceh pada 2003. PBHI bersama kelompok-kelompok lainnya melakukan penentangan, karena darurat militer ini bukan saja mendesak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mundur ke belakang dari perdamaian, tetapi juga menimbulkan kerusakan berbagai fasilitas seperti sekolah dan rumah-rumah, serta menyeret penduduk di Aceh banyak yang mengungsi untuk menghindari kontak senjata.

Buntut dari penentangan PBHI terhadap keadaan darurat militer tersebut, massa ormas yang mendukung militer menggeruduk Kantor PBHI di Cikini Raya. Bahkan Johnson Panjaitan yang masih menjabat Kepala Divisi Litigasi Badan Pengurus PBHI malah mendapat teror. Mobil pribadinya yang baru saja diparkir di depan kantor PBHI di Jalan Cikini Raya ditembak orang tak dikenal berkendaraan sepeda motor dengan senjata api menggunakan peredam suara, dipastikan untuk menakut-nakuti agar berhenti membela rakyat Aceh dan Timor Timur. Namun Johnson tak gentar menerima teror tersebut dan tetap melakukan pembelaan, termasuk pelarian politik dari Aceh.

Setahun kemudian, Johnson Panjaitan mencalonkan diri sebagai Ketua Badan Pengurus dalam Kongres PBHI 2004 di Makassar. Johnson Panjaitan pun terpilih untuk menggantikan saya, karena saya memang dibatasi oleh Anggaran Dasar (AD) hanya sampai dua periode saja. Sementara saya terpilih sebagai Ketua Majelis Anggota Nasional menggantikan Luhut Pagaribuan. Sejak itu, Johnson Panjaitan resmi menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus PBHI 2004-2007.

Selama kepemimpinan Johnson Panjaitan, PBHI tetap dibawanya secara konsisten dalam pembelaan HAM, termasuk membela orang-orang yang ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang dalam mengekspresikan kebebasannya. Johnson juga berkontribusi dalam membela orang-orang di daerah konflik SARA seperti Poso. Begitu juga membela orang-orang Papua yang masih terus memperjuangkan hak-haknya. PBHI pun menambah sebuah divisi yang menangani daerah konflik seperti Aceh dan Papua.

Johnson Panjaitan terus membawa PBHI sebagai organisasi pembela HAM, tidak lagi sekadar sebagai organisasi bantuan hukum. Perkembangan ini artinya tugas yang dibawa PBHI tidak hanya beracara di ruang-ruang pengadilan, tetapi juga penyelidikan/investigasi melalui kasus-kasus pelanggaran HAM seperti kasus penangkapan mahasiswa yang memprotes kenaikan harga BBM.

Tahun 2007 digelar Kongres V PBHI di Yogyakarta. Namun Johnson Panjaitan tidak mencalonkan lagi, sehingga terjadi pergantian dalam kepengurusan PBHI saat itu. Sejak itu, Johnson Panjaitan bekerja sebagai advokat independen. Johnson juga tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Profesi sebagai advokat publik ini dijalannya hingga dia wafat pada 26 Oktober 2025.

Dengan kabar duka itu, kami dan PBHI tentu merasa kehilangan seorang pembela HAM dan advokat publik yang berani bahkan kadang terlalu berani membela kaum yang lemah dan tertindas. Selamat jalan sahabat Johnson Panjaitan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan tempat terbaik.

Jakarta, 4 November 2025
Hendardi, Ketua Dewan Kehormatan Nasional PBHI, Ketua Dewan Nasional Setara Institute.

Aktivis cum Advokat Johnson Sotarduga

Panjaitan

Luhut M.P. Pangaribuan



Sumber foto : aceh.times.ide

Requiscat In Pace, RIP aktivis cum advokat Johnson Sotarduga Panjaitan. Informasi kepergian rekan Johnson Sotarduga Panjaitan kemarin terlalu cepat. Almarhum menutup umur di usia 59 Tahun. Informasi kepergiannya terlambat sehingga banyak yang tidak sempat melayat. Selain itu, persemayaman di RS UKI juga cepat karena pada hari yang sama meninggal dan pemakaman.

Semua yang mengenal almarhum tentu ikut, terkejut, sedih dan berduka atas kehilangan seorang yang masih sangat diharapkan dalam perjuangan perbaikan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia. Sekalipun sudah ada proses reformasi di mana almarhum ikut berkiprah keadaannya masih belum baik juga, hukum masih dilaksanakan dengan konsep *rule by law*.

Berita duka penulis terima sore hari menjelang pemakaman pada Sabtu sore, 25 Oktober 2025. Saya masih berusaha mengonfirmasi, tapi

tidak ada info yang akurat. Karenanya tidak sempat mengikuti prosesi pemakaman di tempatnya yang terakhir, TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Sekalipun begitu, doa yang terbaik sama seperti teman-teman yang lain yang tidak sempat melayat memanjakan doa dari jauh. Semoga arwah Johnson Sotarduga Panjaitan diterima di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan, ketabahan dan penghiburan. Terutama anak-anaknya yang akan melanjutkan estafet tanggung jawab khususnya di tengah keluarga.

Tulisan ini saya buat untuk mengenang almarhum; memenuhi permintaan PBHI yang saya terima dengan spontan. Tulisan ini juga sekaligus sebagai doa pada almarhum dan pada semua yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan almarhum, yang bukan pada kepentingan dirinya tapi pada masyarakat pencari keadilan. Perjuangan itu sudah dilakoni selama karirnya sehingga saya menjulukinya aktivis *cum* advokat.

Johnson Sotarduga Panjaitan telah mengakhiri “pertandingan” hidupnya yang telah dijalankan dengan baik dan sekarang almarhum sedang menghadap Sang Khalik untuk kehidupan kekal sebagaimana ia imani selama hidupnya. Dalam “pertandingan hidupnya” itu setidaknya saya pernah mengenal almarhum dalam beberapa kesempatan.

Pertama, ketika dia mengikuti program di LBH Jakarta yaitu Karya latihan bantuan hukum (Kalabahu) dan *volunteer lawyer program* dengan kedudukan sebagai asisten pembela umum (ASPU). Kemudian sebagai aktivis dan pengurus di Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI). Terakhir sebagai salah satu Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang saya pimpin.

Pada saat kepimpinan saya di LBH Jakarta ada standar dan tahap-tahap menjadi pembela umum. Seseorang jika ingin menjadi pembela umum maka dimulai dengan mengikuti pendidikan yang kami sebut Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu). Ini adalah tahap awal pengenalan tentang bantuan hukum struktural yang dijalankan LBH Jakarta pada waktu itu.

Pendidikan Kalabahu ini berlangsung sekitar sebulan dan diikuti oleh sekitar 30 peserta. Semuanya adalah yang lulus seleksi dari sekitar 100-an lebih peminat. Kapasitasnya memang hanya untuk 30 orang sesuai dengan ruang rapat LBH Jakarta, tempat pendidikan berlangsung. Kemudian, setelah program Kalabahu selesai mereka diberi kesempatan mengikuti

seleksi untuk menjadi ASPU yang kebutuhannya maksimum 15 orang. Dengan demikian ada 15 orang tidak terpilih sekalipun mereka juga berkualitas. Terakhir seleksi menjadi Pembela Umum dan pada waktu itu lowongan yang tersedia hanya untuk 5 orang. Seingat saya almarhum hanya sampai ASPU di LBH Jakarta.

Oleh karena itu, para aktivis yang pernah bergabung di LBH Jakarta ada yang hanya sampai Kalabah atau ASPU atau Pembela Umum. Dengan kedudukan sebagai pembela umum juga sekalipun lebih lama tapi juga terbatas. Umumnya pembela umum di LBH Jakarta rata-rata 5 tahun kecuali yang kemudian menjadi pimpinan seperti T. Mulya Lubis, Nursyahbani Katjasungkana, Mas Achmad Santosa dan saya sendiri. Kami semua sebagai pembela umum LBH Jakarta di atas 15 tahun dan sekaligus menjadi pimpinan dan atau pengurus di YLBHI.

Setelah ASPU di LBH Jakarta, almarhum kemudian menjadi pengurus di PBHI. Sekalipun tidak langsung. Saya tidak ingat persis nama jabatannya apakah sebagai Ketua Pengurus atau Sekretaris Eksekutif PBHI. Dengan kedudukan di PBHI, almarhum banyak berkiprah dan dikenal luas karena menangani banyak isu sensitif dan yang mendapat perhatian masyarakat. Misalnya, masalah orang Timor Timur, Papua dsb. Ketika almarhum di PBHI saya sudah tidak aktif lagi di sana. PBHI sendiri yang mendirikannya antara lain Hendardi, Mulyana W. Kusuma dan saya. Karena itu yang menjadi Ketua Majelis Nasional pertama PBHI itu adalah saya dan ketua pengurus rekan Hendardi.

Terakhir almarhum menjadi salah satu Wakil Ketua Umum PERADI yang saya pimpin, yang masa jabatannya baru akan berakhir awal tahun depan. Sekalipun dalam jabatan ini almarhum sudah tidak terlalu aktif lagi karena masalah kesehatan. Seingat saya, hanya beberapa kali saja pernah saya minta mewakili saya untuk melakukan pelantikan seperti pelantikan DPC Peradi di Jambi. Selain masalah kesehatan, almarhum juga fokus untuk membangun praktik advokat pribadinya.

Saya tahu almarhum juga pernah di organisasi advokat lain yaitu Sekjen AAI dengan ketuanya Humphrey Djemat. Dengan kedudukannya itu, bagaimana perpecahan PERADI di Makassar sehingga menjadi seperti sekarang almarhum sangat tahu. Bahkan almarhum sesungguhnya salah seorang saksi sejarah yang menyaksikan ketua umum Peradi pada waktu itu meninggalkan tempat Munas sehingga ditunjuk *care-taker* yang menjadi PERADI sekarang; dikenal dengan sebutan Peradi RBA. Bagaimana almarhum bersama advokat lainnya menolak keswenangan-wenangan dan hegemoni dengan kecurangan dari ketua umum yang *vested interest*

mempertahankan kekuasaannya. Almarhum salah seorang yang sangat lantang menolaknya, bersuara keras dan tidak membiarkan kecurangan terjadi.

Saya mengenal almarhum hampir selama perjalanan karirnya, sekalipun tidak seluruhnya dekat yaitu hanya yang disebutkan di atas yaitu masa di LBH Jakarta, PBHI dan PERADI. Tapi saya baru tahu apabila nama tengahnya ada yaitu “Sotarduga”. Nama ini menarik perhatian saya karena maknanya yaitu “tidak bisa diduga”.

Almarhum yang dikenal sangat berani dan vokal memang sering “tidak bisa diduga”. Pernyataannya sangat keras, kuat, menusuk tapi bisa juga arahnya menjadi tidak terduga. Salah satu yang saya ingat yang berkaitan dengan penanganan masalah orang Timor Timur dan juga Papua. Kesannya seolah-olah akan ada “perang” bukan terbatas pada perkara hukum semata yang menjadi mandat advokat.

Almarhum Johnson sesungguhnya masih sangat diharapkan sebagai advokat dalam situasi penegakan hukum di Indonesia yang masih belum baik-baik saja sekarang ini. Pendekatan almarhum yang *out of the box* memang dibutuhkan untuk ketertutupan penegakan hukum yang koruptif. Sebab pendekatan normatif agaknya sulit dalam keadaan begitu, karena bercampur dengan residu politik kotor yang terjadi sebelumnya dan mengerak, sehingga sulit untuk berubah. Karena itu pendekatan biasa tidak akan pernah bisa membawa hasil apapun, tapi dengan pendekatan *out the box*. Dalam usia 59 tahun almarhum sudah mengakhiri ”pertandingan” karena itu menjadi kehilangan yang besar untuk perjuangan hukum dan HAM di Indonesia. Selamat jalan aktivis cum advokat Johnson Sotarduga Panjaitan, RIP.

Jakarta, 27 Oktober 2025.
Luhut M.P. Pangaribuan, Ketua Umum DPN PERADI.

Selamat Jalan Bang JP!: Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia yang Cerdas, Tangguh, dan Bernyali Besar

Arfiandi



Sumber foto : news.detik.com

Johnson Sotarduga Panjaitan, kami yang muda-muda di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) memanggilnya akrab dengan sebutan Bang JP. Di masa itu, sekitar tahun 1990-2000, ia adalah salah seorang "singa" di ruang pengadilan, media massa, dan panggung (orasi) demonstrasi jalanan. Ia terkenal lewat pernyataan yang lugas dan tajam. Tiada lain dalam rangka pembelaan hukum dan hak asasi manusia bagi korban.

Selain Bang Hendardi, Bang JP juga merupakan ikon PBHI saat itu. PBHI dikenal di seantero tanah dan internasional karena sepak terjang mereka berdua. Masa itu, orang-orang mengidentikkan PBHI adalah Bang Hendardi dan Bang JP, begitu pula sebaliknya. Saya, yang masih sangat 'hijau' saat itu di PBHI dan datang dari daerah yang masih sepi pergerakan di era Reformasi sepenuhnya belajar banyak dari mereka berdua tentang pengetahuan, penguasaan lapangan, dan nyali dalam mengadvokasi hak hukum korban pelanggaran hak asasi manusia.

Bang JP merupakan aktivis yang punya modal cukup lengkap, karena ia juga menyandang profesi sebagai pengacara (advokat). Lewat ruang-ruang sidang pengadilan ia memaksimalkan pembelaan terhadap korban dan siapa pun yang saat itu dibawa ke proses hukum secara sewenang-wenang.

Sejarah mencatat masa itu adalah juga masa gelap penegakkan hukum di Indonesia: transisi demokrasi. Tidak banyak orang yang konsisten dan bernyali untuk memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan bagi korban. Potret hukum di mana-mana menjadi alat kekuasaan. Alat yang digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa untuk melegitimasi atau mencapai tujuan penguasa sendiri atau kelompok-kelompok yang berkuasa saat itu. Mirip dengan keadaan yang mulai terjadi kembali di banyak wilayah tanah air sekarang ini.

Bang JP tercatat hadir dalam banyak dokumentasi perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang sedemikian itu. Ia selalu hadir dalam kasus-kasus besar perjuangan rakyat atau korban untuk keadilan di berbagai wilayah dan isu, sebut saja antara lain di Aceh, Papua, Poso, dan konflik masyarakat adat dengan pengusaha dan/atau penguasa, perjuangan gerakan mahasiswa dan buruh.

Penulis mengenal Bang JP menjelang akhir tahun 1999. Kemudian semakin akrab dengannya setelah resmi bergabung menjadi relawan di Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum PBHI pada awal tahun 2000.

Pada tahun 2004, Bang JP meminta penulis menjadi Sekretaris Jenderal, menemaninya yang terpilih dalam kongres PBHI sebagai Ketua Badan Pengurus PBHI Nasional masa bakti 2004-2007.

Hampir di dalam semua kasus-kasus besar yang ditangani oleh PBHI, Bang JP kerap meminta penulis turut terlibat dalam penanganan kasus, bahkan memercayakan penulis untuk menjadi koordinator dalam pembelaan. Ia pula yang mengenalkan dan pertama kali mengajak penulis untuk terlibat aktif dalam advokasi kasus-kasus besar perusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang di advokasi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Karena keterlibatan tersebut pula, penulis pun diminta Bang JP agar bersedia mengabdi juga sebagai Ketua Dewan Daerah WALHI DKI Jakarta selama dua periode kepengurusan bersamaan dengan masa bakti saya di PBHI.

Bang JP adalah seorang visioner. Selalu berusaha mencoba dan mencari jalan baru atau terobosan dalam pembelaan, mengoptimalkan

segenap ruang pembelaan yang tersedia baik litigasi maupun nonlitigasi. Dari semua dokumentasi perjalanan advokasinya di PBHI, tergambar jelas ia adalah "sosok advokat dan pembela hak asasi manusia sejati yang cerdas, tangguh, dan bernyali besar".

Dalam pergaulan pribadi kami, sebagai abang sekaligus sahabat, ia adalah pribadi yang hangat, humoris, rendah hati. Setelah aktivitas formal harian kami, menjelang larut malam sebelum berpisah ke rumah masing-masing atau sebelum kami kembali lagi ke 'markas' untuk menyiapkan dokumen-dokumen pembelaan persidangan pengadilan atau agenda advokasi lainnya, kami kerap mampir di warung-warung tenda pinggir jalan atau resto sederhana yang ramah kantong aktivis. Di tempat mampir itulah tawa gembira kerap mewarnai diskusi serius beliau.

Bang JP, sungguh sedih tiada terperi membaca berita duka kepergianmu. Meninggalkan kami semua. Terakhir bertemu, sudah cukup lama, seingat saya pada sekitar masa sebelum Covid-19 melanda, tepatnya saat pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Rumah Bersama Advokat, di mana kita berada dalam satu barisan bersama lagi. Kita sempat berkelakar mengenang masa lalu. Sempat juga mendengar engkau berjuang melawan sakit kronis.

Mohon maaf, tidak dapat mengantarkamu ke tempat peristirahatan terakhir karena sedang yang berada jauh di pulau seberang. Selamat jalan ke keabadian, Bang JP! Terima kasih banyak atas kebaikan hati dan persahabatan yang telah terjalin. Doa terbaik bagimu. Semoga beristirahat dalam kedamaian dan mendapat tempat dari-Nya. Jejak perjuanganmu akan terus menginspirasi generasi-generasi baru di PBHI, organisasi yang telah mempertemukan kita bersama. Amin!

Arfiandi, Sekretaris Jenderal PBHI Nasional 2004-2006 - Anggota PBHI.

Bung JSP, Terima Kasih atas Semua Lelahmu

Bambang Widjajanto



Sumber foto : data.tempo.co

Di ujung hari, tepatnya di hari Minggu 26 Oktober 2025, Johnson S. Panjaitan (JSP) meninggal dunia. JSP adalah seseorang yang dikenal luas dedikasinya dalam memperjuangkan keadilan sosial selama hampir 35 tahun, sejak mengawali karirnya menjadi Asisten Pembela Umum di LBH Jakarta (1988-1990),

JSP tidak pergi tapi dia mendahului kita untuk bertemu lebih awal pada haribaan Sang Pencipta untuk meniti keabadian kehidupan. Siapapun kita, lambat atau cepat, dipastikan akan sampai pada titik, di mana saat ini JPS sudah melakukannya.

Ada yang khas dari JPS, dia tidak sekadar terus menerus menyalakan nyali, menunaikan keberaniannya tanpa tedeng aling-alings sebagai pejuang keadilan sosial tetapi mengelola keteguhan sikapnya dan menyampaikan kritiknya secara lugas dan tajam di ruang publik. Kesemua itu, diyakini, refleksi dari sikap serta komitmennya untuk membela setinggi-tingginya, pihak yang tertindas atau menjadi korban ketidakadilan sistem: dari aktivis politik hingga rakyat jelata.

Kesemua itu pada akhirnya memberi suatu kekhasan tertentu yang memeluk erat sikap dan perilaku diri seorang JSP sehingga menjadi *trade mark* atau *brand image* yang melekat hingga ujung akhir hayatnya.

JSP ternyata sangat tidak adil, begitu kata sebagian koleganya. Dia tidak adil pada dirinya karena JSP berikhtiar terus untuk menegakkan sikapnya untuk sangat adil kepada orang lain tetapi "tidak adil kepada dirinya sendiri". Hal itu dikonfirmasi dari tindakannya yang tidak memerhatikan kondisinya karena kurang istirahat dan tidak sepenuhnya menjaga kesehatan. Pada titik inilah JSP menunjukkan dedikasinya secara total terhadap perjuangan yang diyakininya.

Selain itu, ada ciri khas lainnya, JSP senantiasa teguh dan vokal dalam menyuarakan keadilan, bahkan di tengah situasi yang represif. Dia hampir tidak peduli jika sedang *on fire* membela dan menegakkan keadilan, apapun risiko yang harus dia bayar, termasuk jika harus *berkelahi* menghadapi tekanan politik dan ancaman. Keberanian itu dikonfirmasi di dalam seluruh perjalanan karirnya. Ketika menghadapi dan mengalami berbagai tekanan dan serangan langsung, termasuk kantornya *diserbu* dan kendaraannya diteror kekerasan.

Semua fakta itu menegaskan, JSP telah menjadi teladan bagi siapapun dan menjadi salah satu contoh terbaik, berjuang dan spirit kejuangannya untuk membela mereka yang tertindas dan ditindas hak asasinya. Adalah kesengajaan sadar yang secara sukarela dipilihnya sebagai bagian dari medan pengabdiannya.

JSP bisa saja sudah meninggalkan kefanaan dunia ini tapi kontribusi dan keberpihakannya yang memberikan perhatian dan prioritas pada hak-hak rakyat kecil dan isu-isu keadilan tidak akan pernah dilupakan.

Awal karirnya di LBH Jakarta adalah pembuka pintu yang menegaskan, siapa sosok JSP. Dia sudah menunjukkan komitmennya secara utuh dalam membela dan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan menghadapi isu-isu keadilan sosial seterjal apapun jalan pendakian itu harus dihadapinya.

Tindakan advokasi yang dilakukan JSP melintas batas karena juga mencakup advokasi kasus-kasus di Timor-Leste pascakonflik. Kesemuanya itu merupakan *signal* yang menunjukkan komitmennya yang melampaui batas nasional terhadap HAM internasional.

Kita semua kehilangan JSP tapi kita akan senantiasa menempatkan JSP menjadi dan dalam bagian penting perjalanan aktivisme keberpihakan untuk terus-menerus memelihara optimisme guna menjemput harapan untuk mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis di bumi Indonesia yang kita cintai ini.

Selamat jalan Bung JSP! *In Shaa Allah*, Sang Khalik Maha Pencipta akan menempatkan dirimu hanya pada sisi-Nya sebagai tempat tempat terbaik atas seluruh ikhtiar luar biasamu yang tak pernah kenal lelah di kefanaan dunia.

Depok, 4 November 2025
Bambang Widjojanto

Selamat Jalan, Sahabat Johnson Panjaitan

Dwiyanto Prihartono



Sumber foto : jernih.co

Johnson Panjaitan! Nama yang menempel di kepala saya sejak mengenalnya tahun 1988. Ia telah “pergi” mendahului pada 26 Oktober 2025 pukul 07.33 WIB di usia 59 tahun.

LBH Jakarta merupakan tempat kami mulai saling mengenal dan secara bersama melakukan aktivitas gerakan bantuan hukum dan advokasi hak asasi manusia. Sejak mengenalnya, dalam setiap dialog serta diskusi berbagai masalah hukum telah terasa adanya kekuatan dari nada bicara dan muatan pikirannya. Johnson memiliki kepedulian kuat untuk membela kaum tertindas dan teraniaya secara hukum, memberikan akses hukum, keadilan dan hak asasi manusia.

Kala itu, Johnson, saya serta 20-an anak muda yang baru saja lulus sarjana hukum tahun 1988. Kami bersama-sama mendaftar dan mengikuti program Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), sebuah kursus singkat yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta. Saat itu, LBH Jakarta dipimpin oleh Nursyahbani Katjasungkana. Setelah Kalabahu, kami mengikuti seleksi magang dan diterima sebagai Asisten Pembela Umum.

Kami pun beraktivitas bersama tokoh-tokoh pejuang hukum dan HAM lainnya, antara lain Adnan Buyung Nasution, Abdul Hakim Garuda

Nusantara, Hendardi, Benny K. Harman, Fauzi Abdullah, HJC Princen, Mulyana Kusuma, Abdul Fickar Hadjar, Nursyahbani Katjasungkana, Achmad Santosa, Luhut MP Pangaribuan. Saya bersama Johnson serta kalangan muda seangkatan di LBH Jakarta memiliki tempat yang pas untuk melakukan perjuangan hukum, keadilan dan HAM bersama para senior yang memiliki kepedulian yang sama.

Keunggulan Johnson, sepanjang pengamatan saya, adalah selalu dapat menerjemahkan *positioning* yang tepat ketika menganalisis masalah yang harus dilakukan pembelaan. Ia tenang dan tidak ragu untuk mengungkap dengan lantang khususnya melawan kebijakan dan aksi pemerintah yang tidak berpihak kepada para korban yang tertindas.

Situasi politik ketika itu berbeda betul dengan masa sekarang. Di bawah rezim Soeharto, model tekanan kepada masyarakat sipil sangat sistemik dengan pendekatan keamanan yang tinggi dan kuat. Ketika itu selama kami di LBH Jakarta semua aktivitas kami mendapatkan ancaman: penangkapan, penahanan, penguntitan, dan teror. Semua itu adalah makanan sehari-hari kami dalam setiap langkah melakukan pembelaan. Johnson telah menjadi bagian penting dalam menangani berbagai kasus serta kegiatan advokasi di bawah naungan tim pembela LBH Jakarta.

Keberanian, kecerdasan, serta kepedulian terhadap hukum, keadilan dan HAM terungkap jelas selama saya mengenal sosok Johnson! Salah satu kasus yang dapat menjadi contoh kerjasama membela perkara adalah ketika dalam perkembangan politik selain lahirnya PUDI (Partai Uni Demokrasi Indonesia) yang digagas dan didirikan oleh Sri Bintang Pamungkas dalam jangka waktu berdekatan lahir juga PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang dibentuk Budiman Sudjatmiko dan kawan-kawan.

Persisnya lupa, tapi sekitar 1994-1996, PRD melakukan manuver politik yang dianggap mengganggu rezim. Aparat negara menangkap dan memproses hukum 12 orang pengurus inti PRD. Para pengurus PRD yang ditangkap diperlakukan tidak manusiawi oleh aparat negara. Kami pun memberikan bantuan hukum. Saya bersama Johnson, Amir Syamsuddin, Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut MP Pangaribuan, Hotma Timbul, menjadi tim penasehat hukum untuk Budiman Sudjatmiko dan kawan-kawan. Selain itu, kami pun memberikan bantuan hukum di persidangan atas adanya tuduhan tindak pidana subversif kepada PRD.

Kerja tidak mengenal waktu dan lelah itu kami laksanakan. Kami bolak-balik ke tahanan, pengadilan, serta mengurus ke berbagai pihak demi terwujudnya pembelaan yang maksimal.

Selain kasus PRD, terdapat sejumlah kasus penting lainnya, seperti penggusuran tanah, penangkapan aktivis yang berdemonstrasi, perburuan dan sebagainya.

Interaksi bersama Johnson di LBH Jakarta merupakan peristiwa yang tidak dapat terlupakan. Saya merasa sebagai tim yang kuat. Johnson memiliki keunggulan penjiwaan atas tiap kasus yang ditangani. Di sisi lain, Johnson merupakan teman yang bisa diajak santai dan asik kongkow di luar pekerjaan dengan asik. Banyak sekali kegiatan rileks saya bersama Johnson, Rachland Nashidik, Harry Ponto dan para aktivis lainnya. Kami melakukan kegiatan santai bersama secara berkala dan tak jarang menjadi anak malam dengan berbagai kegiatan malam.

Sekitar 8 tahun saya, Johnson dan teman seangkatan purnatugas di LBH Jakarta. Saat itu, banyak pula kaum muda yang bergabung ke LBH Jakarta sebagai tenaga baru. Saya, Johnson, Hendardi, dan kawan-kawan berbeda pandangan mengenai bentuk kelembagaan LBH. Akhirnya, beberapa orang dari kami bersepakat untuk membangun organisasi bantuan hukum baru yang namanya PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia) pada 1996. Basis berpikir, pola, dan model advokasi yang diterapkan di organisasi PBHI mirip dengan LBH. Perbedaan yang pokok adalah saya dan Johnson berpindah kelompok di organisasi baru yang basisnya perkumpulan yaitu PBHI, tidak lagi di LBH yang basisnya adalah berbentuk yayasan.

Pengurus pertama PBHI diketuai oleh Hendardi, sahabat saya sampai hari ini. Saya sendiri dipercaya sebagai sekretaris. PBHI pun berkembang pesat dengan berdirinya beberapa cabang di berbagai wilayah.

Johnson sempat juga memimpin PBHI satu periode. Hal-hal yang dilakukan tidak berubah tetap dengan penjiwaan dan keberanian yang tinggi melawan kezaliman pemerintahan. PBHI di masa kepemimpinannya juga menjadi tempat saya untuk mendiskusikan berbagai isu pembelaan kepada publik.

Kedekatan saya dengan Johnson juga berlanjut pada kerjasama menangani kasus-kasus komersial. Ternyata untuk urusan kasus bisnis Johnson pun memiliki kemampuan kuat, ketangguhan argumentasi dan kecepatan memahami posisi kasus.

Frekuensi kami berjumpa semakin berkurang karena kesibukan masing-masing. Belakangan saya mendengar Johnson telah menikah

dengan orang yang juga amat saya kenal karena sesama Asisten Pembela Umum di LBH Jakarta, Elisabeth namanya. Saya bahagia mendengar kabar tersebut.

Saya dengan Johnson kembali dipertemukan organisasi advokat, PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), meski jarang juga bertemu. Karena Johnson juga aktif sebagai Pengurus PERADI di Bidang HAM pada tahun 2010.

Sekitar 8 tahun terakhir semakin berkurang lagi perjumpaan saya dengan Johnson, bahkan mengenai kondisi kesehatan juga saya tidak pernah tahu persis. Lagi pula dia tidak pernah menceritakan kondisi kesehatannya. Kadang saya masih melihat sosoknya di layar televisi. Dari layar kaca itulah saya masih melihat konsistensi Johnson, yang selalu mengumandangkan isu penegakan hukum, keadilan dan pemenuhan HAM bagi korban.

Ingatan ketika berjuang, bercanda, bersantai, menginap bersama, adalah kenangan penuh kesan dan penuh arti bagi saya. Kabar terakhir, diberitahu oleh Hendardi bahwa sahabat Johnson telah meninggal dunia, pada Minggu 26 Oktober 2025. Dalam doa, saya panjatkan semoga Johnson mendapat tempat terbaik, diterima segala amal baktinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan.

R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H. Advokat, Pendiri PBHI, Pendiri Setara Institute, Alumni LBH Jakarta, Ketua Harian, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Kontak Person: 0815-13301443

Johnson Panjaitan dan Cerita dari Batam

Edy Burmansyah



Sumber foto : okezone.com

Setelah perjumpaan selintas di Kantor Bantuan Hukum Indonesia (KBHI), yang didirikan M Yamin,¹ yang berlokasi dengan sekitar Jalan Tasik, Kambang Iwak Palembang,² pada sekitar akhir 1998 atau awal 1999. Kami sama sekali tidak pernah jumpa lagi, bahkan mungkin Bang Johnson S Panjaitan tidak memiliki ingatan yang cukup terang tentang saya—aktivis muda yang sedang bergairah setelah kejatuhan Soeharto.

Tujuh tahun kemudian usai pertemuan selintas itu, di pintu kedatangan Bandara Hang Nadim, Batam, saya lampaikan tangan kepada dua laki-laki yang baru saja tiba. Setelah berpelukan dengan dengan salah satu di antara mereka,³ Chris Wangkay memperkenalkan saya kepada

¹ M. Yamin merupakan aktivis Yogyakarta pendiri kelompok Rode yang berasal dari Palembang.

² Selain LBH Palembang, KBHI merupakan salah satu kantor yang sering digunakan oleh para aktivis di Palembang untuk berkoordinasi, mengelar rapat aksi dalam sebagainya. Termasuk melakukan advokasi terhadap mahasiswa jika dalam berbagai aksi terjadi penangkapan atau kekerasan yang dilakukan aparat keamanan.

³ Chris Wangkay adalah koordinator Debt Campaign International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). INFID merupakan host International People Forum (IPF) yang akan diselenggarakan pada 2-17 September 2006 di Batam.

Johnson Panjaitan. “Bang, ini Edy! Panitia di Batam, dia yang akan bantu-bantu kita disini.”

Setelah bersalaman, dengan senyum ramah, tapi dengan raut muka seperti menerka, Bang Johnson bertanya. “Saya seperti tidak asing dengan Anda. Kita pernah jumpa di mana?” Sedikit bercanda, saya menjawab. “Mungkin wajah saya pasaran bang, hehehe. Tapi sebenarnya dulu sekitar akhir 1998 atau awal 1999, kita pernah satu kali berjumpa di kantor KBHI Palembang.”

“Wah, ini teman-teman lama juga Chris,” sela Bang Johnson kepada Chris Wangkay.

Sembari berjalan keluar Bandara, Bang Johnson melanjutkan pertanyaannya. “Sudah berapa lama di sini. Gimana ceritanya bisa ‘terdampar’ di sini?” Kepada Bang Johnson dan Chris Wangkay, agak sedikit panjang saya menceritakan awal kehadiran di Batam. “Desember 1999, saya ‘dikirim’ ke pulau Karimun, satu pulau di sebelah barat pulau Batam. Saya advokasi pasir laut. Karena kantor operasional perusahaan-perusahaan pasir laut banyak berlokasi di Batam, untuk memudah akses data saya akhirnya harus bolak-balik antara kedua pulau ini. Setelah sekian lama melakukan advokasi, tahun 2003 lalu, Presiden Megawati memutuskan untuk menghentikan ekspor pasir laut ke Singapura.”

“Lalu, kenapa kamu enggak balik ke Jakarta atau Palembang setelah itu,” Bang Johnson melanjutkan pertanyaan. “Saya dapat tawaran kerja sebagai wartawan di harian lokal di Batam. Lalu memutuskan menetap di sini,” jawab saya singkat.

Dari bandara, kami menyempatkan makan siang sejenak di satu rumah makan, sekalian mendiskusikan agenda keesokan harinya. Untuk beraudiensi dengan Kapolda Kepri, Brigjen Sutarmen, serta ketua DPRD Batam, Soerya Respatiromo, terkait penyelenggaraan International People Forum (IPF) yang akan diselenggarakan pada 12-17 September 2006 di Asrama Haji, Batam Center.

Rencananya International People Forum akan diselenggarakan di Singapura sebagai respons atas pertemuan Tahunan IMF dan World Bank yang digelar di negara tersebut. Namun, karena adanya penolakan pemerintah Singapura atas pertemuan tersebut, akhirnya diputuskan penyelenggaraan acara digeser ke Batam.⁴

⁴ Lihat, [globalpolicy.org. IMF-WB Exposed by Ban on NGOs](https://archive.globalpolicy.org/component/content/article/174-advocacy/30716-imf-wb-exposed-by-ban). 9 September 2006. Diakses dari; <https://archive.globalpolicy.org/component/content/article/174-advocacy/30716-imf-wb-exposed-by-ban>

Meskipun dilaksanakan di Indonesia namun pihak Kepolisian Daerah (Polda) Kepri, tidak memberikan izin penyelenggaraan International People Forum. Bahkan panitia lokal sering mendapatkan ancaman dan teror dari orang-orang yang tidak jelas.

"Gimana Elo, Ed. Amankannya?! Gua denger kondisinya gak kondusif?" tanya Chris Wangkay membuka perbincangan makan siang itu.

"Sejauh ini saya masih aman, meskipun teror sering terjadi. Sementara saya enggak pakai HP dulu makanya yang menghubungi tadi Toni.⁵ Saya juga sering ditemani anak-anak punk untuk pengamanan saya," jawab saya.

Kemudian saya menjelaskan perkembangan persiapan penyelenggaraan acara, di mana Poltabes Barelang menyatakan akan tetap membubarkan penyelenggaraan International People Forum. Kapoltabes Barelang, Komisaris Besar Eko Hadi Sutedjo menyatakan bahwa mereka telah menempatkan tiga personel Detasemen Khusus 88 Antiteror di setiap pelabuhan internasional guna mencegah masuknya peserta para IPF.⁶

“Bagaimana agenda kita besok?” tanya Bang Johnson.

"Tetap jalan. Kapolda sudah mengabari bahwa dia bersedia menerima kita, besok sore. Setelah, lusa, kita akan audiensi dengan ketua DPRD Batam, Soeryo Respatierno."

Usai beristirahat semalam, keesokan harinya kami bertiga datang ke Polda Kepri. Kami diminta menunggu karena Kapolda sedang menerima tamu. Di saat menunggu, Bang Johnson tidak bisa duduk diam. Dia berbincang-bincang dengan beberapa staf di kantor itu. Lalu kembali duduk sembari berbisik kepada saya dan Chris Wangkay. "Aku dengar, Kapolda sedang menerima tamu dari Singapura di dalam."

Sejenak kemudian, dua orang keluar dari ruangan Kapolda, sembari berbincang dalam Inggris dan tersenyum kepada kami yang duduk di ruang tunggu. Tak berapa lama, kami lalu dipersilakan masuk ke ruangan Kapolda.

[on-ngo.html?fbclid=IwY2xjawNvQoNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFqTHIPamxnNIJpbHcyTGY5AR77v11mBL33cUj0gWhPJly60eHchYEzezn-KIOZ_eWFnLOBpR2htBqFjaF4O_aem_kA10yj4xGU_EkojG2Y68Aw](#)

⁵ Toni Blensto Nasution, seorang seniman teater, juga menjadi pengamen jalanan di Batam. Selama persiapan International People Forum dia mendampingi dan membantu saya. Karena berbagai teror dan ancaman yang diterima maka diputuskan lalu lintas komunikasi saya menggunakan HP Toni.

⁶ Lihat Tempo.co. *Polisi Tetap Larang Demonstrasi Anti-IMF*. 11 September 2006. Diakses dari; <https://www.tempo.co/arsip/polisi-tetap-larang-demonstrasi-anti-imf-1970698>

Perbincangan berjalan lancar, Bang Johnson dan Chris Wangkay berusaha menjelaskan bahwa International People Forum bukanlah aksi demonstrasi atau unjuk rasa jalanan. IPF merupakan konferensi yang dihadiri banyak intelektual dari berbagai negara di dunia. Dan, konferensi ini penting dilaksanakan sebagai kritik terhadap IMF dan World Bank yang selama ini kebijakannya banyak merugikan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bang Johnson menegaskan bahwa penolakan terhadap penyelenggaraan IPF bukan saja tidak berdasar dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, lebih jauh dapat merugikan Indonesia sendiri di mata dunia.

Namun, negosiasi yang coba diupayakan ternyata menemui jalan buntu. Kapolda Kepri, Brigjen Sutarman tetap pada keputusannya. "Jangankan acaranya, persiapannya pun saya tumpas!" Untuk itu, Polda Kepri secara resmi mengeluarkan surat yang ditandatangani Direktur Intelkam Polda Kepri AKBP Slamet Riyanto yang menyatakan tidak memberikan izin untuk menyelenggarakan IPF.⁷ Alasanya karena acara tersebut dapat merusak hubungan antara Indonesia dan Singapura.⁸

Usai pertemuan dengan Kapolda, situasi semakin tidak kondusif. Pembuntutan-pembuntutan terhadap kami semakin intensif. Bahkan teror dan ancaman semakin banyak dialami oleh para relawan yang menjadi panitia lokal. Dan, nama saya seringkali disebut-sebut oleh para peneror. Bang Johnson dan Chris Wangkay berusaha menenangkan keadaan.

Malam harinya, Johnson mengevaluasi keamanan panitia penyelenggaraan acara. Dia menyimpulkan, jika besok kondisinya semakin tidak kondusif.

Usai pertemuan dengan Ketua DPRD Batam, saya diminta keluar dari Batam sementara waktu. "Agenda besok sama Soeryo, gimana?" tanya Bang Johnson. "Tetap jalan sesuai jadwal. Soeryo sudah menyiapkan waktu besok siang berjumpa kita," jawab saya.

Keesokan harinya kami bertiga berjumpa Soeryo di ruang kerjanya di DPRD Batam. Perbincangan berjalan lancar. Bang Johnson dan Chris Wangkay menjelaskan tentang International People Forum. Soeryo pun menyambut positif rencana pertemuan tersebut, bahkan dia menawarkan

⁷ Lihat [news.detik.com](http://news.detik.com/infid-abaikeancaman-polda-kepulauan-riau). INFID Abaikeancaman Polda Kepulauan Riau. 7 September 2006. Diakses dari:
https://news.detik.com/berita/d-670887/infid-abaikeancaman-polda-kepulauan-riau?fbclid=IwY2xjawNvL2RleHRuA2FlbQIxMQABHtd0waxODF_7a15-6-ZbjIabV5-dtCk9T2rzGfYqketcSvJKFIqmDQWx6bw_aem_eFlhklM_TCAOJaMKTJ31Qg

⁸ Op.cit, globalpolicy.org.

Gedung DPRD Batam sebagai tempat penyelenggaraan, jika acara dilarang di semua tempat di Batam. Kami tak menjawab dengan senyum tawaran tersebut.

Usai pertemuan di DPRD Batam, kami kembali ke penginapan untuk menggelar rapat. Rapat memutuskan bahwa saya harus keluar dari Batam pada hari itu juga atau selambat-lambat besok pagi, sementara Bang Johnson dan Chris Wangkay akan pulang ke Jakarta untuk mengambil langkah-langkah lanjutan: menekan Istana Negara, DPR-RI dan Mabes Polri.

“Keselamatan lebih penting sekarang ini, Ed. Hari ini atau besok pagi, kamu sudah harus keluar dari Batam. Sore ini, saya dan Chris akan pulang ke Jakarta. Kami akan berkoordinasi dengan Istana, Senayan dan Mabes Polri. Apakah kamu sudah siapkan jalur untuk keluar Batam,” tanya Johnson kepada saya.

“Sudah. Malam ini saya akan keluar Batam, ke satu pulau. Ada teman-teman nelayan yang akan membantu. Nanti saya akan ditemani Toni. Tapi, teman-teman yang jadi panitia di sini juga tetap akan bekerja melakukan persiapan, walaupun secara sembunyi-sembunyi dan sangat hati-hati,” jelas saya kepada Bang Johnson dan Chris Wangkay.

Sore itu, kami berpisah di penginapan. Setelah berganti pakaian, saya keluar melalui pintu belakang penginapan, dijemput seorang teman dengan sepeda motor menuju sebuah *safe house*. Toni menyusul kemudian. Sementara Chris Wangkay dan Bang Johnson langsung berangkat ke bandara. Kembali ke Jakarta.

Saya dan Toni istirahat beberapa waktu di *Safe House*—sebuah rumah di tengah kebun sayur milik seorang petani di Kampung Sayur, Kawasan Tembesi—sekitar pukul 1.00 malam. Saya telah berganti pakaian. Malam itu, dua sepeda motor mengantar kami menuju sebuah pelabuhan rakyat di pulau Rempang.

Di Pelabuhan itu telah menunggu seorang nelayan (saya lupa namanya) dengan sebuah perahu kecil bermesin tunggal. Malam itu, dia mengantarkan kami ke Tanjung Pinang. Kami dititipkan ke satu teman seorang nelayan di Kampung Nelayan Madong, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjungpinang.

Sekitar tiga hari lamanya di Kampung Nelayan Madong, saya dan Toni kembali dijemput tengah malam dengan perahu kecil bermesin tunggal

menuju satu kampung nelayan di pulau Panjang yang berada di dekat pulau Batam.

Satu siang, tiba-tiba HP Toni berdering, Bang Johnson mengabarkan bahwa izin penyelenggaraan International People Forum sudah terbit dari Mabes Polri, dan keadaan sudah kondusif. Namun, saya tidak mau percaya begitu saja, terutama terkait keamanan.

“Saya sedang di Mabes Polri. Ini lagi sama Pak Anton Bahrul Alam.”

HP Bang Johnson kemudian dialihkan. Di ujung telepon Anton Bahrul Alam berbicara kepada saya. ”Ed, saya ini mantan Kapolda Kepri pertama, saya yang jamin. Masak kamu enggak percaya. Tenang saja. Sekarang kamu masuk saja ke Batam. Kamu sebutkan saja titik kamu, nanti akan ada anggota saya yang akan mengawalmu.”⁹

Dengan jaminan itu, saya akhirnya kembali ke Batam, namun saya mendapat laporan dari ibu kos bahwa sejumlah orang (diduga dari kepolisian) memaksa dia untuk membuka kamar saya. Mereka membawa sejumlah barang dari kamar berupa buku-buku dan berkas. ”Kemarin dulu, waktu Mas Edy enggak pulang-pulang, ada yang datang. Lumayan banyak, Mas. Sekitar dua mobil. Mereka minta saya buka kamar Mas Edy, mereka ambil buku-buku, sama berkas. Saya enggak bisa hubungi Mas Edy, karena HP-Mas, mati,” jelas ibu kos, ketika saya sampai di kosan.

Saya melaporkan peristiwa yang dialami kepada Bang Johnson dan Chris Wangkay, juga kepada beberapa teman-teman dari panitia nasional yang kembali masuk ke Batam, di antaranya: Dian Kartikasari, Don K Marut, Poengky Indarti dan lainnya untuk mempersiapkan penyelenggaraan International People Forum.

International People Forum akhirnya dapat diselenggarakan pada 15-17 September 2006. Bertempat di Asrama Haji, Jalan Engku Putri, Batam Center. Namun ternyata teror dan ancaman tidak mereda.

Pada pembukaan acara, sekelompok orang yang menamakan dirinya Forum Solidaritas Peduli Batam menggelar demonstrasi di sekitar Asrama Haji. Mereka mengancam akan mengerahkan massa sekitar 2.000 orang untuk mengepung kompleks Asrama Haji. Peserta pertemuan yang keluar dari kompleks juga diancam akan dihabisi.¹⁰

⁹ Saat itu, Brigjen, Anton Bahrul Alam menjabat sebagai Wakadivhumas Mabes Polri.

¹⁰ Lihat, news.detik.com. *Teror SMS & Demo Warnai Pertemuan Aktivis LSM di Batam*. 15 September 2006. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-676146/teror-sms-demo-warnai-pertemuan-aktivis-lsm-di-batam>

Para peneror tersebut sesungguhnya adalah kelompok preman yang diduga dibayar oleh kepentingan bisnis, bahkan ada spekulasi jika penolakan terhadap penyelenggaraan International People Forum didalangi oleh pemerintah Singapura.¹¹ Masyarakat Batam sendiri pada umum menyambut baik acara tersebut, bahkan pembukaan acara dihadiri oleh Asisten Gubernur Kepulauan Riau Tengku Mukhtaruddin.

Usaha-usaha untuk menggagalkan acara juga datang langsung dari Pemerintah Singapura. Banyak peserta yang datang dari berbagai negara tidak dapat hadir dalam pertemuan karena diusir oleh otoritas Singapura ketika transit di negara terus untuk masuk ke Batam.

Kanuru Ashok Ram, Sekjen National Confederation of Officer Association, sebuah LSM dari India menyebutkan enam peserta yang berasal dari India (2 orang), Sri Lanka (2 orang), Brazil (1 orang), dan Jepang (1 orang) ditahan dan tidak diperkenankan menyeberang ke Batam, kemudian dideportasi ke negara masing-masing.¹² Sedangkan para peserta dari berbagai negara yang dapat menghadiri International People Forum di Asrama Haji, Batam Center karena masuk melalui Jakarta atau melalui Johor, Malaysia.

Meskipun mendapat ancaman dan teror, acara penyelenggaraan International People Forum berlangsung dengan sukses.¹³ Bahkan, meskipun dilarang, para peserta IPF bisa melakukan aksi demonstrasi di dalam beberapa Mall di Batam, Pelabuhan Internasional Batam Center, dan sejumlah titik di Kota Batam. Aksi demonstrasi dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil untuk menarik perhatian masyarakat, khususnya masyarakat internasional.

Aksi demonstrasi dari peserta IPF membuat marah aparat kepolisian. Satu kali Direktur Intelkam Polda Kepri AKBP Slamet Riyanto menjumpai saya. "Kok ada demonstrasi, Ed. Kita 'kan sudah sepakat tidak ada demonstrasi."

¹¹ Op.cit, globalpolicy.org.

¹² Lihat, news.detik.com. *Singapura Usir Lagi 6 Aktivis LSM*. Diakses dari: https://news.detik.com/berita/d-676609/singapura-usir-lagi-6-aktivis-lsm?fbclid=IwY2xjawNvQnBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFqTHIPamxnNIJpbHcyTGY5AR52vhZw_dsY64FzBzeOE2MA8Mv3ke0BdwZA3BkXznjccvh5hrToMfYsDKbQ_aem_5drRXKMUuVIzorhYDiWJhQ

¹³ Lihat, [cadtm.org](http://www.cadtm.org). *International People's Forum organizers celebrate successful forum and share plans for ways forward*. 19 September 2006. Diakses dari: https://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=2062&fbclid=IwY2xjawNvOn1leHRuA2F1bQIxMABicmlkETFqTHIPamxnNIJpbHcyTGY5AR52vhZw_dsY64FzBzeOE2MA8Mv3ke0BdwZA3BkXznjccvh5hrToMfYsDKbQ_aem_5drRXKMUuVIzorhYDiWJhQ

"Wah saya tidak tahu kalau ada kesepakatan semacam itu. Yang saya tahu bahwa kita tidak pernah membuat kesepakatan apapun. Sebaliknya pihak Polda Kepri justru melarang penyelenggara acara," jawab saya ringan.

Para peserta IPF yang melakukan demonstrasi di Kota Batam tidak ada satu pun ditangkap atau mengalami gangguan dari orang-orang yang tak dikenal. Tetapi tidak berarti bahwa semua dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan.

Pemerintah Singapura tetap saja berupaya keras mengganggu para peserta IPF. Pemerintah Singapura melakukan pencekalan terhadap sejumlah aktivis dari berbagai negara untuk menghadiri pertemuan World Bank dan IMF di Singapura pada 19-20 September 2006. Bahkan sejak 6 September 2006 otoritas Singapura melakukan pencekalan terhadap 20 delegasi Infid Jakarta yang mendapat undangan resmi dari World Bank dan IMF untuk hadir dalam pertemuan di Singapura.¹⁴ IMF-WB sendiri menyatakan telah memberikan akreditasi kepada sekitar 500 perwakilan LSM dari lebih dari 45 negara untuk menghadiri sidang tahun bersama kedua lembaga internasional itu.

Kebijakan pemerintah Singapura tersebut menimbulkan ketegangan internasional. IMF-WB mengeluarkan pernyataan bersama dari Washington pada Kamis, 7 September 2006, yang menyerukan kepada pemerintah Singapura untuk tidak menghalangi 'perwakilan masyarakat sipil yang terakreditasi dengan baik' untuk menghadiri pertemuan mereka. "Kami secara konsisten menentang segala pembatasan partisipasi penuh dan penyampaian pandangan secara damai. Dialog terbuka dengan masyarakat sipil juga penting bagi efektivitas operasional lembaga kami," tegas pernyataan tersebut.

Belakangan setelah dikritik Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz, Pemerintah Singapura melonggarkan kebijakannya. Namun tidak dapat memperbaiki keadaan. Lebih dari 160 kelompok non pemerintah pada Jumat 15 September 2006, mendeklarasikan boikot terhadap pertemuan IMF dan Bank Dunia di Singapura untuk memprotes tindakan keras terhadap kebebasan berbicara dan pelarangan aktivis oleh Pemerintah Singapura.¹⁵

¹⁴ Lihat, news.detik.com. *20 Delegasi Infid Dicekal Masuk Singapura*. 13 September 2006. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-674477/20-delegasi-infid-dicekal-masuk-singapura>

¹⁵ Lihat, brecorder.com. *More than 160 NGOs boycott IMF-World Bank meetings*. 16 September 2006. Diakses dari: <https://www.brecorder.com/news/3318952/more-than-160-ngos-boycott-imf-world-bank-meetings-20060916476206>

Walaupun mendapatkan tekanan luar biasa, berupa ancaman dan teror serta deportasi terhadap peserta dari negara lain oleh pemerintah Singapura, namun International People Forum (IPF) telah membuka mata para pembuat kebijakan di Jakarta mengenai posisi Indonesia berkaitan dengan IMF dan Bank Dunia. Sebulan setelah IPF, Indonesia membayar kembali seluruh hutang dari IMF dan menutup bukunya dari pemantauan kebijakan-kebijakan keuangan Indonesia.¹⁶

Setelah penyelenggaraan International People Forum dan pertemuan World Bank dan IMF di Singapura, Bang Johnson dan beberapa teman menyarankan saya untuk kembali ke Jakarta.

Sejak akhir 2006 sampai saat ini, saya menetap di Jakarta bekerja sebagai peneliti di sejumlah lembaga. Namun selama bermukim di Jakarta, saya pernah berjumpa lagi hanya satu kali lagi dengannya. Pertemuan kebetulan di Bandara Soekarno-Hatta ketika dia hendak ke Pekanbaru Riau, sedangkan saya hendak ke Medan Sumatera Utara. Pertemuan di tahun 2012 itu, begitu singkat, hanya bertegur sapa sejenak dan bercerita ringan tentang kondisi masing-masing. Sebelum kemudian berpisah jalan.

Selanjutnya, perkembangan Bang Johnson hanya saya ikut di berbagai podcast media sosial atau dalam dialog-dialog di televisi.

Hingga kemudian lini massa media sosial saya, dipenuhi kabar ucapan duka cita atas meninggalkan Bang Johnson, pada minggu, 26 Oktober 2025. Kepergian itu begitu cepat dan mendadak, dan saya tak mampu mengucapkan salam perpisahan kepadanya.

Selamat jalan Bang Johnson, tenanglah dalam keabadian. Sampai jumpa lagi.

Edy Burmansyah, *peneliti, aktivis, dan mantan panitia International People Forum (IPF) 2006.*

¹⁶ Lihat, Internationl NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Laporan Tahunan 2006, hlm.40

Sepenggal Kenangan Bersama Bang JP

I Wayan Suardana

Menuliskan sosok Abang Johnson Panjaitan (Bang JP) dalam situasi duka merupakan sebuah kesulitan tersendiri bagi saya. Campur baur rasanya. Antara rasa kangen karena tidak pernah bertemu dalam kurun waktu yang sangat lama -semenjak beliau “menjauh” dari dunia gerakan sosial- dan rasa kehilangan yang amat sangat.



Sumber foto : radarriaunet.com

Menilik sosok Bang JP, bagi aktivis 90-an dan 2000-an rasanya jarang orang yang tidak mengenal sosok dia. Sangat populer dan dikenal trengginas dalam sepak terjangnya. Kadang sangat sulit membedakan sosok dia sebagai advokat dengan demonstran. Bukan lagi dua sisi mata uang tapi seperti menyatu. Ini pula yang membuat sosok saya tertarik dengan sosok dia. Semangat muda saya kala itu, seperti bertaut dengan karakter dia. Baik di depan persidangan, maupun di depan media. Dengan tipikal demikian, kelekatan dia dalam gerakan HAM, pasti sudah banyak yang menuliskan gegap gempita perjuangan.

Saya kenal dia layaknya agitator. Dia berupaya meramu diri agar semua hal yang bisa dibela dia upayakan. Sama halnya ketika saya dikriminalisasi, atas aktivitas saya saat masih di gerakan mahasiswa. Dia datang ke Lapas, hanya untuk bilang: “Gendo, sidangmu bertepatan dengan sidang pengadilan HAM di Papua. Aku pengen bela kamu. Bisa gak kamu mundurin sidangnya. Gemana-lah caramu pokoknya undurin! Supaya aku bisa ikut sidangmu!” ucapnya setengah merajuk.

Begitulah sekelumit percakapan yang saya ingat sekitar tahun 2005. Sayangnya sudah terlalu banyak drama di persidangan saya saat itu sehingga permintaan dia tidak saya ikuti. Akhirnya ketidakhadiran dia diwakili oleh perwakilan advokat PBHI Nasional: Coco, Taki dkk.

Pertautan saya main rekat, ketika saya didapuk menjadi sebagai Ketua Badan Pengurus PBHI Bali. Uniknya, saat itu saya terpilih dalam posisi masih di dalam lapas Kerobokan dan masih berstatus mahasiswa. Mungkin saya satu-satunya BP wilayah yang belum bertitel S.H., sehingga tidak begitu percaya diri. Tetapi komunikasi dengan Bang JP menguatkan saya. Akhirnya saya emban tugas itu. Dari situlah saya makin lekat dengan Bang JP.

Sejak saat itu, saya punya kesempatan untuk mengenal lebih jauh Bang JP. Dari situ, sosok dia yang heroik “memudar” di mata saya. Ternyata Bang JP juga manusia, bukan robot yang naluri kemanusiaanya sudah diganti mesin pemberontak. Saya tertarik menceritakan hal ini sebab sisi ini yang mungkin jarang dilirik.

Di tengah keheroikannya, dia adalah manusia biasa: berupaya untuk bercanda, tapi kayaknya dia tidak punya DNA humoris. Candaan dia cenderung garing. Bercanda sih bercanda tapi mukanya tetap gak bisa menopang humornya. Ujung-ujungnya tetap saja jadi obrolan serius.

Saya masih yakin Bang JP manusia biasa. Saya kerap memberanikan menjahili dia; kadang nyandain dia seolah-olah mengecilkan dia. Tapi begitulah, candaan tidak mempan, yang ada biasanya dibalas dengan “kesombongan”, seperti, “Gini-gini gua Ketua Dewan Nasional WALHI lho! Lu harus bangga ama gua,” ujar dia. “Wah di-kick balik nih,” saya menggerutu.

Mungkin banyak orang yang melihat bang JP sudah pecah nyalinya, seperti robot yang tidak punya rasa takut. Namun tidak demikian dengan saya. Pernah suatu kali, dia sedang mengadvokasi kasus rakyat yang berhadapan dengan pengusaha besar. Kebetulan saat itu saya ada di kantor PBHI nasional di sekitar Matraman. Dia datang dengan tergesa-gesa, dan

beberapa orang -yang saya kira WNA- menunggu di teras depan. Mereka berkaos biru bertulis PBI (*Peace Brigade International*) (kalau gak salah). Saya agak kudet, saya coba ikuti obrolan mereka, ternyata Bang JP baru datang dari sebuah tempat di mana saat itu dia diintimidasi dan diancam. Dia cerita dengan gaya heroiknya, walaupun yang mengejar dia badannya di atas rata-rata. Dia tetap bertahan, sambil perlahan mundur hingga mepet ke pagar. “Gua dikejar, mau ditonjok, gua lawan balik mereka, gua tuding-tuding mereka, mau apa Lu.” Begitu kira-kira dia cerita sambil memperagakan gerakan dia saat diintimidasi. Untungnya dia bisa lepas dan balik kantor. PBI merespon hal itu dengan tindakan respons cepat.

Selepas PBI pulang, saya iseng bertanya: “Bang! Apa Abang gak takut tadi?” dia menjawab, “Ngapain gua takut. Gua lawan balik-lah mereka,” ujarnya tapi sambil cengengesan. “Lah kalau Abang gak takut, ngapain mesti lapor PBI?” saya penasaran. Setelah agak panjang cerita, belakangan dia akui bahwa dia takut juga. “Takut dikitlah, Ndo. Tapi sebagai aktivis kita gak boleh memperlihatkan rasa takut,” elaknya tidak mau kalah. Masuk akal sih, tapi dari situ saya melihat sisi manusia-nya seorang Bang JP. Tetap ada rasa takut tetapi logikanya tetap waras.

Pertautan saya dengan Bang JP lumayan banyak. Tentu tidak sebanyak kawan-kawan yang beraktivitas di Jakarta. Sebagai orang kampung, saya banyak terinspirasi dengan Bang JP. Kepedeannya, gaya advokasinya memberi warna tersendiri. Sayangnya, sejak Kongres PBHI di Yogyakarta, setelah selesainya laporan pertanggung jawabannya di Kongres, dia seperti menghilang. Dia tidak mau lagi duduk di kepengurusan organisasi karena alasan kesehatan. Memang beredar kabar dia sakit. Tetapi sekali lagi mamanya Bang JP, seperti pantang untuk diketahui sakit. Dia tetap terlihat sehat dan gagah. Hanya saja “hilangnya” dia di aktivitas PBHI membuat saya percaya dia dalam keadaan sakit dan butuh rehat.

Setelah itu, saya hanya berkesempatan bertemu dengan Bang JP sekali atau dua kali (ini pun saya lupa). Tapi tidak banyak hal yang diobrolin. Sebentar saja lalu kembali lagi kami lost kontak. Akhirnya muncul berita, di pagi hari itu, yang menyadarkan saya. Ini adalah momen kehilangan yang sebenar-benarnya. Dia telah pergi selamanya. Dia meninggalkan banyak pertanyaan dalam diri saya yang tidak pernah mendapatkan jawaban dari dia. Entahlah, jika kemarin dia hanya “menghilang” untuk berjarak dan berharap suatu saat akan bisa bertemu kembali, atau minimal melihat dia di media sesekali. Tapi kini hal itu sudah tidak mungkin kecuali hanya membaca memori dari apa yang dia lakukan di masa lalu.

Bang Johnson, aku tidak banyak bisa bicara, bahkan yang aku tulis pun pasti garing seperti garingnya candaanmu Bang. Izinkan aku meminta maaf jika aku pernah ada salah dengannya. Kamu orang baik. Kamu banyak mewarnai hidupku. Terima kasih atas semuanya, Bang. Doa terbaik untukmu. Damailah di alam barumu. Segala jejakmu akan masih terukir abadi.

Bang JP dalam Ingatan

Gunawan



Sumber foto : detik.com

Bang JePe biasa disapa. Panggilan inisial untuk almarhum Johnson Panjaitan. Awalnya, medio tahun 2005, sebagai staf PBHI yang bertugas mengurus siaran pers. Mungkin karena pengaruh logat Jawa, di siaran pers tersebut saya menulisnya Jhonson. Karena saya lebih familiar dengan ucapan Jon. Namun oleh kawan PBHI saya Derwin, dia mengajari ucapan yang agar mudah diingat bagi saya, yaitu Joh hen son. Setelah itu saya tidak salah lagi dalam menulis nama Johnson Panjaitan. Hal ini sama dengan pada awalnya saya menulis nama Hendri, bukan Henry, untuk nama Henry Simarmata (Kala itu menjadi Koordinator Eksternal, lalu menjadi Asisten Badan Pengurus PBHI).

Mungkin di awal tahun 2025, telepon rumah orang tua kami di Yogyakarta berdering, di penghujung telepon ada suara Muhammad Rifqi, orang Cirebon. Tahun 90-an, dia kuliah di Universitas Darul Ulum Jombang. Kami sama-sama baru usai menyelesaikan amanat sebagai Politbiro FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia). Di ujung telepon dia berkata, agar saya mau bekerja di PBHI. Saya bilang "Waduh Bung saya lagi ada pekerjaan." Kemudian Rifqi berkata, "Apa-apa? Kacang-kacang?". Karena, waktu itu, saya lagi ada semacam kemitraan usaha tani kacang. Nampaknya Rifqi sebelumnya sempat berdiskusi dengan Savic Alielha, yang juga baru

selesai menjadi Ketua Umum FPPI (sekarang beliau menjadi salah satu ketua di PB NU).

Bang JP memiliki hubungan erat dengan kawan-kawan aktivis di Jombang, khususnya dengan kawan-kawan yang dulu aktif di Formajo (Forum Mahasiswa Jombang). Formajo dengan sejumlah organisasi gerakan mahasiswa di beberapa daerah mendirikan FAMI (Front Aksi Mahasiswa Indonesia). Pada tahun 1994, FAMI melakukan aksi massa di gedung DPR dengan membentangkan spanduk “Seret Soeharto ke Sidang Istimewa MPR”. Alhasil, 21 mahasiswa ditangkap dan dipenjara. Peristiwa tersebut dikenang sebagai “Petaka Demokrasi”. Peristiwa tersebut mengantarkan Rifqi, dan beberapa aktivis Formajo serta aktivis gerakan mahasiswa lainnya menjadi Tapol/Napol dengan Bang JP menjadi salah sebagai kuasa hukum mereka.

Kemudian, kebetulan saya ada acara di Bogor, pertemuan nasional gerakan petani. Selepas Bogor, saya bertemu Rifqi di Taman Ismail Marzuki yang sedang siap-siap ke Timor Leste untuk menjadi staf di KBRI, untuk kemudian diajak ke PBHI. Begitu masuk PBHI kami bertemu Indro Tjahjono (aktivis mahasiswa 70-an) dan almarhum Japrak (aktivis mahasiswa 80-an), nampaknya habis selesai konferensi pers terkait BIN (Badan Intelijen Nasional).

Di ruangan Bang JP mem-*briefing* saya. Di dalam ruangan ada juga bang Henry Thomas Simarmata dan Bang Taki (Reinhard Parapat, kala itu Direktur Bantuan Hukum dan Advokasi). Dengan gaya dan pilihan kata yang khas Bang JP menjelaskan apa yang akan kami lakukan. Untuk menyebut sejumlah daerah yang ada PBHI-nya, Bang JP mempergunakan kata “mengepung”.

Gaya dan pilihan kata yang khas, agak dramatis. Misalnya dalam sebuah Raker, Bang JP menekankan program “war against impunity”. Ada juga pertanyaan Bang JP, “Apa bisa dokumentasi monitoring untuk “perang”? Tidak hanya pilihan kata dan gaya, selera musiknya pun selaras dengan itu. Pernah saya semobil dengan Bang JP Jakarta-Bogor dan Bogor-Jakarta, diiringi lagu-lagu Guns N Roses. Dalam rapat jaringan membahas risiko sebuah aksi di luar negeri, para peserta rapat akan terbawa dalam suasana “tidak ada takut-takutnya”.

Bang JP seringkali menekankan arti penting monitoring dalam pembelaan HAM, sehingga dalam menyusun *policy paper* aspek pemantauan selalu dimasukan guna menganalisis sebuah kebijakan. Misalnya, kami menyusun *policy paper* tentang pertahanan, berisi analisis kebijakan atas Buku Putih Pertahanan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan. Meski semacam *strategic defense review*, tapi aspek HAM berdasarkan

sejumlah peristiwa dimasukan. Policy Paper tersebut selain nantinya dicetak, juga dikirim ke Kementerian Pertahanan, dan direspon positif oleh Menteri Pertahanan sehingga dikirim surat dari Menhan yang berisi ucapan terima kasih atas masukan kepada buku putih pertahanan.

Serangkaian proses pengadilan HAM kasus Abepura, tidak luput dari pendokumentasian hasil pemantauan. Kepada saya yang menulis pemantauan tersebut yang nanti dibukukan dalam judul *Papua on Trial: Uraian Penjelasan PBHI atas Pelanggaran HAM Berat Abepura*, Bang JP menyarankan agar ada bab khusus terkait apa pelajaran dari advokasi peristiwa tersebut. Hal ini menunjukan bahwa Bang JP membaca naskah secara seksama.

Suatu ketika terjadi peristiwa yang kami sebut sebagai bentrok 16 Mei Uncen (Universitas Cendrawasih). Bang JP bilang peristiwa tersebut, setting politiknya mirip dengan peristiwa Santa Cruz. Namun saya membantah. Berdasarkan pemantauan saya, peristiwa tersebut lebih mirip peristiwa Kudatuli. Bang JP kemudian memberi perintah untuk membuat tulisan dalam waktu satu minggu. Tapi belum sampai satu minggu, Kak Co (Ecoline Situmorang), meminta tulisan tersebut untuk dibawa ke Papua dalam rangka mengadvokasi peristiwa tersebut. Laporan pemantauan tersebut telah dibukukan dengan judul *Tentang Aksi-Aksi Melawan Freeport*.

Bang JP juga menugaskan kepada saya untuk mengembangkan tema hak Ekosob. Kami menjadikan isu hak atas pangan sebagai isu yang dapat menyatukan berbagai isu lain. Misalnya: hak buruh, hak petani, hak atas kesehatan, dan hak atas sumber-sumber agraria.

Belakangan Komnas HAM sedang menyusun Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Pangan, saya bersama Gina (Sekjen PBHI) ikut sebagai tim penyusun. Di dalam pertemuan awal, Komisioner Komnas HAM menyatakan bahwa Komnas HAM akan bekerja sama dengan PBHI karena sejak lama mengurus isu hak atas pangan. Setelah diberikan kesempatan bicara, saya menyatakan, nampaknya Komnas HAM dan PBHI bekerja sama dengan sejak lama dalam isu hak atas pangan, sayalah titik temunya. Karena di masa Bang JP sebagai Ketua PBHI kerja sama itu dimulai. Sewaktu jaringan hak atas pangan mulai terbentuk, bahkan dalam suatu acara dimeriahkan juga oleh Roy Jeconiah (eks vokalis Boomerang), Bang JP mengeluarkan arahan, “Teruskan membangun jaringan!”

Ya kini perjuangan tetap kami teruskan.

Gunawan, mantan Kadiv Analisa Kebijakan Publik, Pemantauan, dan Kampanye PBHI, kini sebagai Penasehat Senior IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice).

Sang Advokat dan Guru Hak Asasi Manusia bagi Papua

Gustaf R. Kawer

Johnson Panjaitan adalah sosok advokat hak asasi manusia yang mengabdikan hidupnya bagi perjuangan keadilan dan kemanusiaan. Dalam perjalanan panjang dunia advokasi hukum di Indonesia, namanya menempati tempat istimewa, terutama bagi masyarakat Papua. Ia bukan hanya pengacara yang tajam dalam berpikir dan teguh dalam prinsip, tetapi juga manusia yang hidup dengan hati dan keberanian, menjembatani dunia hukum dengan penderitaan rakyat kecil yang ia bela tanpa pamrih.

Sebagai Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta pada awal tahun 2000-an, Johnson dikenal bukan semata karena ketajaman analisis hukumnya, tetapi juga karena keberaniannya melintasi batas geografis dan politik untuk membela korban pelanggaran HAM.



Sumber foto : tabloidskandal.com

Pada tahun 2003, ia datang jauh dari Jakarta ke Papua untuk membantu mempersiapkan saksi-saksi dalam kasus pelanggaran HAM berat Abepura, 7 Desember 2000, kasus pertama dari Papua yang berhasil disidangkan di Pengadilan HAM Republik Indonesia. Meskipun

para pelaku akhirnya dibebaskan, langkah itu menjadi tonggak penting: untuk pertama kalinya. Suara korban dari Papua menembus ruang sidang negara dan memaksa negara menatap wajah ketidakadilan di wilayah timur Indonesia.

Dalam proses advokasi tersebut, Johnson tidak bekerja sendirian. Ia berkolaborasi dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura, yang terdiri dari organisasi-organisasi HAM di Papua seperti LBH Papua, ELSHAM Papua, KontraS Papua, SKPKC Fransiskan Papua, KPKC Sinode GKI, dan sejumlah lembaga lainnya. Dari kerja bersama inilah banyak aktivis muda Papua mengenal sosoknya lebih dekat, termasuk saya sendiri, yang saat itu menjadi Koordinator Litigasi Koalisi.

Johnson tidak menempatkan dirinya sebagai tokoh pusat, melainkan hadir di tengah korban dan rekan-rekannya sebagai sahabat. Ia mendengarkan kisah penderitaan mereka, menulis ulang pengalaman mereka dalam bahasa hukum, dan memperjuangkan agar kebenaran mendapat tempat di hadapan negara. Melalui jaringan PBHI dan bimbingannya, selain lewat LBH Papua, saya kemudian menempuh pendidikan advokat dan menapaki jalan panjang pembelaan hak asasi manusia, jalan yang saya pahami juga melalui keteladanan Johnson Panjaitan.

Dalam advokasinya, Johnson menolak jarak antara pengacara dan korban. Ia turun langsung ke lapangan, berbaur dengan masyarakat, mendengarkan suara mereka satu per satu, dan menegakkan keadilan dari bawah.

“Kesederhanaan, keberanian, dan empati pada korban membuat advokasinya begitu komprehensif,” kenang salah seorang rekan seperjuangannya dalam advokasi kasus Abepura ini. Ia mengajarkan bahwa pembelaan terhadap korban tidak berhenti pada dokumen hukum atau ruang sidang, tetapi tumbuh dari kesetiaan kepada kemanusiaan. Prinsip itu membuatnya disegani bukan karena gelar atau jabatan, tetapi karena integritas dan ketulusannya.

Selain kasus Abepura, Johnson turut mengawal upaya pengungkapan berbagai tragedi kemanusiaan lain di Papua seperti Kasus Wasior (2001), Wamena (2003), Biak Berdarah (1998), hingga penembakan guru internasional di area PT Freeport pada 2002 yang diduga melibatkan anggota militer. Semua itu ia tangani bukan demi popularitas atau sorotan media, melainkan karena keyakinannya yang teguh bahwa setiap korban berhak atas kebenaran dan keadilan.

Dari kerja panjang itu, lahirlah komunitas korban bernama (BUK), sebuah wadah yang menghimpun para korban pelanggaran HAM di Papua untuk saling menguatkan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Berawal dari kelompok korban dan saksi kasus Abepura dan Komunitas Korban lainnya, BUK berkembang menjadi ruang solidaritas, di mana para korban dari berbagai wilayah Papua saling mendukung, mendokumentasikan pengalaman, dan memperjuangkan pemulihannya. Di balik lahirnya BUK, ada gagasan sederhana namun mendalam dari Johnson: keadilan bukan hanya produk hukum, melainkan buah dari kesadaran dan keberanian masyarakat untuk bersatu.

Lebih dari seorang rekan perjuangan, Johnson adalah guru bagi banyak pengacara HAM muda di Papua. Ia melatih generasi muda untuk tidak hanya cakap di ruang sidang, tetapi juga peka terhadap penderitaan manusia. Bagi Johnson, advokat sejati bukan hanya pembela di hadapan hukum, tetapi juga penjaga nurani kemanusiaan. Dari keteladanan dan bimbingannya, lahirlah generasi baru pembela HAM yang kini berdiri di garda depan, melanjutkan perjuangan yang dulu ia mulai. Ia menanamkan nilai bahwa keberanian, kejujuran, dan kepedulian adalah fondasi setiap perjuangan keadilan yang sejati.

Ketika Johnson Panjaitan berpulang pada 26 Oktober 2025, dunia hak asasi manusia kehilangan salah satu pejuang terbaiknya. Namun, semangatnya tidak ikut pergi. Ia meninggalkan warisan yang hidup dalam jaringan solidaritas, dalam komunitas korban yang terus berjuang, dan dalam diri para advokat muda yang dibentuk dengan kasih dan keteladanan. Di tengah situasi HAM yang masih penuh tantangan, nilai-nilai yang ia ajarkan menjadi pengingat bahwa membela yang lemah adalah panggilan tertinggi dalam kemanusiaan.

Bagi para korban, rekan seprofesi, dan generasi muda pembela HAM, Johnson bukan hanya seorang advokat, tetapi juga guru, sahabat, dan inspirasi. Ia telah menyalaikan “lilin” yang terus menyala di jalan panjang menuju keadilan. Namanya akan terus hidup dalam setiap perjuangan untuk kebenaran, sebagai teladan bahwa hukum hanya bermakna ketika digunakan untuk memulihkan martabat manusia dan melawan ketidakadilan.

Gustaf R. Kawer, Advokat, Ketua Perkumpulan Pengacara HAM untuk Papua.

Johnson Panjaitan, Pengacara Pembela Rakyat

Hasudungan Sirait

'Lawyer' kampung yang dipaksa menjadi pengacara internasional. Begitulah Johnson Panjaitan melihat dirinya. Betapa tidak?

Tak seperti beberapa seniornya, dia belum pernah bersekolah di luar negeri. Apalagi mengadvokasi dan berkampanye di tingkat internasional. Dengan ranah kembara sempit selama ini tentu saja pengetahuan dan pengalamannya masih cekak.



Sumber foto : detik.com

Sebuah pertanyaan mengusik pikirannya: bagaimana ia harus menangani kasus Xanana Gusmao yang sudah kian 'go international'? Bingung juga dia. Kalau soal nyali tak masalah bagi dia.

Kebingungannya tak lama. Otaknya berputar cepat dan sebentar saja sudah ada jawabnya: belajar! Dengan waktu sedikit ia berupaya belajar banyak. Tak hanya teknis hukum (mencakup hukum internasional dan hukum perang) tapi juga diplomasi yang meliputi aturan protokoler.

Cara belajarnya praktis lagi murah: berdiskusi dengan banyak orang – para advokat senior, wartawan, bahkan intel yang sejak dulu berseberangan dengan dia.

Tak sia-sia putra dari pasangan Djalimar Panjaitan-Artelia Sibarani kelahiran Jakarta, Juni 1966, ini belajar. Hasilnya?

Sebagai koordinator Tim Pengacara Xanana Gusmao (1996-1999), tak tampak kikuk atau canggung manakala mempertemukan sang klien -- yang merupakan kombatan dari kelompok ‘separatis’-- dengan para diplomat dunia, Menlu AS atau utusan PBB.

Penampakannya malah laksana seorang yang berpengalaman saja. Tak syak lagi: konflik Timtim telah mengorbitkan dia menjadi 'lawyer' berkelas internasional, sesuatu yang cukup langka di negeri berpopulasi 220 juta lebih ini.

Timor Timur sudah negara merdeka dengan nama Timor Leste. Sebagai ketua Tim Advokasi Korban Pelanggaran HAM Timor Timur (sejak 1999 hingga kini), Johnson masih menjalin hubungan baik dengan Presiden Xanana. Sejak awal memang relasi mereka tak sekadar kuasa hukum-klien.

Adalah Johnson yang mengajari Xanana berbahasa Indonesia sewaktu di LP Cipinang dan penjara khusus Salemba. Kesulitan bagi Johnson kala itu adalah Xanana benci bahasa Indonesia selain sangat militer.

"Padahal saya *pengen* dia tampil sebagai pemimpin sipil," kata suami Elisabeth Sondang Pane itu mengenang. "Maka kalau mau konferensi pers, saya harus ajari dia: pilihan kata Indonesia-nya begini, persoalannya begini, dan wajah Anda harus begini."

Di masa itu dia mengurusi sejumlah kasus politik lain juga sehingga kerap mengunjungi distrik-distrik Timor Timur. Kalau kesana, ada kalanya menjalankan tugas ekstra atas nama perkawanan, yaitu menyampaikan titipan Xanana kepada para pemimpin perlawanan; atau sebaliknya. Titipan bisa pesan atau memo klandestin.

Johnson dipercaya banyak orang, terutama mereka yang tersangkut kasus politik. Karena itu, ia sering diandalkan menjadi penasihat-kuasa hukum mereka.

Alhasil, ia menjadi koordinator tim advokasi tapol-napol seluruh Indonesia dan pembela dalam kasus politik di Aceh, Papua, Maluku, dan Poso.

Tak syak lagi, dialah pengacara kasus politik terkemuka di Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk sampai di posisi itu, tentu banyak sudah yang telah dikorbankan dan dipertaruhkan. Salah satu yang pertaruhkan adalah nyawanya sendiri

Against the Stream

Johnson Panjaitan datang dari jalur lain, jalur yang bukan utama. Lintasannya tidak lempang. Pula, jauh dari keramaian, kenyamanan, kelimpahan, serta semerbak wangi khas dunia metropolis.

Sesungguhnya ayah Pangidoan dan Pieter Human ini tak pernah bercita-cita menjadi pengacara atau kuliah di fakultas hukum. Minatnya lebih ke politik, tepatnya politik pemerintahan.

Ditolak di UI dan UGM, karena pertimbangan ekonomi, masuk FH UKI (Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia) tahun 1984. Dua tahun ia belajar serius: setelah itu bosan: teori-teori yang didapatkan di kuliah, seperti di bangku sekolah dulu, tak sesuai dengan realitas di masyarakat.

"Misalnya sejak SD di Jatinegara saya diajari P4. Tapi, begitu keluar dari halaman sekolah, Kamtib, Kodim, polisi begitu saja memukuli pedagang kaki lima. Padahal saya tahu mereka *meras-meras* juga, *ngutip-ngutip*," katanya. "Jadi kita diajari tertib, padahal di luar itu omong kosong semua."

Daripada kuliah ia akhirnya lebih gemar turun ke jalanan berdemonstrasi (menentang pembangunan lapangan golf, misalnya) atau bertandang ke tempat-tempat diskusi. Model diskusi yang ia suka adalah yang hangat pokok bahasannya. Karena itu, model 'underground' yang lebih digandrungi.

Ke markas Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) akhirnya ia lebih kerap bertandang. Di sana ia menemukan para pembela orang kecil. Ada Adnan Buyung Nasution, Yap Thiam Hien yang sudah ia kenal karena pengurus Yayasan UKI juga, Luhut Pangaribuan, Mas Achmad Santosa, Todung Mulya Lubis, atau Lukman Wiranata. Yang terakhir mantan menteri kehakiman.

Di YLBHI sesekali ia bisa bermuka-muka dengan Jakob Oetama, Dawam Rahardjo, dan yang lain. Akhirnya, ia merasa apa yang selama ini ia cari sudah ditemukan lewat wacana yang bersemai di "markas kaum aktivis" di seberang Megaria Jakarta Pusat itu.

Setelah SKS-nya mencapai 110, Johnson menjadi "volunteer" LBH yang giat betul di pelbagai komite aksi dan rupa-rupa kelompok studi.

Suatu waktu ia memutuskan ikut program YLBHI, Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) LBH Jakarta. Putusannya tak salah. Yang dipelajari dalam pendidikan calon pengacara LBH ini tak hanya hukum dan peskum, tapi juga HAM. Materi yang sudah lama hendak dipelajarinya.

Seusai pendidikan Kalabahu, ia mendapatkan tugas mengurusi pedagang asongan yang sedang dihalau penguasa Republik. Tugas berat dan penuh tantangan seperti ini ia suka dan sebenarnya sudah lama ia dambakan.

"Karena saya yang mengorganisir kawan-kawan pengasong maka lawan saya waktu itu Menkopolkam Sudomo," katanya. "Di lapangan saya berhadapan dengan BAIS. Sedangkan kawan-kawan berhadapan dengan Kamtib."

Waktu mengadvokasi, Johnson bersentuhan langsung dengan kanak-kanak pengasong yang berasal dari Brebes dan sejumlah kampung. Bersama mereka berhadapan langsung dengan kekuasaan.

Pengalaman ini, menurut dia, sangat membekas di hatinya dan menjadi pelecut dirinya untuk menjadi advocatus proporum 'pembela rakyat'.

Tahun 1990 ia menjadi sarjana hukum. Setelah 1,5 tahun menjadi volunteer LBH, ia bergabung dengan Institute Sosial Jakarta (ISJ) yang dipimpin Romo Sandyawan Sumardi. Di ISJ ia mengurusi buruh dan kaum miskin kota (pemulung, pengamen, pengemis, gelandangan, dsb).

Di masa ISJ inilah dia bersentuhan dengan anak-anak muda Timor Timur yang dikirim untuk menjadi buruh di kawasan-kawasan industri. Persentuhan inilah, lewat jalan panjang dan berliku, yang mempertemukan dia dengan Xanana, kelak.

Delapan tahun cukup sudah bagi Johnson di ISJ. Bersama Hendardi, Tedjo Bayu, Sandyawan, Luhut Pangaribuan, Mulyana Kusumah, Benny Harman, Princen, Mochtar Lubis, Permadi, Rachlan Nasidik, dan yang lain pada 1998 ia mendirikan Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi (PBHI).

Berfokus pada HAM, PBHI mengurusi pelbagai kasus. Yang menarik dan segera membuat nama lembaga ini meroket adalah penculikan aktivis pasca-27 Juli (Pius Lustrilanang, Desmond Mahesa, Haryanto Taslam, dkk.) oleh satuan Kopassus.

Menjadi Sekjen PBHI di periode 2001-2004. Saat itu Johnson Panjaitan menjadi direktur Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), di samping membuka kantor advokat sendiri. Jadi, sedang di persimpangan jalan dia.

*Catatan:

-Johnson Panjaitan berpulang pada Minggu pagi, 26 Oktober 2025.

-Artikel ini muncul di majalah kami, "TATAP", edisi November-Desember 2017. Kawanku yang baik hati ini aku wawancarai di kantor mungil-bersahajanya di kawasan kumuh yang tak jauh dari Stasiun Manggarai.

-Potret Johnson di atas dihasilkan Edward Tigor Siahaan. Fotografer 'TATAP' lulusan London tersebut sengaja meminta Johnson berpose di rel kereta Manggarai yang simpang-siur. Itu sebagai perlambang betapa carut-marutnya sistem hukum Indonesia. Ternyata, itu berlanjut hingga detik ini.

Cerita Kecil

Tentang Memoria Johnson Panjaitan

Helio Freitas



Sumber foto : dokumen internal

Ketika pertama kali bertemu dengan Johnson Panjaitan di Institut Sosial Jakarta (ISJ), saya belum mengetahui namanya. Kala itu bulan Maret 1993, di ruang tamu kantor ISJ yang berlokasi di Jalan Haji Yahya No. 14, saya melihatnya menggunakan baju berwarna biru tua, celana jeans, sandal Carvil dan menggendong tas ransel ala mahasiswa di belakangnya. Saat itu saya pikir ia adalah frater yang ingin bertemu dengan Romo Sandyawan yang kala itu merupakan direktur Institut Sosial Jakarta. Barulah setelah beberapa minggu saya di sana, saya mengetahui bahwa Johnson Panjaitan adalah Kepala Divisi Advokasi Perburuhan ISJ yang beroperasi di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi).

Johnson tidak selalu aktif di kantor dan berkelana kemana-mana. Namun ketika ada pertemuan jumatan^[1] di Kantor, Johnson selalu punya cerita dan selalu membawa isu-isu tentang pelanggaran hak asasi manusia, pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh bahkan hingga mengusulkan beberapa strategi untuk mengadakan advokasi dan aksi. Jadi peranan Johnson lebih banyak di lapangan dibandingkan di kantor. Tetapi begitu ia menghadiri pertemuan jumatan di kantor, ada banyak cerita yang muncul darinya tentang bagaimana caranya menjatuhkan rezim orde baru

kala itu, melakukan kerja-kerja jaringan dan tentang bagaimana caranya mengorganisir buruh dan mahasiswa, yang hasilnya adalah kejatuhan rezim Soeharto dan kebangkitan reformasi. Melalui pengalaman bersama lewat biro buruh di Institut Sosial Jakarta, Johnson memprovokasi dan mengorganisir massa hingga berhasil mendirikan 16 paguyuban buruh di Jabodetabek. Salah satu paguyuban tersebut adalah Organisasi Buruh Timor-Timur yang diberi nama Moris Dame. Organisasi ini didirikan awal tahun 1996 di rumah mendiang Francisco Xavier do Amaral.

Selain organisasi buruh, Johnson juga terlibat dalam berbagai macam diskusi dengan beberapa kelompok mahasiswa, LSM, bahkan dengan organisasi pers seperti AJI (Asosiasi Jurnalis Independen) yang pada akhirnya mengadakan aksi-aksi menjelang reformasi dan kemudian berhasil menjatuhkan rezim orde baru kala itu. Dari 16 paguyuban buruh itu, kini tersisa satu yang bertahan yaitu Paguyuban Karya Utama (PKU) yang kala itu berlokasi dekat terminal Tangerang.

Catatan di atas adalah sekedar pengetahuan saya tentang Johnson, ketika masih bersama-sama di Institut Sosial Jakarta dari bulan Maret 1993 hingga Desember 1999. Namun, ada beberapa catatan khusus tentang keterlibatan saya bersama Johnson ketika menjadi pengacara Xanana Gusmão, dan ketika menjadi pengacara Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Budiman Sudjatmiko dkk pada kasus 27 Juli 1996 di Jakarta.

Pertama, Pledo Budiman Sudjatmiko dkk

Masih ingat dalam ingatan saya, hari itu Sabtu sore menjelang malam. Johnson membawa sebuah berkas yang isinya tentang Pledo Budiman Sudjatmiko dkk dari Penjara Cipinang ke kantor Institut Sosial Jakarta. Dokumen atau Pledo itu sekitar 100 halaman dan Johnson menyerahkan kepada saya. Ia meminta saya untuk mengetiknya ulang di komputer. Sebab dokumen yang ditulis oleh Budiman dkk di penjara Cipinang itu ditulis menggunakan mesin tik dan hasilnya kurang rapi. Dokumen yang diketik ulang tersebut harus selesai keesokan pagi. Sebab pada hari minggu, berkas itu mesti segera dibawa kembali ke penjara Cipinang untuk mereka tandatangani sehingga pada lusa atau hari Senin Pledo itu bisa dibacakan di pengadilan Jakarta Pusat.

Proses pengetikan kembali itu kalau tidak salah dilakukan oleh saya, Mas Karyo dan mendiang Ivonne Therik. Ada juga orang lain yang membantu, namun jumlahnya tidak lebih dari 6 atau 7 orang.

Kami tahu bahwa waktu itu komputer tidak secanggih jaman sekarang. Dulu kami masih menggunakan program Word Star (WS), dan

dokumennya masih disimpan di dalam disket. Tidak seperti sekarang yang penyimpanannya menggunakan *flashdisk* atau *external hardisk*.

Proses pengetikan itu selesai sekitar jam 10 pagi, sementara proses pencetakan atau print juga tak kalah lamanya karena masih menggunakan pita. Sebelum dokumen tersebut dicetak, saya masih ingat komentar Bung Hilmar Farid yang pada waktu itu kebetulan hadir juga. Ia bilang bahwa “seharusnya kita memperbaiki narasi yang ada dalam Pledo ini”. “Tapi karena tidak ada waktu lagi, lebih baik print,” saja begitu ia bilang.

Dan akhirnya kami pun berhasil mencetaknya juga. Kemudian, bersama-sama dengan Johnson kami berangkat ke Penjara Cipinang dan menyerahkan Pleido tersebut kepada Budiman dkk untuk menandatanganinya. Usai ditanda tangani Budiman dkk, dokumen tersebut dikembalikan kepada Johnson untuk dijilid beberapa eksemplar agar bisa dibacakan di pengadilan Jakarta Pusat pada keesokan harinya. Sebab waktu itu, yang disidangkan bukan hanya Budiman saja. Namun, ada beberapa anggota PRD lainnya yang menjalani sidang dengan di ruang sidang yang berbeda.

Kedua, Rumah Di jalan Bunga Matraman, Jakarta Timur

Rumah ini dipakai untuk Sekretariat Komite Solidaritas Untuk Marsinah (KSUM). Komite ini didirikan oleh 10 LSM untuk mengadakan investigasi dan advokasi untuk kematian Marsinah, seorang buruh perempuan yang dibunuh ketika sedang mengadakan aksi untuk menuntut kesejahteraan buruh di Sidoarjo Jawa Timur pada Mei 1993. Kematian Marsinah adalah simbol perlawanan buruh. Pada tanggal 10 November 2025 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, menetapkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional dalam perjuangan buruh di Indonesia.

Waktu itu Johnson dipercaya sebagai koordinator KSUM yang mula-mula sekretariatnya di kantor Institut Sosial Jakarta di Jalan Haji Yahya No. 14 dan akhirnya dipindahkan ke jalan Bunga Matraman. Namun tulisan ini tidak akan mendalam tentang KSUM, tetapi tentang kaitannya dengan pemuda Timor-Timur (kini Timor-Leste) yang waktu itu mengadakan aksi suaka politik di berbagai kedutaan besar di Jakarta. Karena rumah yang terletak di jalan Bunga itulah, saya dan teman-teman memutuskan untuk menggunakan rumah itu Johnson memarahi saya karena ternyata tagihan rekening teleponnya naik. Mungkin saja saat itu teman-teman menggunakan rumah itu untuk menelepon ke Dili, Portugal atau ke tempat lain.

Januari tahun 1996, setelah dua orang putri Maria Sarmento, dan mendiang Odilia Vitor lolos ke Kedutaan besar Australia di Kuningan Jakarta Selatan, kami sudah tidak lagi menggunakan rumah itu lagi.

Selain rumah di Jalan Bunga, kami juga mendapat beberapa tempat persinggahan seperti di Karawaci Tangerang, Bekasi, Tanjung Priok dan Susteran SPS di Sunter. Itu semua karena berkat romo Sandy dengan jaringannya membantu pemuda Timor-Timur untuk meminta suaka di beberapa kedutaan besar di Jakarta.

Ketiga, Xanana Gusmão Pindah dari Penjara Cipinang ke Rumah Tahanan Khusus di Salemba.

Ketika Presiden Dewan Perlawan Nasional/*Conselho Nacional Resistencia de Timorense* (CNRT) Xanana Gusmão keluar dari penjara Cipinang ke Rumah Tahanan khusus di Salemba. Saya bersama dengan pak Antonino Gonçalves, Antonio Dasiparu bersama Johnson Panjaitan dengan Pak Xanana mengendarai sebuah mobil merk Kijang berwarna biru tua menuju Rumah Tahanan Khusus yang berlokasi di belakang penjara Salemba, Jakarta Pusat. Di rumah tahanan khusus itulah Pak Xanana Gusmão bisa bebas. Ia bisa menerima tamu dari berbagai kalangan termasuk beberapa duta besar—yang masih ada dalam ingatan saya—adalah Duta Besar dari Brazil, Duta Besar untuk PBB di Indonesia, termasuk kunjungan Menteri Luar Negeri Australia Alexander John Gosse Downer. Dan juga tokoh pro kemerdekaan yang selama puluhan tahun tinggal di luar negeri seperti Presiden Timor Leste sekarang Jose Ramos Horta, Mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri, Joao Carrascalao, Jose Luis Guterres dan termasuk berbagai macam Gerakan Perlawan pro Kemerdekaan Timor-Leste.

Keempat, Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Madeleine Albright

Pada saat kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, mendiang Madeleine Albright ke Jakarta, ia mengatakan pertemuan dengan Presiden CNRT Xanana Gusmão di kantornya Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas. Dalam kunjungan itu, Johnson berperan sebagai pengacara yang mendampingi Xanana untuk bertemu secara pribadi dengan Madeleine di salah satu ruangan Menteri Luar Negeri Indonesia.

Tentu saja, kala itu saya bersama dengan Johnson, Antonino Gonçalvess dan Antonio Dasiparu. Prosedur keamanan saat itu sangat ketat dan tidak memperbolehkan kami untuk mengikuti Pak Xanana. Namun berkat Johnson, kami berhasil masuk bersama-sama dengan Pak Xanana kala itu.

Kelima, Bertemu Kelompok Pro Otonomi di Kantor Kehakiman Jakarta Selatan

Sebelum referendum pada tanggal 30 Agustus 1999, ada kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro otonomi yang sama-sama punya kepentingan untuk mempertahankan status Timor-Timur kala itu. Dari pihak otonomi, dipimpin oleh Domingos Koli dan Joao Tavares bersama dengan kelompoknya, mengadakan pertemuan dengan Pak Xanana di kantor Kehakiman di Jakarta Selatan. Di sini saya tidak akan menulis tentang agenda apa saja yang dibicarakan antara Pak Xanana dengan pihak otonomi. Tapi justru, memberi kesaksian tentang kejengkelan Johnson pada seorang intel yang menyerobot masuk ke mobil. Ketika Pak Xanana selesai mengadakan pertemuan dengan pihak otonomi, seorang intel tiba-tiba membuka pintu untuk Pak Xanana dan menyerobot masuk ke dalam mobil. Ia kemudian duduk di kursi yang sejajar dengan Pak Xanana di depan. Sementara itu, saya bertiga termasuk Johnson, justru duduk ditengah dan dibelakang jok mobil Pak Xanana dan intel tersebut. Ekspresi Johnson marah-marah karena intel tersebut tidak diketahui dan tiba-tiba ada di mobil dalam perjalanan kami kembali rumah tahanan khusus Pak Xanana di Salemba. Ketika sampai di rumah Salemba intel tersebut berbicara lama dengan pak Xanana dan kami tidak mengetahui apa yang dibicarakan mereka kala itu.

Menjelang kemerdekaan Timor-Leste sekitar awal tahun 2000-an di Dili, Johnson tidur di rumah di Fomento. Kala itu belum ada kasur, dan Jonson tidur hanya beralaskan selembar tikar di lantai. Selanjutnya Johnson datang beberapa kali ke Timor-Leste namun saya tidak pernah bertemu karena kedatangannya mungkin diundang oleh pemerintah Timor-Leste dan tentu saja bertemu dengan orang-orang penting termasuk Pak Xanana.

Berbicara tentang memoria Johnson Panjaitan tentu saja tidak akan ada habisnya. Namun kenangan tentang seorang Johnson Panjaitan bagi saya pribadi tidak akan pernah bisa dilupakan. Sebab apa yang telah ia lakukan selama hidupnya adalah untuk kepentingan masyarakat kecil yang selama ini ditindas oleh tangan-tangan kekuasaan. Cerita kecil ini hanyalah bagian dari ingatan saya tentang mendiang Johnson selama bersama-sama di Institut Sosial Jakarta, Tim Relawan Untuk Kemanusiaan dan selama berteman dengan orang-orang Timor Leste.

Berkaitan dengan perjuangan Timor Leste, dia menunggu Timor-Leste sebagai salah satu anggota ASEAN pada 26 Oktober 2025 di Malaysia. Dan pada hari itu juga dia pergi untuk selamanya. Mungkin dia menunggu momen ini agar selalu dikenang antara ASEAN-Timor Leste. Selamat jalan bang Johnson sampai bertemu di masa depan.

Dili, 11 November 2025

Helio Freitas

[1] Jumatan; kegiatan rutinitas atau pertemuan seminggu sekali yang ditetapkan pada hari jumat di kantor Institut Sosial Jakarta untuk mengadakan evaluasi aktivitas yang dilakukan selama seminggu.

Johnson Panjaitan, Keberanian dan Semangat Perjuangan

Islah



Sumber foto : dokumen internal

Saya mengenal Bang Johnson di tahun dua ribuan. Saat itu saya masih di Kontras dan seringkali ke PBHI untuk rapat dan berdiskusi membahas isu-isu HAM dan demokrasi, khususnya di Papua. Untuk isu Papua, Bang Johnson concern sekali, bahkan sampai ada ungkapan bahwa beliau “lebih Papua dari orang Papua”.

Sejak saya di Walhi (2008) beberapa kali Bang Johnson datang ke Sekretariat Walhi di Mampang. Bang Johnson yang pernah menjadi Dewan Nasional Walhi (2000-2003), komitmennya masih sangat kuat dalam membela hak rakyat atas sumber sumber kehidupannya. “Gua siap membantu kapanpun kalau dibutuhkan Walhi,” ucapnya.

Bang Johnson yang kami kenal memang bukan aktivis “kaleng-kaleng”. Ia tidak ragu untuk turun ke pelosok dalam membela hak rakyat. Suatu kali di tahun 2011 setelah turun ke masyarakat Kolo Bawah Kecamatan Mamosalato, Morowali, Sulawesi Tengah, Bang Johnson berkata, “Gila di pelosok rakyat aksi dihadapi dengan senjata, gua ke lokasi saja ditodong”.

Untuk mendapatkan konteks dari cerita ini saya menelepon dua kawan, Ahmad yang saat itu di Walhi Sulteng dan Etal (Jatam Sulteng) yang bersama beliau kelapangan pada akhir Agustus 2011.

“Sebelumnya sangat mudah bagi masyarakat Kolo Bawah mencari ikan. saat air di Reef Tiaka surut, masyarakat tinggal angkat ikan. Tapi kemudian masyarakat Kolo Bawah kehilangan tempat mencari ikan. Reef Tiaka di reklamasi dijadikan lokasi pengeboran lepas pantai Tiaka. Sejak saat itu masyarakat menjadi miskin. Saat masyarakat menagih janji-janji perusahaan dengan aksi massa ke lokasi pengeboran, masyarakat dihadapkan dengan senjata: dua orang tewas dan lainnya luka. Setelah Peristiwa itu belasan masyarakat ditangkap dan diintimidasi. Akibatnya, masyarakat ketakutan tidak lagi berani menyuarakan haknya.

Bang Johnson turun sampai kampung Kolo Bawah memberi semangat dan kemudian bersama masyarakat berangkat ke reef Tiaka dengan perahu, saat mendekati lokasi pengeboran lepas pantai beberapa orang aparat menodongkan senjata dan berteriak, “Jangan mendekat atau ditembak”. Tapi perahu terus mendekat dan Johnson berdiri sambil berkata “Lu hati-hati ya! Dari cara lu pegang senjata gua sudah tahu. Gua pengajar di sekolah perwira, yang kalian mau tembak ini anak bangsa,” teriak Johnson sambil menunjuk-nunjuk di atas kepala. “Lo dari mana,” tanya Johnson, “Oh dari Aceh, gua ini pengacara rakyat Aceh,” tegas Johnson. Masih menurut Etal, dengan kehadiran dan keberanian Bang Johnson akhirnya semangat masyarakat muncul kembali.”

Perjumpaan terakhir saya dengan bang Johnson saat beliau berkunjung ke Walhi di tahun 2021. Saat itu saya dan Boy diminta (alm) mbak Yaya untuk ikut menerima kunjungan silaturahminya. Bang Johnson -didampingi Coco dan Pras- jalan tertatih keruangan pertemuan dengan mengenakan sebelah tongkat. Tapi saat bicara, semangat dan suaranya masih sama. Kami berdiskusi tentang kasus pengrusakan lingkungan oleh korporasi, kasus lama yang belum terungkap dan yang masih harus ditindaklanjuti. Sebelum pulang ia berpesan agar Walhi jangan pernah meninggalkan advokasi, karena itu yang dibutuhkan rakyat dan negeri ini.

Selamat jalan Bang Johnson! Salut untuk keberanian dan semangatnya, perjuanganmu untuk HAM dan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak sia-sia.

Bukan Hanya di Arena Litigasi, Tapi Juga “Singa” di Penelitian

Ismail Hasani

Saya mengenal Johnson Panjaitan sejak tahun 2000, saat saya mulai mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).

Sejak masih mahasiswa, saya sempat berinteraksi dengan beliau sebagai salah satu sosok pembela hak asasi manusia (*Human Rights Defenders*), yang secara bersamaan juga berprofesi sebagai Advokat HAM. Dengan pengalaman tersebut, saya terkesan dengan keberpihakan ideologi hak asasi manusia sebagai basis pembelaan terhadap mereka yang terpinggirkan.



Sumber foto : disway.id

Sejak saat itu, di tahun 2001, kemudian saya tertarik untuk bergabung dengan mengikuti pelatihan hak asasi manusia, di mana Johnson Panjaitan yang saat itu sebagai Sekjen PBHI menjadi salah satu mentor kami dalam proses pelatihan. Dalam ingatan saya beliau sangat dedikatif, heroik dan mempraktikkan apa-apa yang diajarkan kepada kami. Itu memupuk semangat dan keinginan kami untuk menjadi pembela HAM.

Pada akhirnya, setelah pelatihan saya memutuskan untuk melanjutkan proses rekrutmen dan kemudian bergabung bersama PBHI. Hingga hari ini didapuk menjadi Ketua Majelis Anggota Nasional.

Saya terkejut ketika Bang Johnson dikabarkan meninggal dunia; meninggalkan kita semua. Sekalipun dalam satu-dua tahun terakhir memang interaksi saya sangat terbatas karena kondisi kesehatan beliau. Tetapi saya terus mengikuti langkah dedikatif Bang Johnson yang sekalipun dalam kondisi kesehatan yang sudah mulai tampak terganggu terus-menerus melakukan pembelaan hak asasi manusia, sekalipun dalam konteks yang agak sedikit berbeda.

Apa yang dimaksud dengan konteks yang berbeda? Bang Johnson setelah selesai dari PBHI kemudian menekuni profesi sebagai advokat, tetapi sebagaimana yang kita lihat bersama, pembelaannya tetap memusat pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan, kelompok buruh yang ditindas, kelompok aktivis, mahasiswa atau tokoh kritis yang melawan rezim. Di situlah Bang Johnson terus selalu hadir.

Betapapun terdapat sejumlah catatan terhadap Johnson Panjaitan, bagi saya dedikasinya terhadap pemajuan hak asasi manusia termasuk menjadi salah satu yang prominen. Terobosan-terobosan litigasi strategis yang diperankan oleh PBHI di bawah komando Bang Johnson, sekalipun beliau posisi sebagai Sekretaris Jenderal, pembelaan-pembelaan di meja pengadilan. Dari peradilan-peradilan Timor-Timur, Aceh, Ambon, Poso, Bang Johnson selalu hadir. Di situlah perubahan-perubahan hukum dicipta, perubahan-perubahan pranata dicetak, dan infiltrasi pemikiran berparadigma HAM pada para aparat penegak hukum dilakukan oleh Bang Johnson dan tim advokasi PBHI.

Dalam perspektif yang agak berbeda, interaksi saya sebagai peneliti di PBHI, sekalipun saya melakukan pembelaan tidak melalui ruang-ruang sidang, pemikiran yang tertuang dalam banyak diskusi Bang Johnson selalu menjadi landasan pijak perumusan riset-riset PBHI yang tetap bertolak pada paradigma HAM, keberpihakan pada yang terpinggirkan. Semuanya dituangkan dalam bentuk riset aksi. Keseluruhananya menjadi titik tolaknya maupun kemudian pemanfaatan hasil-hasil riset PBHI semata-mata ditujukan untuk melakukan pembelaan. Sehingga apa yang divisi riset lakukan, waktu itu bersama Bang Damianus Taufan dan juga Ferry Machsus, kami bertiga menerjemahkan pikiran-pikiran *legal action* dari teman-teman di tim advokasi sebagai dasar intervensi yang lebih sistemik dalam bentuk program-program PBHI.

Dari situlah saya menyimpulkan bahwa gerak PBHI menemukan titik keseimbangan yang kokoh. Di satu sisi, dia menjalankan *strategic litigation* yang kuat, tapi di sisi lain juga semua proses direkam menjadi pengetahuan dan kemudian didiseminaskan menjadi energi gerakan bagi generasi-generasi PBHI dan juga generasi-generasi pembela HAM dan pemberi bantuan hukum berikutnya.

Oleh karenanya, bagi saya, Johnson Panjaitan menjadi salah satu penanda dari elan pembelaan PBHI dalam konteks litigasi. Peran Johnson juga tentu saja memberi warna bagi praktik pembelaan hak asasi manusia di ruang-ruang peradilan, di ruang-ruang pengadilan, di dalam proses peradilan di mana perkara yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke jalur peradilan. Di tangan Bang Johnson dan tim PBHI kemudian menjadi *justiciable*. Ada proses dan hasil dari upaya panjang hingga akhirnya para korban memeroleh hak untuk tahu atau *right to know*, *right to justice* dan juga *right to reparation* atau *remedy*. Ketiganya dicetak melalui aksi-aksi legal, aksi-aksi litigasi strategis yang dimainkan oleh PBHI dan diketuai oleh Bang Johnson.

Di etape yang berbeda, saya juga membantu apa yang disebut dengan Tapak Ambon, tim pembela advokasi kasus Ambon, di mana Bang Johnson menjadi salah satu pionir. Saat itu, saya meyakini bahwa separatisme yang selalu menjadi dalil represi negara di masa itu, kita sebut sebagai sebuah mitos, karena sesungguhnya apa yang diperjuangkan oleh teman-teman Ambon adalah hak atas keadilan sebagai konsekuensi berhimpunnya masyarakat dalam satu organisasi yang disebut dengan negara. Oleh karenanya, basis pembelaan PBHI yang tergabung di dalam Tapak Ambon di mana Bang Johnson dan Bang Hendardi bergabung juga, kita meletakkannya atau mendasarkan pada esensi aspirasi warga Ambon yang ditujukan untuk memperoleh keadilan.

Aspirasi keadilan yang menjadi dasar pergerakan baik di Aceh maupun Papua adalah sama. Karena itu PBHI di masa Bang Johnson, baik itu ketika Bang Johnson menjadi Sekjen lalu menjadi Ketua setelah Pak Hendardi berhenti, juga menghimpun dukungan bagi Aceh dan Papua dalam Sahabat Aceh, Sahabat Papua, yang semuanya PBHI hadir mendampingi teman-teman pegiat hak asasi manusia di sana; kelompok masyarakat korban represi negara.

Terakhir, saya ditunjuk menjadi panitia Kongres di tahun 2003 diselenggarakan di Makassar. Di situlah saya pertama kali mengikuti Kongres PBHI sekaligus juga untuk terakhir pula saya bergabung dengan PBHI. Setelah Bang Johnson menjadi ketua, saya kemudian perlu belajar ke tempat yang berbeda, akhirnya saya berhenti saat itu dari PBHI sebagai

fungsionaris, tetapi tetap menjadi bagian tak terpisahkan sebagai anggota Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebuah organisasi yang berada di garda depan melakukan pembelaan-pembelaan nyata, baik itu di ruang sidang maupun di ruang publik, yang saat itu masih sangat berjuang karena ketersediaan akses informasi.

Perpisahan saya dengan PBHI saat Bang Johnson menjadi ketua kemudian terus memupuk kebersamaan saya. Sekalipun secara organisasi saya tidak menjadi fungsionaris atau pengurus PBHI, tetapi kebersamaan itu terus berlanjut. Bahkan, pada akhirnya, saya kembali lagi ke PBHI di tahun 2017 untuk menjadi Ketua Majelis Anggota Nasional, dan untuk kedua kalinya di tahun 2020-2021 saya kembali ditunjuk menjadi, atau dipilih, disepakati menjadi Ketua Majelis Anggota Nasional PBHI.

Perjalannya menjadi bagian yang sangat dedikatif dan inspiratif untuk saya dari mengenal Bang Johnson sekalipun dengan berbagai macam dinamika. Bang Johnson adalah teladan advokat, teladan pembela HAM, yang bahkan saat dirinya tidak lagi menjabat sebagai Ketua PBHI, terus melakukan pembelaan sampai pada akhirnya mengunci komunikasi yang terbatas hanya dengan orang-orang tertentu. Ini adalah bagian dari risiko yang Bang Johnson pilih, yang Bang Johnson peroleh dari pilihan-pilihan politik gerakan dan politik hak asasi manusia.

Beristirahatlah dalam damai, Bang Johnson! Pembelajaran dan pengalaman interaksi kami dengan Bang Johnson akan menjadi salah satu catatan sejarah Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga sejarah perjuangan politik pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Semoga Tuhan memberkati."

Ismail Hasani, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute.

Berawal dari Advokasi Becak: Perjuangan Bersama Johnson Panjaitan

Laurent Mayasari



Sumber foto : disway.id

Cerita ini sederhana, tapi menyimpan jejak panjang perjuangan seorang manusia bernama Johnson Panjaitan. Semuanya berawal dari becak sepotong—kisah kecil yang menjadi saksi lahirnya semangat besar. Dari situ, langkah-langkahnya menapaki jalan advokasi, hingga pada tahun 1992 ia menjadi koordinator perjuangan untuk UU Lalu Lintas.

Tahun 2023, saya dan suami mencari Bang Johnson. Entah mengapa, ada dorongan yang kuat untuk bertemu. Bukan urusan pekerjaan, bukan urusan dunia—hanya sebuah panggilan batin. Saya mencoba menghubungi lewat nomor yang diberikan, tapi harus melalui asistennya. Mungkin begitulah hidup ketika seseorang telah menjadi sosok penting; setiap pertemuan harus melewati lapisan-lapisan waktu dan jarak. Hingga seorang kawan dari Raja Ampat berkata akan membantu kami bertemu di rumahnya, di Taman Mini. Namun, saya menunda—and terlambat.

Sejak 1992, saya mengenal Bang Johnson bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai guru kehidupan. Ia tidak pernah mengajarkan keberanian lewat kata-kata, tapi melalui peristiwa. Ia menempatkan kami dalam situasi yang membuat lutut bergetar—berhadapan dengan polisi, tentara, bahkan

maut. Tapi di balik setiap rasa takut, ia menanamkan keyakinan: keberanian tidak lahir dari keras kepala, melainkan dari cinta pada kebenaran.

Saya masih mengingat peringatan satu tahun Marsinah di Porong, Sidoarjo. Kami tinggal di rumah-rumah buruh, menyatu dengan kesedihan dan harapan mereka. Dari sana, langkah kami berlanjut ke Papua—tanah yang menguji arti kemanusiaan. Dalam sidang Pengadilan HAM di Makassar, kami berdiri di depan Brimob, menahan gemetar. Dalam evakuasi mahasiswa di Jayapura, kami berhadapan langsung dengan aparat. Semua dalam suasana mencekam, namun di sanalah jiwa kami ditempa.

Dan di Wasior, kami tidak hanya membela korban—kami juga menguburkan mereka. Tubuh-tubuh yang dimutilasi dan ditinggalkan di hutan menjadi saksi bisu bahwa perjuangan tak selalu berakhir dengan kemenangan, tapi seringkali dengan air mata dan doa.

Kini, setelah semua berlalu, saya sadar: pertemuan yang tertunda bukanlah akhir. Mungkin memang begitu caranya semesta mengajarkan kenangan—bahwa beberapa orang hadir untuk mengubah arah hidup kita, lalu pergi membawa sebagian dari keberanian yang mereka tanamkan di hati.

Bang Johnson telah menjadi bagian dari perjalanan itu. Dari becak sepotong hingga jejak di hutan Papua. Ia meninggalkan pelajaran yang takkan pernah selesai dibaca: bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang berani berpihak pada manusia.

Laurent Mayasari, *mantan Koordinator Divisi Daerah Konflik BPN PBHI*

Menjaga Warisan Johnson Panjaitan

Dr. Nasiruddin Pasigai, S.H. M.H.

Saya kenal dan akrab dengan almarhum Johnson Panjaitan sewaktu masih bersama-sama menjadi pengabdi bantuan hukum di bawah naungan (wadah) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Kebersamaan itu berlanjut karena adanya kesamaan selera dan komitmen dalam menggeluti organisasi bantuan hukum dari waktu ke waktu.



Sumber foto : rmol.id

Sekitar tahun 1997, sejumlah tokoh di YLBHI yang dipelopori oleh Drs. Mulyana W Kusumah, Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H.,L.L.M., Hendardi, saya, Johnson Panjaitan serta berapa tokoh lainnya hijrah dari YLBHI sebagai respons dan solusi terhadap dinamika internal kepengurusan di YLBHI yang cenderung stagnan pada masa itu. Selanjutnya, kami bergabung dalam Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) yang telah didirikan sebelumnya oleh para tokoh aktivis YLBHI tersebut tersebut.

Peristiwa berikutnya, saya dengan JP menjalani takdir yang sama pada saat musyawarah nasional (MUNAS) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang diselenggarakan di Makassar sekitar tahun 2015. Pada saat itu, terjadi kebuntuan (*deadlock*) dan perpecahan dalam pemilihan Ketua Umum PERADI karena sejumlah pihak termasuk beberapa oknum panitia diduga keras telah melakukan kecurangan. Kemudian saya dengan JP hijrah

dan bergabung dalam PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) yang dimotori serta didirikan oleh sejumlah kader YLBHI, di antaranya Bang Luhut dan kawan-kawan.

Sebenarnya saya dengan almarhum JP memiliki domisili yang berjauhan. Saya di Makassar dan JP di Jakarta tetapi tidak menjadi halangan untuk menjalin interaksi dan semakin intens pada saat ada event-event nasional yang diselenggarakan oleh organisasi. Hubungan yang sangat akrab menyebabkan perkenalan semakin mendalam, tidak hanya sebatas mengetahui identitas masing-masing tetapi lebih jauh dari itu memahami pula karakter, kepribadian, integritas, konsistensi dan wawasan keilmuan almarhum.

Dari pergulatan yang panjang dalam memperjuangkan penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi telah mengasah komitmen sosial almarhum yang diekspresikan melalui sikapnya yang tegas dan responsif terhadap dinamika dan perkembangan politik, demokrasi, hukum dan HAM di tanah air. Sikap yang demikian, tidak pernah berubah dari almarhum dari awal perjalanan karirnya sampai beliau wafat pada 26 Oktober 2025.

Pertemuan saya dengan JP dalam berbagai forum skala nasional dan terakhir pada Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PERADI RBA yang diselenggarakan di Pulau Batam pada September 2023, beliau masih terlihat sehat dan mengikuti pertemuan sampai selesai. Bahkan, beliau menjadi salah seorang narasumber di mana substansi pemaparannya lebih banyak mengulas mengenai anatomi situasi politik nasional, demokrasi dan penegakan hukum yang dianggap belum dapat mengatasi secara optimal berbagai kepincangan sosial dan ketidakadilan. Oleh karena itu, beliau menegaskan pentingnya kebijakan publik dan hukum di masa depan lebih populistik atau melindungi rakyat agar semangat reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 tidak mengalami kemerosotan.

Pada akhir ceramahnya, beliau menyisipkan pesan kepada para peserta Rakernas mengenai keberanian moral dan kerja profesional dikedepankan agar peran organisasi sebagai penegak hukum semakin terasa keberadaannya di tengah masyarakat. Berbagai persoalan yang diungkapkan oleh JP tidak jauh berbeda ketika tampil sebagai narasumber dari berbagai stasiun televisi maupun ulasan-ulasan pemberitaan media cetak.

Dalam konteks itu, JP menjadi penegak hukum yang langka dan disegani di tanah air. Lebih jauh dari itu, yang bersangkutan tidak pernah menggadaikan harkat dan martabat profesinya untuk mendapatkan keuntungan politik dan materi secara ilegal. Kesan yang paling mendalam terhadap JP sewaktu bersama-sama bergabung sebagai kuasa hukum dalam

penanganan kasus korupsi mantan Wali Kota Makassar Dr. Ir. Ilham Arief Sirajuddin, M.M., yang penyidikannya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015.

Pada awal rapat koordinasi tim, beliau menegaskan bahwa pada prinsipnya kejahatan korupsi tidak boleh ditoleransi bahkan harus dijadikan musuh bersama karena dampaknya menggoyahkan seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, beliau menekankan bahwa kita tidak akan membela dugaan kejahatan yang dilakukan klien (Pak Ilham) tetapi kewajiban etik profesi perlu ditegakkan yaitu melakukan koreksi dan meluruskan berbagai penyimpangan yang dituduhkan kepada klien agar kebenaran bisa terungkap. Salah satu koreksi dimaksud adalah upaya praperadilan agar transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus dari KPK bisa diwujudkan bersama-sama. Alhamdulillah, pada saat itu praperadilan melawan KPK yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikabulkan oleh Hakim Praperadilan dan dinyatakan status Tersangka dari Pak Ilham dicabut atau tidak sah.



Foto: Sidang Praperadilan bersama JP di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Terus terang, bahwa kepergian JP meninggalkan warisan yang sangat berharga yaitu gagasan, perjuangan, serta keteladanan yang harus tetap dijaga dan diteruskan oleh teman seperjuangan maupun generasi aktivis bantuan hukum di masa datang. Setidaknya, kita terus berjuang dengan prinsip-prinsip yang sama, keteladanan yang sama serta keberanian yang sama dengan almarhum agar keadilan substantif semakin kokoh di negeri yang kita cintai.

Johnson Panjaitan, Pejuang HAM & Inspirator

Nasrul Saftiar Dongoran



Foto: Johnson Panjaitan kedua dari kiri dalam persidangan.

Johnson Panjaitan yang aktivis HAM dan pengacara terkenal itu yang gigih membela kemanusiaan. Begitulah kalimat yang dapat menggambarkan sosok, ketika mendengar namanya.

Pada 2014, saya Nasrul Saftiar Dongoran memilih magang di Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI) wilayah Jakarta. Pilihan untuk belajar melalui magang di PBHI ini karena salah satunya nama Johnson Panjaitan yang aktivis HAM dan pengacara terkenal. Ia gigih membela kemanusiaan melalui PBHI. Adapun Bang Johnson Panjaitan seorang pejuang HAM dan inspirator merupakan sosok advokat yang saya kagumi dan berkeyakinan jika melakukan pengabdian dan belajar advokasi di PBHI, kelak saya akan bisa mengikuti jejak dan ilmunya.

Saya serius membaca dan menonton video di Youtube untuk melihat setiap ucapan, mimik dan gaya bicara Johnson Panjaitan yang meledak-ledak namun penuh tawa. Hehe.

Awalnya saya di PBHI Jakarta tidak begitu banyak mendapat pelatihan ataupun peningkatan kapasitas sebagai anggota PBHI. Namun relasi PBHI

dengan jaringan dan organisasi NGO membawa saya untuk bisa menimba ilmu dan pengalaman di lembaga mitra seperti LBH Jakarta, YLBHI, LBH Apik dan lembaga lainnya.

Hingga saat kita berkenalan dengan jaringan lembaga lain saat pertemuan, sosok Johnson Panjaitan yang selalu ditanyakan apa masih di PBHI. Jadi lembaga itu dikenang karena sosok anggota PBHI yang hebat dan gigih dalam melakukan kerja-kerja bantuan hukum dan pembelaan HAM.

Pada 2017, saat advokasi PBHI Jakarta yang berkolaborasi dengan Johnson Panjaitan mendampingi warga Teluk Jambe Karawang dalam kasus konflik agraria dengan membentuk Tim Advokasi Petani Karawang (TAMPAR).

Kesempatan emas itu pun datang, saya mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu langsung dari mata air yakni mentor dan mahaguru Bang Johnson Panjaitan saat menjadi pengacara publik di PBHI Jakarta dalam Tim Advokasi Petani Karawang (TAMPAR).

Kesempatan itu datang saat Tim Advokasi bersama Bang Johnson Panjaitan mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri. Pada waktu itu, saya masih yang paling bocah cilik (bocil) atau masih paling junior di antara tim yang lainnya. Justru posisi paling junior ini membawa saya untuk lebih dekat mengenal sosok Bang Johnson dalam setiap proses persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada setiap proses penyusunan gugatan, replik, daftar alat bukti surat pemohon, hingga diskusi dengan saksi dan ahli selalu dekat dengan Bang Johnson karena posisi saya bertugas sebagai tim ketik semua catatan diskusi dan drafting dokumen. Harap maklum posisi yang junior ini kebagian tim mengetik setiap ucapan dalil-dalil hukum yang disampaikan Bang Johnson. Justru posisi mengetik inilah yang menjadi kesempatan emas untuk saya mengetahui logika berpikir, cara penyusunan dalil yang memiliki perspektif HAM dan cara membuat konklusi sebuah dalil langsung dari Bang Johnson.

Dalam setiap proses pengetikan pasti diselingi dengan ucapan yang tegas dan suara gelegar dan penuh riang tawa yang menjadi khas Bang Johnson. Hal yang paling saya ingat bersama Bang Johnson, saat beliau sangat penuh semangat berapi-api menceritakan kisahnya di PBHI mulai advokasi di daerah konflik seperti Timor-Leste, Kalimantan, Aceh, Ambon dan daerah lainnya. Saat itu Bang Johnson menceritakan tempat paling aman untuk berlindung dari kejaran militer zaman Orde Baru dengan bantuan tokoh-tokoh agama yang menyediakan tempat berlindung sebagai safe house dan berbaur dengan masyarakat di akar rumput.

Saya melihat dari setiap matanya, ekspresi hingga hembusan nafasnya yang menunjukkan betapa Bang Johnson Panjaitan sangat cinta terhadap PBHI. Ekspresi bahagia, senang, marah, kesal dan tertawa bercampur aduk menceritakan bagaimana aktivitasnya di PBHI. Bahkan, jika Bang Johnson menceritakan perjalanan advokasi PBHI dan ilmu advokasi dalam litigasi dan nonlitigasi bisa menghabiskan waktu berjam-jam.

Bang Johnson itu selalu memberikan *best practice* dan teknik dalam litigasi dengan kalimat yang sederhana kepada kami. Semua ilmu dan pengalaman baik yang diajarkan oleh Bang Johnson Panjaitan ini menjadi alasan kenapa saya menganggapnya sebagai mentor dan mahaguru. Walaupun saya tidak tahu, apakah Bang Johnson itu pernah menganggap saya sebagai murid atau kader, itu persoalan lain hehe. Tapi yang pasti saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bang Johnson Panjaitan atas ilmu dan pengalaman advokasi dan litigasinya yang sangat berharga buat diri saya untuk selamanya.

Sosok Bang Johnson Panjaitan ini menjawai HAM dalam kesehariannya dan berinteraksi dalam tim. Bila sedang waktu ibadah salat, Bang Johnson mengingatkan saya untuk salat terlebih dahulu. Bahkan jika memilih makanan selalu mengingatkan untuk rekan saya yang bernama Pendi agar tidak mengusulkan makanan Lapo, haha. Karena ada teman-teman lainnya seperti saya yang tidak memakan olahan Saksang. Pasti pilihannya itu tempat makan yang semua teman-teman bisa makan dan berkumpul bersama seperti rumah makan Padang. Bang Johnson sependek kebersamaan kami itu menghormati hak orang lain, toleransi yang tinggi dan menghargai pendapat orang lain bahkan dari saya yang paling junior dalam tim. Sosok Johnson Panjaitan sebagai pengacara terkenal dan aktivis HAM yang malang melintang dalam advokasi tetap membuatnya rendah hati dan sederhana.

Kolaborasi hebat tim advokasi TAMPAR berubah manis saat putusan Praperadilan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan kami. Sontak kami merasa senang bisa bekerjasama dalam advokasi, namun itu juga menjadi akhir pertemuan saya dengan Bang Johnson. Pada waktu itu, salah satu tim Bang Johnson mengajak untuk bergabung dengan timnya untuk berkantor di Karawang. Namun saya memilih untuk melanjutkan perjalanan dan pengalaman advokasi hingga bergabung pada tahun 2018 dengan PBHI Nasional.

Pada tahun 2018, saya melanjutkan perjalanan dengan berpindah tempat dari kantor PBHI. Akhirnya pada tahun 2020, saya mendirikan NET Attorney sebuah kantor hukum yang juga memiliki visi-misi dalam pembelaan HAM. Ilmu dan pengalaman yang dari Bang Johnson Panjaitan

membuat saya memiliki kemampuan litigasi yang baik hingga bermanfaat dalam pembelaan kasus-kasus pelanggaran HAM seperti gugatan *class action* warga Sukoharjo melawan pencemaran lingkungan, pembelaan puluhan kasus buruh yang dipecat sepihak, perempuan korban KDRT, pendampingan mahasiswa dan warga yang dikriminalisasi serta kasus lainnya.

Perpindahan ini bukan perpisahan dengan PBHI, karena di PBHI itu tidak mengenal alumni seperti lembaga lain. Kita hanya melanjutkan perjalanan dengan cara masing-masing.

Pada 26 Oktober 2025, terdengar langit keadilan menangis. Berita duka cita meninggalnya Bang Johnson Panjaitan. Selamat jalan Bang Johnson Panjaitan. Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa membela HAM adalah membela kemanusiaan itu sendiri. Warisanmu abadi dalam setiap upaya kami menuntut keadilan.

Nasrul Dongoran, NET Attorney.

Johnson Kawan Seiring, sang Gladiator

Paskah Irianto



Sumber foto : dokumen internal

Abaikan saja bicara waktu. Karena ini bukan sekadar kronologi tapi tentang kenangan indah bersamamu, sahabat!

Ya, kami selalu bergelut soal kasus yang silih berganti sehingga tak terhindarkan mempersoalkan rumus 5W+1H. Namun tulisan ini berupaya menghindari kekakuan dan berusaha menghadirkan keakraban saat membacanya.

Karena sering ke Jakarta untuk demonstrasi membawa petani yang tanahnya tergusur, tak pelak aku pun suka mampir ke YLBHI sekadar sowan ke para senior: Hendardi dan Mulyana W Kusuma. Dari situ-lah aku tahu nama Johnson Panjaitan, *lawyer* muda yang bertubuh tegap, perlente, kalau ngomong berapi-api, membela kaum tertindas dan diakhiri dengan ucapan: “Memang anjing pemerintah ini!”

Karena *handphone* (HP) belum ada maka kita selalu mencatat nomor telepon rumah atau alamat tinggal. Tak aneh kalau setiap orang membuka buku saku untuk catatan orang baru yang dikenalnya.

Disamping mengabdi di LBH Jakarta, Johnson juga bekerja di Institut Sosial Jakarta (ISJ). Karena hatiku tertarik dengan kepeduliannya pada rakyat kecil atau aku yang terprovokasi dengan gaya bicaranya, aku pun sering ke ISJ di daerah Cawang, Jakarta Timur.

Dari ISJ pula aku mulai mengenal Romo Sandyawan, pemimpin ISJ. Sejujurnya, aku ingin bilang dua figur ini seperti air dan api, Romo Sandyawan yang kalem dan tenang, sementara Johnson yang terkesan beringas: kok bisa bekerja bareng?! Namun Johnson adalah teman, yang menurut saya, enak diajak ngobrol, semangat melawannya begitu luar biasa. Seperti enggak ada takutnya. Saya tidak tahu faktor apa yang membuat dia berbeda dari para pejuang lainnya. Pokoke gayanya asyik, bak algojo dech yang tak ada takutnya.

Pada saat pendirian PBHI itu-lah, saya me-listing siapa saja yang harus diajak untuk membangun satu organisasi perlawanan waktu itu. Tentulah aku bujur dan aku gaet Johnson dan Romo Sandyawan, di antaranya.

Alhamdulillah, perjalanan kongres pertama PBHI berjalan dengan cepat, mulus, apalagi di saat itu ‘kan untuk bertemu lebih dari lima orang saja kita sudah dibubarin. Kongres pertama adalah pembentukan organisasi dan memilih pemimpinnya, semua yang hadir adalah para pendiri. Saya lupa juga jumlahnya. Kayaknya saya harus buka lagi file-nya. Bentuk organisasi yang kami sepakati adalah perhimpunan yang notabene organisasi massa. Secara aklamasi Hendardi disepakati menjadi ketua PBHI yang pertama.

Bagi kami, perhimpunan ini membuka dirinya kepada banyak orang untuk terlibat di dalamnya, kalau yayasan itu dianggap punya segelintir orang dan tertutup.

Dalam perjalannya setelah kongres usai, mulai dipikirkan nama organisasinya. Saat itu aku usulkan kepada ketua, sebaiknya ada kata **BANTUAN HUKUM** dengan alasan: (1) bantuan hukum dianggap lebih konkret dan dibutuhkan rakyat yang sedang tertindas (2) Dalam konteks membangun demokrasi justru hukum menjadi syarat utamanya.

Akhirnya muncullah nama, PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA. Selanjutnya aku usulkan singkatannya jangan panjang-panjang sebab sulit orang mengingatnya.

Perhimpunan = P

Bantuan Hukum = B

Hak Asasi Manusia = H
Indonesia = I

Begitulah sedikit cerita nama PBHI. Sementara lambang PBHI diserahkan kepada kawan ITB angkatan '82 dan hasilnya seperti yang kita ketahui bersama hingga kini: Burung merpati keluar dari sangkarnya dengan cara merusak sangkar besinya.

Dalam struktur organisasi, saya meminta ketua untuk memasukkan nama Johnson S Panjaitan ke dalam kepengurusan. Jadi-lah Johnson menjadi wakil ketua bidang hukum, yang diketuai oleh Sugeng Teguh Santoso.

Sekretariat waktu itu belum punya. Duit untuk *ngontrak sekre* juga belum ada. *Funding agency* belum ditemukan. Alhamdulillah, Allah mempermudah niat baik kami. Lewat Permadi, SH (salah satu pendiri PBHI) kami memeroleh sekretariat gratis. Strategis lokasinya walaupun berhimpitan dengan Impression yaitu ruko 4 lantai di Jl. Cikini Raya.

Aku dan almarhum Permadi menemui pemiliknya, Freddi SH yang punya sejarah pahit di mana izin praktik profesinya sebagai advokat dicabut semena-mena di era Soeharto. Dia menganggap masalah kami hampir sama dengan masalahnya, sehingga Freddy simpati dengan gerakan PBHI yang *human rights oriented*.

Sebagai tim *lawyer* di PBHI, bersama Johnson memulai hitung-hitungan, kira-kira persoalan apa yang terbaik buat PBHI yang baru lahir ini. Ya, salah satunya adalah menangani kasus Timor Timur yang sangat tertutup dan menakutkan bagi bangsa ini. Sementara PBHI membaca Xanana Gusmao - tokoh Timor Timur sebagai WNI yang ditahan tanpa alasan kuat sebagai bentuk pelanggaran HAM berat. Johnson dan saya berkali-kali datang ke penjara Salemba, menemui Xanana Gusmao.

Dalam kasus lainnya, figur Johnson tak bisa dilepaskan dari persoalan perburuhan dan masyarakat miskin kota, sehingga masyarakat dampingannya banyak dibawa ke PBHI untuk dilanjutkan kasus-kasus hukumnya.

Kehadiran Johnson di PBHI tentunya memberikan energi baru bagi para *lawyer* baik senior maupun junior. Semangat berjuang tak pernah padam walaupun tak menerima salary, kecuali staf dan *office boy*. Kaderisasi pun tak henti-hentinya dilakukan baik yang bekerja di wilayah litigasi dan

nonlitigasi. Pokoke, mahasiswa semua jurusan boleh bergabung bersama PBHI, wow!

Para pengurus PBHI tak pernah ambil pusing soal anggaran. Sepengetahuanku, hidup keseharian ditanggung masing-masing, dari makan, transpor dsb. Yang kami tahu, ada rakyat susah harus dibantu dan mengajak client melakukan perlawanan. Jika ada yang tanya bagaimana pembiayaan keberlangsungan lembaga, terutama soal bayar gaji staf, bayar telepon bulanan, listrik, dsb, bisa ditanyakan langsung sama ketua, Hendardi.

Karena saya tidur di kantor, saya sangat paham siapa saja pengurus yang bekerja sampai larut malam. Johnson bersama tim *lawyer* yang sering pulang malam. Apalagi kalau ada aksi massa, semua sibuk *ngurusin* mereka yang ditangkap. Begitu pula yang luka-luka, kami bawa ke RS Baruna, gratis! Kebetulan RS Baruna yang dipimpin aktivis senior dr. Hariman Siregar berada dalam satu halaman dengan PBHI.

Ya, Johnson antusias serta cekatan menangani hal-hal yang *jlimet* dan susah-susah itu. Aku pun merasa tak sendirian alias ada Johnson!

--00--

Banyak kasus yang kami tangani. Namun aku ingin menyimpan kenangan pada kasus di bawah ini:

Kasus Penculikan oleh Tim Mawar

1. Pius Lustri Lanang

Setelah para korban penculikan ini dilepas dan dikembalikan ke orang tuanya masing-masing, aku mengambil inisiatif untuk menangani kasus ini. Setelah menghubungi Komnas HAM untuk dijadikan tempat testimoni para korban.

Kontakku di Komnas HAM waktu itu adalah Asmara Nababan yang notabene adalah perwakilan aktivis NGO di lembaga ini. Waktu itu sekitar jam 19.00, aku langsung ke Palembang menemui korban, Pius Lustrilanang. Waduh, duit seperak pun tak ada, bagaimana mungkin bisa pergi, namun sudah janji pergi malam itu juga.

Saat itu kantor hanya aku seorang. Tiba-tiba DR. Kastorius Sinaga datang ke kantor dan langsung aku todong minta duit. Sebenarnya, aku tak pernah minta duit kepada siapapun sekalipun aku lapar. Tapi kali ini terpaksa demi ke Palembang untuk kasus penting ini.

“Aku tak punya duit,” begitu jawabnya. Tapi kulihat ada duit di kantong bajunya yang sedikit transparan itu. Maka aku nekat merogoh (tepatnya dicopet terang-terangan) semua duit di kantongnya itu. Ternyata jumlahnya Rp 70.000. Setelah dapat uang itu, aku langsung kabur naik bus ke Terminal Lebak Bulus dan lanjut ke Pelabuhan Merak. Intinya, sampailah aku di Palembang sore hari. Besoknya langsung menuju rumah korban membicarakan rencana advokasi kasusnya.

Karena antusias korban untuk mengangkat kasusnya maka aku pun mulai mengukur waktu keberangkatan dari rumahnya ke bandara. Aku ingin sampai bandara langsung masuk pesawat alias tak mau duduk di ruang tunggu bandara. Kebetulan aku alumnus SMA Katolik, Xaverius maka aku bisa minta bantuan pastoral dan dibantu oleh Pastor Yanto terutama meminjam mobilnya untuk membawa korban ke bandara. Alhamdulillah berjalan *on schedule*.

Lalu, apa peran Johnson di sini? Aku memintanya monitoring diriku karena pekerjaan ini *high risk* serta menyiapkan tim advokasi. Kebetulan Ketua Hendardi masih berada di Swiss untuk *human rights conference*. Sengaja aku jadwalkan membawa korban ke Jakarta di saat ketua tiba di tanah air. Arus informasi ini semua dikerjakan oleh Johnson. Semua proses dari awal sampai berangkat korban ke luar negeri berjalan sesuai rencana dan mulus. Kami menjadi tim yang *matching*.

Desmond J. Mahesa

Lain Pius lain pula Desmond. Kesuksesan advokasi Pius terasa mendatangkan persaingan antaraktivis NGO memperebutkan Desmond. Akhirnya proses advokasinya menjadi lebih panjang dan rumit. Kembali aku yang ke Banjarmasin dan bermukim lama di kota ini. Aku *nginep* di kos-kosan mahasiswa sampai akhirnya melahirkan sebuah NGO yang bernama Dalang Sangit yang artinya berjuang sampai titik darah penghabisan. Dalang Sangit menjadi NGO yang mengedepan di Kalimantan Selatan saat ini.

Selama pendampingan korban, sekitar tiga minggu aku merasakan kasak-kusuk para *lawyer* lokal (Ikadin) agar tak ikut skenario PBHI namun mereka tak berani mengambil inisiatif mengatur keberangkatan korban ke

Jakarta. Di hari H keberangkatan sesuai yang aku atur, tiba-tiba korban pindah pesawat yang 20 menit lebih awal dariku. Ternyata korban mengantongi banyak tiket. Entah dari mana saja.

Aku mendapat kabar bahwa di Bandara Cengkareng terjadi perdebatan pengantar-penjemput, yaitu tim dari PBHI dan tim dari YLBHI. Sementara aku nyampe Cengkareng keadaan sudah sepi dan aku tak punya uang untuk naik bus apalagi naik taksi.

Aku coba memanfaatkan satu koin Rp 50 untuk menelepon kantor. Alhamdulillah yang menerima telepon adalah Johnson. Singkat aku ucapkan, "Johnson, coba atur bagaimana aku bisa sampai kantor!" Dia menjawab, "Naik taksi, aku tunggu di kantor dan aku yang bayar." Tiba di kantor aku tanya lagi, "Bagaimana aku bisa bertemu Desmond di hotel Kristal, Pondok Indah?" Dijawabnya, "Aku antar, kita pakai taksi," jawabnya tegas.

Semua jadi lancar berkat Johnson. Terima kasih sangat, Bro. Kerja kita sudah bagus namun si korban tak paham akan pelanggaran HAM yang menimpanya. Johnson menjawab, "Lihat saja nanti, pragmatisme-nya tak ada gunanya dan tak juga tercatat sebagai pejuang HAM". Dalam kasus ini Johnson menjadi penghiburku yang handal.

Kerusuhan Mei 1998

Pada suatu malam Johnson telepon saya, "Paskah saya ada di daerah Tangerang. Ini ada satu gerombolan kayaknya ingin menjarah dan sepertinya juga ingin memperkosa. Di kompleks ini banyak etnis Cina. Bagaimana ya caranya kita bisa mengatasinya?" Aku jawab, "Tidak bisa, yang paling mungkin mencatat apa yang bisa kita lihat."

Kaderisasi

Lewat kaderisasi inilah masuknya anggota baru PBHI. Umumnya mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Jakarta. Pelatihan yang paling sering dilakukan hingga tiga kali berturut-turut adalah pendidikan investigasi. Pelatihannya serius, berlangsung enam bulan per pelatihan. Ada tiga materi utama, yaitu: Jurnalistik, Hukum, dan HAM. Metodenya teori dan praktik.

Johnson selalu pegang materi hukum, sementara jurnalistik dan HAM dipegang sama pihak lain. Saya kira, pelatihan investigasi ini paling edan, karena PBHI hanya menyediakan air putih dan materi/narasumber, dan

kebutuhan lainnya di-cover sendiri oleh para peserta. Silakan jual undangan kami ke *funding agency*. Dan, pesertanya dari Aceh sampai Papua.

Alumni pelatihan ini sebagian jadi wartawan dwimingguan dan sebagian lagi jadi aktivis NGO termasuk menjadi anggota PBHI.

Bersama Johnson, PBHI Nasional berhasil mendirikan PBHI di banyak wilayah, di antaranya PBHI Jakarta, PBHI Jabar, PBHI Yogyakarta, PBHI Lampung, PBHI Sumatera Barat, PBHI Sumatera Utara, PBHI Sulawesi Selatan

Tentunya banyak karya almarhum Johnson Panjaitan semasa hidupnya yang dicatat oleh banyak orang. Semangatnya dan keberaniannya. Tidak pernah kita bisa lupakan.

Begitulah. Semoga catatan kecil ini menjadi berarti dalam perkembangan PBHI ke depan. Semoga Johnson juga mendapat tempat yang terbaik di sisi-Nya.

Beristirahatlah dengan tenang sahabatku. Dirimu adalah pejuang yang tak pernah kenal lelah. Sulit memang menemukan orang bermental dan bersemangat sepertimu. Jasamu abadi, Johnson S Panjaitan.

--00--

Obituari Bang Johnson Panjaitan: Si Pemberani itu Telah Berpulang

Poengky Indarti

Saya mengenal Bang Johnson Panjaitan ketika saya diajak Almarhum Munir Said Thalib untuk berkecimpung dalam dunia perburuhan. Saat itu saya aktif sebagai Pengabdi Bantuan Hukum LBH Surabaya sekitar tahun 1990-an.

Saat itu Orde Baru masih berkuasa. Buruh ditindas dengan standar upah minimum regional yang sangat rendah, tidak sepadan dengan jerih payahnya, dan dipaksa tunduk pada penunggalan serikat buruh yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Saat itu Bang Johnson aktif membela buruh lewat organisasinya FORSOL (Forum Solidaritas Buruh).



Sumber foto : dokumen internal

Ketika saya bekerja di Imparsial dan fokus pada monitoring Reformasi Sektor Keamanan di Papua, saya banyak melihat kiprah Bang Johnson sebagai pengacara Hak Asasi Manusia dan pimpinan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) yang mau turun ke Papua untuk membela Orang-Orang Asli Papua yang mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Antara lain pembelaan terhadap masyarakat Amungme yang dibantunya dalam proses hukum melawan Perusahaan raksasa PT Freeport.

Dalam kasus tersebut Antonius Wamang cs dituding melakukan penembakan terhadap 2 (dua) orang guru Warga Negara Amerika Serikat di Mile 62-63 di PT Freeport, serta mahasiswa-mahasiswa Papua yang dituding melakukan perlawanan kepada Pemerintah.

Saya juga pernah berada dalam satu tim Penasihat Hukum bersama Bang Johnson ketika saya ikut membela kawan-kawan muda Papua yang dituding melakukan perusakan saat aksi demonstrasi di depan kantor Freeport di HR. Rasuna Said – Jakarta.

Bang Johnson adalah Pengacara Hak Asasi Manusia yang sangat berani, termasuk berani bersuara lantang melawan pihak-pihak yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia: Pemerintah, TNI, Polri, dan Perusahaan Transnasional, di mana pada masa itu sangat jarang orang-orang yang memiliki keberanian semacam itu.

Kasus-kasus yang ditangani sangat berat dan melibatkan aparat, sehingga sangat mungkin Bang Johnson dipantau, diganggu, dan diancam aparat. Apalagi ketika dia berani membela orang-orang Asli Papua dan orang-orang Timor-Timur (saat ini disebut Timor Leste) yang distigma sebagai pemberontak oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, luar biasa jika aktivis sederhana seperti dia yang berani dan mampu bertahan melakukan perlawanan.

Terakhir saya mengikuti pemberitaan tentang Bang Johnson yang bergabung dengan Indonesian Police Watch (IPW). Saya senang melihat Bang Johnson masih berapi-api mengkritisi Polri. Sebagai institusi yang sangat besar, Polri memang perlu diawasi oleh masyarakat sipil yang kuat dan memahami isu Reformasi Sektor Keamanan.

Pada 26 Oktober 2025, saya mendapat kabar dari Pak Hendardi melalui WA Group Imparsial bahwa Bang Johnson telah berpulang. *Innalillahi wa inna ilaihi rojiun*. Semoga Bang Johnson beristirahat dalam damai di sisi-Nya, dan keluarga serta sahabat-sahabat yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Saya berharap kiprah Bang Johnson menjadi teladan kawan-kawan aktivis muda, khususnya kawan-kawan PBHI, sehingga perjuangan Bang Johnson tidak akan pernah putus.

Jakarta, 3 November 2025.

Poengky Indarti, aktivis HAM, Komisioner Kompolnas (2016 – 2024).

Kenangan Pribadi Bersama Bang Johnson Panjaitan

Robert Manaku

Saya masih ingat dengan jelas, tahun 1999 menjadi titik awal perjalanan saya mengenal sosok yang begitu berpengaruh dalam hidup saya – Bang Johnson Panjaitan. Saat itu, PBHI tengah melakukan advokasi terhadap enam mahasiswa Papua yang mengibarkan Bendera Bintang Kejora di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Sebagai mahasiswa Papua yang tengah menempuh pendidikan di Semarang, saya menyaksikan langsung bagaimana Bang Johnson dan rekan-rekan PBHI berdiri tegak, membela mereka dengan keberanian dan ketulusan yang luar biasa.

Dari momen itu, hubungan kami mulai terjalin. Setelah advokasi enam mahasiswa tersebut, Bang Johnson tidak hanya menjadi pengacara bagi banyak orang Papua, tapi juga menjadi sahabat, kakak, dan panutan bagi kami, para mahasiswa Papua di perantauan. Dalam setiap pertemuan, ia selalu hadir dengan wajah tenang, kata-kata yang tegas namun lembut, dan semangat yang tidak pernah padam untuk menegakkan keadilan.



Sumber foto : dokumen internal

Kerja sama kami terus berlanjut dalam berbagai perjuangan: Kasus Pelanggaran HAM Abepura tahun 2000, Wasior 2001, Wamena 2003, hingga advokasi terhadap empat mahasiswa Papua yang ditangkap di Polda Jawa Tengah pada 2003. Dalam setiap langkah advokasi itu, saya belajar banyak dari Bang Johnson – tentang arti keberanian, tentang konsistensi, dan tentang bagaimana kemanusiaan harus selalu menjadi dasar dari setiap perjuangan hukum.

Sebagai seorang mahasiswa Ekonomi di Unika Soegijapranata, saya tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa dunia advokasi akan menjadi jalan hidup saya. Namun semangat dan keteladanan Bang Johnson menyalakan api dalam diri saya. Saya mulai melihat bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan, melainkan alat untuk memperjuangkan martabat manusia. Karena inspirasi dari beliau, saya akhirnya menempuh pendidikan hukum dan kini menjalani profesi sebagai advokat – meneruskan semangat yang dulu beliau tanamkan.

Bang Johnson bukan hanya seorang pejuang hukum; ia adalah penyala harapan bagi banyak orang, terutama bagi kami, anak-anak muda Papua yang dulu mencari arah dalam perjuangan panjang ini. Ia mengajarkan bahwa keadilan tidak akan hadir dengan sendirinya, melainkan harus diperjuangkan dengan hati yang tulus dan keberanian yang tak gentar.

Terima kasih, Bang Johnson, atas semua yang telah engkau wariskan – bukan hanya dalam bentuk perjuangan hukum, tetapi juga dalam nilai-nilai kemanusiaan dan cinta pada kebenaran. Jejak langkahmu akan selalu hidup dalam ingatan dan dalam setiap langkah perjuangan kami di Tanah Papua dan Indonesia.

Kenangan Bersama Johnson Panjaitan

Tuti Pujiarti

Johnson Panjaitan, teman-teman kerap menyebutnya Bang JP. Kiprahnya di bidang advokasi dan Hak Asasi Manusia cukup dikenal di kalangan organisasi HAM di Indonesia.

Saya mengenal beliau pada tahun 1999, saat bergabung di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI). Meski sebelumnya sudah mengenal saat acara *gathering* LBH di Puncak Bogor. Saat itu, ia bersama istrinya Elisabeth Pane, dan Bang Johnson masih bekerja di LBH Jakarta. Tetapi kedekatan saya saat di PBHI.



Sumber foto : dokumen internal

Bang Johnson sosok seorang yang punya kepribadian kuat, berjuang tidak mengenal lelah. Saya melihat saat beliau mendampingi Xanana Gusmao yang ditahan di rutan Salemba tahun 1999 hingga bebas. Setelah itu, Xanana tetap berjuang untuk kebebasan wilayah Timor Leste melalui referendum/jajak pendapat tahun 1999. Xanana pun menjadi Presiden Timor-Leste periode 2007-2015.

Bang Johnson tidak mengenal takut, meskipun beberapa kali mendapat teror. Salah satu adalah lubang peluru di mobilnya. Ia berani menghadapi FPI saat mendemo PBHI yang saat itu masih berkantor di Cikini, Jakarta Pusat. FPI meminta penghentian melakukan pendampingan/pembelaan terhadap pendeta Damanik dalam konflik Poso.

Kedekatan saya dengan Bang Johnson sebatas kerja-kerja manajemen internal organisasi, yakni pengelolaan keuangan program. Beliau sangat tegas jika ada salah satu *lawyer* atau staf program dalam penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah disusun bersama, terutama dana-dana advokasi. Beliau cukup rapi dalam pertanggungjawaban keuangan baik program maupun biaya perjalanan.

Bang Johnson juga pernah terlihat sedih, saat menghadapi persoalan internal PBHI. Tapi saya yakin, ini sebagai bentuk kasih sayang beliau terhadap teman dan sesama rekan kerja yang berjuang bersama. Beliau tidak ingin ada perseteruan di dalam internal PBHI. Di kala demikian, beliau lebih banyak diam.

Selamat jalan Bang! Perjuanganmu dalam menegakan keadilan dan membela kaum tertindas akan selalu dikenang. Istirahatlah dengan damai. Biarlah anak-anak dari generasi sekarang yang akan melanjutkan perjuanganmu.

Tuti Pujiarti. Bendahara PBHI periode 1999 s.d. 2008. Di Majelis Nasional PBHI 2010 s.d. 2014 membantu Ketua Majelis Nasional untuk membuat kebijakan keuangan PBHI.

Johnson, Teladan Keberanian Pembela HAM

Usman Hamid

Perjuangan hak asasi manusia (HAM) termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat telah menjadi bagian penting dalam sejarah umat manusia. Dari perjuangan melawan perbudakan, penjajahan hingga perjuangan melawan diskriminasi, penindasan, dan pengurukan kekayaan alam oleh rezim despotik dan korup.

Pada mulanya, HAM merupakan refleksi penderitaan sekaligus imajinasi politik manusia tentang kehidupan yang ideal. Bebas dari rasa takut dan bebas dari rasa kekurangan. Lalu imajinasi itu menjadi landasan bagi umat manusia di berbagai negara untuk melawan apa yang dirasakannya tidak adil dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.



Sumber foto : kabarontime.com

Namun, perjuangan melawan penderitaan maupun perjuangan mewujudkan imajinasi itu tidak mudah. Ia membutuhkan keberanian. Hanya keberanian yang luar biasa dari orang-orang atau kelompok dalam mengambil risiko untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini benar.

Keberanian itulah salah satu sifat yang saya rasakan melekat pada sosok Johnson Panjaitan dan terus melekat pada dirinya hingga akhir hayatnya pada 28 Oktober lalu.

Perkenalan pertama kali saya dengan Johnson terjadi ketika saya masih menjadi aktivis mahasiswa Universitas Trisakti. Saat itu saya dan seorang sahabat kampus, Hasiholan, memperoleh tugas khusus dari Presidium Mahasiswa Universitas Trisakti (PMUT).

PMUT menugaskan kami untuk mendorong sejumlah lembaga nonpemerintah mengusut tuntas tragedi penembakan mahasiswa di kampus kami pada 12 Mei 1998. Saat itu, empat mahasiswa gugur akibat brutalitas aparat ABRI. Kami berdua lalu mendatangi kantor PBHI, YLBHI, dan KontraS.

Saat mendatangi kantor YLBHI dan LBH Jakarta, kami menemui Bambang Widjojanto dan Daniel Pandjaitan. Kami mendapatkan pencerahan seputar situasi politik terbaru maupun langkah hukum yang bisa diambil. Kala itu belum ada Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pengadilan HAM.

Kami berdua juga mendatangi kantor KontraS dan ditemui oleh Bambang Soegianto yang ketika itu merupakan wakil koordinator KontraS. Kami mendapatkan pencerahan seputar masalah hukum dan seputar dinamika politik keamanan saat itu.

Selain kunjungan ke dua organisasi HAM tersebut, kami berdua berkunjung ke PBHI untuk meminta hal yang serupa; menyuarakan tuntutan mahasiswa untuk tegaknya keadilan atas Tragedi penembakan mahasiswa di Kampus A Usakti, Grogol, Jakarta Barat, pada 12 Mei 1998.

Semula, kami mau menemui Hendardi, Ketua PBHI saat itu. Tapi dia sedang ke luar negeri. Kalau tidak salah, mewakili Xanana Gusmao untuk menghadiri persiapan praperundingan tripartit antara Indonesia, Portugal dan PBB yang rencananya digelar sebulan kemudian, tepatnya pada 5 Mei 1999. Jadi, kami berdua hanya bisa menemui Johnson.

Semangat Keberanian Johnson

Yang membedakan tiga kunjungan itu adalah pertemuan kami dengan Johnson Panjaitan. Terasa sekali adanya energi keberanian, kegeraman, bahkan kemarahan. Ketika itu dia masih menjabat Sekretaris Jenderal PBHI.

Johnson sedang menggelar konferensi pers terkait pembelaannya pada Kay Rala Xanana Gusmão yang saat itu masih berada di penjara. Xanana adalah pemimpin gerakan prokemerdekaan Timor-Timur dari salah satu sayap bersenjata, yaitu Conselho Nacional Resistencia de Timorese (CNRT).

Beberapa tahun sebelumnya, kalau tidak salah pada akhir tahun 1995, saya sempat diajak menemuinya ketika saya ikut misi kunjungan berkala Fakultas Hukum Usakti ke penjara LP Cipinang. Saya masih ingat bagaimana Xanana berada di balik pagar kawat yang tinggi dan menyapa kami sampai berusaha mengulurkan tangannya di antara pagar kawat.

Dalam konferensi pers tersebut, Johnson bukan hanya sedang menyuarakan agar Xanana dibebaskan. Ia sedang berbicara soal kemarahan orang Timor Timur, setidaknya yang diwakili oleh Xanana setelah kejadian kekerasan di Liquica yang menewaskan 17 orang. Johnson membagikan pernyataan bertajuk “Falintil Resumes Their Mission in Defence of The People of East Timor.”

Di tengah penjelasan itu, dan kalau tidak salah sambil mendesak kepada PBB agar segera mengirim pasukan perdamaian, tiba-tiba Johnson melontarkan pernyataan yang sangat keras dan disampaikan dengan nada seperti marah, yaitu menyatakan “perang dengan ABRI!”

Sebagai mahasiswa, kami cukup terkesima juga dengan cara Johnson bicara. Tegas dan keras. Bukan hanya itu. Yang membuat kami cukup geleng-geleng kepala adalah salah satu pernyataan Johnson berbunyi: “menyatakan perang dengan ABRI.”

Saya dan kawan saya Olan senyum-senyum gelisah. Bagaimanapun, dan meski kami merasakan kemenangan politik mahasiswa melawan rezim Orde Baru tecermin dengan pernyataan pemberhentian Soeharto pada 21 Mei 1998, kami merasa militer saat itu masih sangat kuat.

Setidaknya, kepentingan kekuasaan Soeharto masih terlihat kuat dalam pemerintahan BJ. Habibie dan kepemimpinan ABRI di bawah Jenderal Wiranto. Bahkan, represi yang sangat brutal terulang kembali pada dalam Tragedi Semanggi 13-14 November 1998. Lalu terulang lagi pada saat kami berdemonstrasi di depan Kementerian Pertahanan pada April 1999. Dan terulang lagi pada 23-24 September 1999.

Benar saja. Pemberitaan media atas pernyataan Johnson menimbulkan kehebohan. Media menulisnya dalam *headline* sebagai

“Pernyataan Perang.” Tentu saja pernyataan ini di luar bayangan para aktivis zaman itu. Saya lupa apa yang kemudian terjadi setelah itu. Kalau tidak salah, PBHI menerbitkan klarifikasi bahwa pernyataan Johnson itu tidak bermaksud menyatakan perang dengan ABRI.

PBHI menjelaskan, pernyataan Johnson itu lebih sebagai upayanya untuk menyampaikan kepentingan kliennya yaitu Xanana. PBHI menjelaskan pernyataan Xanana ditujukan untuk “suatu usaha pembelaan diri” dari rakyat Timor Timur yang mengalami serangan brutal tak hanya dari militer, tapi juga kelompok-kelompok milisi pamswakarsa prointegrasi yang dibentuk dan dipersenjatai oleh ABRI.

Pernyataan Johnson lalu diletakkan oleh PBHI dalam konteks diskursus kebijakan saat itu, di mana pemerintah mulai menawarkan dua opsi, “otonomi atau merdeka”, yang kemudian justru seperti dilawan dengan opsi “otonomi” atau “perang”.

PBHI juga menjelaskan bahwa “kemarahan” klien mereka itu, sebagai reaksi atas iklim peperangan atau pilihan pendekatan militer yang diterapkan oleh pemerintah selama bertahun-tahun. Lalu PBHI juga menyampaikan bahwa Xanana justru memperbarui seruannya berupa seruan perdamaian dan rekonsiliasi, sambil memberikan syarat agar ABRI melucuti senjata-senjata api yang diberikannya kepada para milisi.

Keberanian Pembela HAM Indonesia

Johnson dan kawan-kawan pembela HAM di PBHI, YLBHI dan WALHI memang merupakan kelompok manusia amat vokal menyuarakan isu-isu hak asasi manusia, lingkungan hidup dan demokrasi dari Sabang sampai Timor Timur. Johnson merupakan salah satu aktivis HAM yang vokal menuntut pembebasan “tapol” dan “napol” Orde Baru.

Ini adalah dua istilah kontroversial untuk menyebut mereka yang ditahan dan dipenjara tanpa proses peradilan atau dihukum penjara selama bertahun-tahun hanya karena materi pendapat dan kegiatan politik mereka secara damai. Mereka terdiri dari orang-orang yang sebagian besar hanya karena dituduh ekstrem kiri (komunis), ekstrem kanan (Islamis), atau ekstrem tengah (entah apa lagi istilahnya).

Sejak bergabung sebagai relawan di KontraS, saya jadi sering bertemu Johnson, apalagi ketika mendapat kepercayaan memimpin KontraS. Saya dan Johnson banyak bekerja sama khususnya terkait advokasi keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu, antara lain kasus Trisakti, Semanggi I

dan II. Kami juga kerap bekerja sama dalam memerhatikan dan menyuarakan situasi HAM di Aceh, dan Papua.

Selama mengenal sosok-sosok seperti Munir hingga Johnson, saya percaya bahwa sebuah keberanian adalah sifat yang sangat penting dalam perjuangan HAM. Sifat itu penting karena memungkinkan individu untuk mengambil risiko dan menghadapi tantangan yang ada.

Dalam konteks HAM, keberanian tidak hanya berarti berani menghadapi bahaya fisik, tetapi juga berani menghadapi tekanan sosial, politik, dan ekonomi. Individu yang berani memperjuangkan HAM harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, termasuk ancaman, intimidasi, dan bahkan kekerasan. Johnson melalui itu semua.

Kantor kami—KontraS dan PBHI—pernah secara bergiliran diserang oleh orang-orang suruhan dan bayaran. Beberapa kali kantor Kontras diserang, termasuk saat diserang pada Maret 2002 terkait penyelidikan Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II serta pada Mei 2003 terkait situasi Aceh, Johnson selalu hadir di antara yang pertama untuk bersolidaritas di kantor KontraS: mengecam serangan dan menuntut pertanggungjawaban.

Dalam berbagai kesempatan itu, saya punya kesan sederhana yang kerap saya ucapkan pada dia: Johnson ini kalau lagi melawan seperti punya nyawa sembilan!

Sejarah Keberanian di Dunia

Sejarah dunia juga mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian. Salah satu contoh keberanian dalam perjuangan HAM adalah kisah Nelson Mandela, yang berjuang melawan Apartheid di Afrika Selatan. Mandela menghadapi penjara selama 27 tahun karena perjuangannya, tetapi dia tidak pernah menyerah.

Ketika dia akhirnya dibebaskan, dia terus berjuang untuk mengakhiri Apartheid dan memperjuangkan kesetaraan bagi semua warga Afrika Selatan. Keberaniannya telah menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia untuk memperjuangkan HAM.

Keberanian juga memungkinkan individu untuk mengambil tindakan yang berani dan inovatif dalam memperjuangkan HAM. Misalnya, aktivis HAM seperti Malala Yousafzai telah menggunakan keberaniannya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan di Pakistan.

Malala tidak takut untuk berbicara tentang hak-hak perempuan dan menantang Taliban, meskipun dia telah menjadi target serangan. Keberaniannya telah menginspirasi banyak orang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan pendidikan.

Selain itu, keberanian juga dapat memicu perubahan sosial dan politik yang signifikan. Ketika individu-individu berani memperjuangkan HAM, mereka dapat memobilisasi masyarakat dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Misalnya, gerakan hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, yang dipimpin Martin Luther King Jr. dan juga Malcolm X, menggunakan keberanian dan cara nonkekerasan untuk memperjuangkan hak-hak sipil bagi warga Afrika-Amerika. Gerakan ini telah menjadi contoh bagi banyak gerakan sosial lainnya di seluruh dunia.

Namun, keberanian dalam perjuangan HAM tidak hanya berarti berani mengambil risiko, tapi juga berarti berani untuk terus maju meski menghadapi kegagalan. Dan kekecewaan, yang bahkan bisa datang dari kawan seperjuangan.

Perjuangan HAM seringkali merupakan proses yang panjang dan sulit, dan orang-orang yang memperjuangkan HAM harus siap menghadapi kegagalan dan kekecewaan. Namun, dengan keberanian dan ketekunan, kita dapat terus maju mencapai tujuan. Setidaknya mendekati tujuan. Setidaknya meyakini apa yang kita lakukan itu benar.

Johnson Panjaitan dikabarkan mengalami pendarahan serius pada syaraf otak dan kritis selama 4-5 hari terakhir hingga dini hari tadi. Dengan kondisi kesehatan yang berat tersebut, ia meninggal pada pukul 7.33 pagi, 26 Oktober 2025.

Sebagai kesimpulan, saya hanya dapat mengatakan bahwa Johnson adalah sosok aktivis dan advokat yang berani dan gigih, apalagi saat membela hak-hak atas keadilan dari para korban pelanggaran HAM. Keberanian, sekali lagi, merupakan sifat yang sangat penting dalam perjuangan hak asasi manusia.

Semasa memimpin PBHI, kantornya pernah digeruduk dan mobil pribadinya juga pernah ditembak. Semua teror semacam itu tidak pernah mencuatkan nyalanya dalam melawan ketidakadilan. Dia mencintai keadilan. Adil kepada korban, adil kepada kawan. Itu sebab mengapa Johnson begitu

dicintai oleh keluarganya. Saya baru tahu bahwa saat menjalani transplantasi ginjal, adiknya yang berkorban. Suatu persaudaraan sejati.

Satu-satunya sikap tidak adil dari Johnson barangkali kepada dirinya sendiri. Sikap ini adalah ciri dari seorang manusia altruis. Hidup untuk yang lain. Berbeda dengan banyak aktivis lainnya yang punya kebiasaan merokok, Johnson jauh dari kebiasaan itu. Jadi, dia memang kurang istirahat. Selamat beristirahat dalam damai, Bung Johnson.

Belajar dari Trotoar

Veronica P

“Trotoar itu haknya pejalan kaki. Meski kita terburu-buru, Abang enggak lewat situ. Kita jangan ambil hak orang lain ya, Ning!”

Kalimat Bang Johnson itu selalu terngiang ketika aku sedang naik sepeda motor dan terjebak kemacetan. Mungkin sudah ratusan kali, kalimat itu kembali “terdengar”. Kata-kata Bang Johnson, ketika aku ada dalam boncengan motornya, dari kantor Institut Sosial Jakarta yang berada di Jl. Arus Dalam – Cawang, menuju ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, yang terletak di Jl. Cikini Raya. Tidak selalu diantar mobil atau naik taksi, sesekali kami berangkat berboncengan sepeda motor.



Sumber foto : kompas.com

Kisaran tahun 1999 hingga tahun 2000, Abang (begitu Bang Johnson memanggil dirinya untukku) banyak melibatkanku untuk menangani kasus-kasus perburuhan. Saat itu, belum ada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sebelumnya, perselisihan perburuhan diselesaikan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4D). Ketika tidak terselesaikan maka naik ke PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara).

Di Institut Sosial Jakarta yang saat itu dikomandani oleh Romo I. Sandyawan Sumardi SJ., yang akrab kami panggil Bapak, Bang Johnson dan aku diberi tanggung jawab untuk menangani kasus-kasus perburuhan. Kami sama-sama ada di satu biro: Biro Advokasi Buruh. Salah satu biro dari tiga biro yang ada. Dua biro lainnya adalah Biro Advokasi Anak dan Biro Advokasi Pemulung.

Kasus perburuhan bukanlah kasus pertama bagiku. Kasus pertama yang membawaku masuk ruang pengadilan untuk bersidang, sungguh kasus yang tak terbayangkan. Belum genap 12 bulan lepas dari fakultas hukum, sudah diajak mengecap kasus besar yang disorot secara nasional. Sangat politis dan menegangkan. Kasus Kerusuhan Mei 1998.

“Kali ini, Abang enggak mau tahu. Ning harus ikut *nanganin* kasus ini. Kalau harus “berantem” dengan Bapak, Abang enggak peduli”. Begitulah Bang Johnson sungguh dengan segala upaya, membawaku masuk ke rimba dunia kepengacaraan.

Beberapa bulan sebelumnya, saat awal-awal aku bergabung di ISJ dan mengerjakan kerja-kerja kesekretariatan, Bang Johnson pernah meminta izin Bapak, untuk melibatkanku mengurus kasus tahanan politik dan narapidana politik (TAPOL-NAPOL). Dan layak belum diizinkan, karena aku memang masih harus belajar banyak hal, sebelum “terjun” ke lapangan dengan berbagai risikonya.

Bersama LBH Jakarta, ELSAM, Solidaritas Nusa Bangsa, PBHI dan ISJ, atas nama warga, menggugat para punggawa negara. Di antaranya Pangdam Jaya, Kapolda Jakarta, Kapolri, Panglima ABRI dan juga Presiden RI.

Di situlah untuk pertama kalinya aku bersidang, sebagai perwakilan dari Institut Sosial Jakarta, bersama Bang Johnson. Bersama para senior dari lima lembaga, dan kawan-kawan seangkatan yang masih sama-sama belajar. Ada Ecoline Situmorang – PBHI, Aderito Soares – ELSAM, juga almarhum Lamria – Solidaritas Nusa Bangsa.

Tidak main-main, Abang membawaku mengurus perkara yang langsung berhadapan dengan negara. Perkara pertama yang menggembelengku, mengasah kepekaan selain kecerdasan dan kewaspadaan.

Mungkin tidak sama dengan lainnya, Bang Johnson membimbingku dalam menangani perkara. Selain melihat, mengajak diskusi, tetapi juga langsung disituasikan harus berani sendiri. Gemetaran dan keringat dingin

pernah kurasakan. Saat itu sidang pemeriksaan saksi. Dan sampai detik dipanggil panitera, Abang belum datang. Akhirnya, di situlah untuk pertama kali aku sidang sendiri.

“Kalau tidak begitu, kamu enggak akan berani,” ucapnya. Rupanya, itu sudah direncanakan. Mengatakan akan menyusul ke pengadilan, tetapi tidak datang. Dan, Abang melihat aku mampu melaksanakan tugas itu. Dari situ aku memahami, Abang juga sangat memerhatikan kapasitasku. Kapan aku bisa dilepas sendiri, kapan masih butuh ditemani. Ibarat pelatih renang, Abang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi langsung menceburkanku ke air. Dia menakar kemampuanku dan takkan membiarkanku sendirian dan tenggelam. Tanpa harus diminta, Abang akan ada saat aku butuh bantuannya.

Komunikasi dan interaksi dengan Bang Johnson tidak lagi hanya aku jalani di ISJ, karena Abang semakin banyak berkantor di PBHI. Ini mengasahku pengalaman dan kemampuanku yang lain. Kerja berjejaring. Karena ketika tujuan utamanya bertemu Bang Johnson, tentu aku bertemu dan berbincang dengan kawan-kawan PBHI yang lain. Sehingga ketika ada kasus dan perlu kerjasama antar lembaga, lebih mudah menjalankannya. Dari bincang-bincang sehari-hari, memudahkan memahami bagaimana harus berinteraksi dalam konteks kelembagaan.

Kasus-kasus besar, menantang dan bahaya ditanganinya tanpa ada yang ditakutinya. Tetapi tidak membuatnya melupakan hal-hal yang dianggap biasa dan sederhana. Kasus-kasus yang jamak dialami para buruh, dari yang dihalangi mendapat cuti, hingga mereka yang dikriminalisasi. Meskipun waktunya banyak menerima undangan di televisi, Bang Johnson punya hati pada persoalan sehari-hari.

Bila kembali mengingat obrolan dalam perjalanan, aku rasakan bagaimana Bang Johnson menerapkan pembelaannya dalam keseharian hidupnya. Kalau hak pejalan kaki yang banyak diabaikan saja terpikirkan dan mewujud dalam tindakannya, apalagi hak asasi lain yang banyak mendapat perhatian dan sorotan.

Saat aku mendapat kabar kepergian Abang, aku ada di tanah Papua. Salah satu wilayah yang menjadi perhatiannya. Kaget dan tidak percaya tentunya. Konfirmasi dari teman ke teman, dari grup WhatsApp satu ke grup WhatsApp lainnya, baru membuatku yakin adanya.

Meski di tanah dengan harta berlimpah namun penuh air mata ini tidak ada kemacetan. Tidak perlu orang naik trotoar untuk memburu waktu, tetapi aku akan selalu belajar dari sikap dan tindakan Abang itu.

Peziarahan dan perjuanganmu sudah ada di garis akhir, Abangku. Tinggal damai yang menyelimutimu. Akan kami teruskan nilai dan cita-citamu.

Papua, 3 November 2025

Veronica Purwaningsih – (keluarga) Institut Sosial Jakarta

0813 2875 4942

ning.vero@gmail.com

Johnson Panjaitan, Xanana Gusmao dan Antimiliterisme

Wilson Obrigados



Sumber foto : Instagram @johnsonpanjaitan_

Johnson Panjaitan ini nyalinya sejengkal di bawah langit. Sebagai pengacara HAM dan rakyat kecil, dia menghadapi aparat polisi, kejaksaan dan hakim di pengadilan tanpa kenal takut. Malah sebaliknya polisi dan jaksa tampak cemas kalau tahu Johnson jadi pengacara aktivis yg ditangkap.

Suaranya yang lantang ketika melakukan pembelaan akan dikenang oleh banyak jaksa dan polisi yang pernah menghadapinya.

Johnson sudah saya kenal namanya sejak aktif jadi pengacara LBH di tahun 1990-an. Di LBH para pengacara muda terlatih menghadapi kesewenangan polisi dan hukum yang dibuat bengkok oleh para jaksa. Johnson jadi saksi "bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas."

LBH di mana Johnson berkarir saat itu menganut pendekatan bantuan hukum struktural, yang menyatakan bahwa soal hukum terkait langsung pada struktur kekuasaan ekonomi dan politik yang dominan. Saat

itu kekuasaan ekonomi politik di bawah Orde Baru mengabdi pada modal dan oligarki. Kekuasaan Orba ini yang merusak hukum, membuat rakyat termarginalkan hak asasinya sebagai warga negara. Johnson melawan kekuasaan korup pemerintah Orba yang memanfaatkan hukum utk kekuasaan bukan untuk keadilan.

Johnson lalu aktif di Institut Sosial Jakarta (ISJ) yang dipimpin Romo Sandyawan. ISJ aktif melakukan pendampingan, advokasi atas kaum miskin kota dan buruh yg dirampas dan dilanggar haknya. Romo Sandyawan juga yang menyembunyikan saya dkk PRD yang diburu militer setelah kerusuhan 27 juli 1996.

Johnson dan aktivis buruh lalu membentuk Forum Solidaritas Buruh atau yang dikenal dengan Forsol pada awal 1990-an. Forsol terlibat dalam advokasi perburuhan, kampanye hak-hak buruh, menolak pelibatan militer hingga menuntut kebebasan membangun serikat buruh independen.

Ketika Marsinah dibunuh Mei 1993, Forsol termasuk yang paling keras membuat advokasi dan menduga keterlibatan militer dalam kasus tersebut. Saat itu saya bersama mahasiswa SMID di berbagai kota juga melakukan pengorganisiran buruh dengan tujuan yang serupa dengan Forsol. Bahkan pernah, kami menggunakan sekretariat Forsol di Jl Bunga untuk pelatihan perburuhan-mahasiswa. Johnson tampaknya senang dengan para mahasiswa yang “bunuh diri kelas” dengan mengorganisir buruh. Para buruh dan mahasiswa ini yang pada tahun 1994 mendirikan Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) pimpinan Dita Sari, yang dilarang oleh pemerintah setelah Kudatuli 1996.

Pada awal 1990-an tidak banyak para aktivis yang menaruh perhatian pada pembelaan dan perjuangan buruh. Tapi Johnson sebaliknya. Kita tahu dunia perburuhan saat itu sarat dgn intervensi militer. Semua pemogokan akan dihadapi oleh militer di pabrik. Para buruh yang terlibat dipanggil ke Koramil atau Kodim untuk diintimidasi. Bahkan seringkali dipecat sepihak di kantor militer.

Johnson dan Forsol pastinya dianggap musuh oleh tentara, karena membela kaum buruh berhadapan dengan militer dan pemilik modal. Johnson ini sikap antimiliterismenya yang kuat didapat dari pengalaman lapangan langsung. Ini yang membentuk nyalinya: paling berani mengkritik dan berhadapan dengan militer. Tentu dia akan jadi penentang keras UU TNI yg mengembalikan dwi fungsi TNI plus. Mari kita lanjutkan legasi antimiliterisme dari Johnson sebagai sebuah sikap yang makin relevan dengan situasi sekarang.

Peran Johnson yang juga penting adalah menjadi pengacara para aktivis Timor Leste yang ditangkap atau ditahan di LP Cipinang Jakarta. Para aktivis ini dituduh sebagai gerakan separatis yang hendak memisahkan dari Indonesia. Saat itu kebanyakan aktivis "takut dan ragu" mendampingi para aktivis Timor Leste karena dituduh tidak nasionalis oleh rezim Orba dan terutama tentara. Namun Johnson keluar dari ketakutan dan chauvinis nasionalisme. Bagi Johnson kemanusiaan dan *rule of law* lebih tinggi dari demagogic nasionalisme semu yang militeris.

Sejak Xanana Gusmao, pimpinan CNRT dipindah ke LP Cipinang sejak 1994 maka para pengacara yang dipimpin PBHI yang menjadi pendamping hukum. Salah seorang pengacara tersebut adalah Johnson Panjaitan. Jelang referendum 1999, pembebasan Xanana Gusmao semakin terdengar luas. Xanana lalu dipindah ke "rumah tahanan khusus" di Salemba jelang referendum dan kebebasannya. Johnson Panjaitan menjadi pengacara yg dampingi Xanana Gusmao dalam proses jelang pembebasan tersebut. Saya sempat bertemu Johnson saat mengunjungi Xanana di Rumah Tahanan Khusus tersebut.

Sementara saya dan Tapol PRD ditahan di LP Cipinang sejak penghujung tahun 1996 untuk menjalani persidangan. Di LP Cipinang saya bertemu dengan Xanana yang sudah menjadi Tapol senior. Johnson Panjaitan adalah salah seorang pengacara saya yang bergabung dalam TPHKI (Tim Pengacara Hukum dan Keadilan Indonesia).

Johnson selalu garang dalam setiap persidangan saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setiap Johnson hadir di persidangan nyali para jaksa penuntut umum menjadi ciut. Sebelum persidangan para jaksa menjenguk saya di dalam sel pengadilan untuk menanyakan apakah Johnson Panjaitan hadir mendampingi terdakwa. Mendengar Johnson akan hadir, membuat langkah para jaksa berjalan gontai dan wajahnya jadi cemas.

Wajar bila para jaksa menjadi kehilangan semangat mendengar Johnson mendampingi saya di persidangan. Dalam ruang sidang Johnson seperti harimau yang siap memangsa para jaksa penuntut umum. Saat para jaksa bertanya, Johnson dengan lantang berani menginterupsi dengan suaranya yang keras bahwa pertanyaan jaksa tidak relevan. Jaksa biasanya berhenti dengan wajah pucat meminta pertolongan hakim. Namun hakim terkadang membenarkan interupsi Johnson. Namun sebenarnya Johnson tak peduli dengan keberadaan majelis hakim. Seringkali dia berdebat dan menginterupsi anggota majelis hakim yang sedang bertanya pada saya.

Johnson sadar bahwa ini persidangan politik, di mana hakim dan jaksa menjalankan perintah dari rezim, khususnya militer.

Saat saya dibebaskan melalui amnesti pada 24 juli 1998 saya menolak pembebasan. Xanana dan seluruh tapol membuat pertemuan di ruang besukan. Keputusannya bulat, saya akan menolak pembebasan melalui amnesti bila seluruh tapol se-Indonesia tak dibebaskan. Lalu Xanana usul untuk mengunci diri dalam sel agar tak dipaksa keluar. Lalu Xanana menyelundupkan kunci gembok besar pada saya. Sampai dalam sel di blok III E sel No 3, sel saya kunci gembok.

Selama saya menggembok dalam sel, Johnson Panjaitan dan tim pengacara saya dengar datang menemui Kalapas memantau perkembangan. Mereka mendukung aksi gembok dalam sel hingga semua Tapol dibebaskan. Setelah 3 hari, pada 27 Juli 1998 sekitar subuh pukul 02.00 WIB pagi gembok digerjai oleh Brimob. Saya minta izin sebelum ke kantor Kalapas mengunjungi Xanana Gusmao untuk perpisahan dan mengabarkan bahwa gembok dari dia bisa dibongkar Brimob. Lalu saya ke kantor Kalapas. Di dalam sudah ada Johnson Panjaitan dkk yang menunggu. Setelah tanda tangan dokumen pembebasan, saya menuju parkiran. Saya memutuskan untuk menginap di kantor PBHI yang dipimpin Johnson.

Setelah saya bebas, Johnson disibukkan dengan pendampingan hukum pada Xanana Gusmao ketika Presiden BJ Habibie menyetujui sebuah referendum untuk Timor Leste dan proses pembebasan Xanana Gusmao.

Johnson Panjaitan adalah pengacara Xanana Gusmao dan saya, saat menghadapi kekuasaan Orde Baru. Sosok Johnson adalah pembangun jembatan solidaritas kemanusiaan antardua bangsa. Inilah legasi yang harus dilanjutkan.

Pertemuan terakhir dengan Johnson adalah saat menghadiri makan malam Ketua Parlemen Timor Leste Aniceto Guterres di sebuah restoran di sekitar Senayan pada Agustus 2023. Pada pertemuan tersebut Johnson mengkritisi jalan pembangunan Timor Leste yang menurutnya mirip dengan di Indonesia dimana kepentingan elit lebih dominan.

Pada 2023 sekretaris kantor pengacara Johnson memberitahu tentang Johnson yang mengalami gagal ginjal. Saya lalu memberi kabar Aniceto anggota parlemen untuk mengabarkan kondisi Johnson pada Xanana Gusmao. Setelah disampaikan kabarnya, Xanana akan mendukung pengobatan Johnson.

Setelah itu saya mendengar Johnson fokus pada pengobatan gagal ginjal. Sampai saya mendengar Johnson mengalami kritis hampir 5 hari di RS UKI di Jakarta pada Oktober 2025. Akhirnya Johnson dibebaskan dari semua rasa sakit. Minggu pagi, 26 Oktober, Johnson pergi menghadap Yang Maha Kuasa.

Mendengar kematian adalah kabar paling menyedihkan di bulan Oktober. Kita kehilangan pejuang yang berani untuk membela kaum tertindas, melawan militerisme, membela korban dan menegakan demokrasi.

Saya langsung mengabarkan kematian pada Duta Besar Timor Leste di Jakarta Roberto Soares dan meminta mengabarkan pada Xanana Gusmao yang sedang menghadiri KTT ASEAN di Malaysia.

"Oh my God. Terima kasih atas informasinya.

Atas nama Pak Xanana dan Kedutaan Besar menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Pak Johnson Panjaitan. Kami turut berduka cita dan berdoa, semoga arwah beliau beristirahat dengan damai dan tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

Akan saya sampaikan kepada Pak Xanana yang sekarang lagi di Malaysia untuk menghadiri masuknya Timor-Leste sebagai anggota ASEAN, sekaligus mengikuti rangkaian acara pertemuan KTT ASEAN yang ke-47.

Mohon maaf tidak bisa hadir secara fisik, dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan, namun kami mengiringi dengan rasa hormat, simpati dan solidaritas. (Roberto Soares Dubes Timor-Leste untuk Indonesia)"

Akhirnya, selamat istirahat dalam keabadian kawan Johnson Panjaitan. Nilai-nilai yang kau perjuangkan untuk kemanusiaan akan terus disuarakan. Istirahatlah, biar kami lanjutkan.

Wilson Obrigados, *mantan Tapol, Ikatan Kemanusiaan untuk Korban Penghilangan Paksa Indonesia (IKOHI)*.

Mengenang Johnson Panjaitan: Sosok yang Terus Hidup untuk Membela yang Tertindas

Syamsul Alam Agus



Sumber foto : news.detik.com

Bangsa ini kembali kehilangan. Johnson Panjaitan, advokat, aktivis, dan pembela hak asasi manusia yang selama hidupnya menegakkan keadilan tanpa kompromi, telah berpulang meninggalkan jejak yang dalam bagi dunia hukum dan kemanusiaan di Indonesia.

Sejak awal kiprahnya, Johnson Panjaitan dikenal sebagai sosok advokat yang tidak hanya piawai dalam ruang sidang, juga teguh memperjuangkan nilai-nilai keadilan substantif. Ia adalah bagian dari generasi pejuang hukum progresif yang melihat profesi advokat bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan untuk membela yang lemah, menegakkan hukum yang berkeadilan, dan memastikan hak-hak asasi manusia dihormati oleh negara maupun sesama warga.

Dalam berbagai momentum penting perjalanan bangsa, Johnson Panjaitan hadir di garis depan: mendampingi korban pelanggaran HAM,

menentang kriminalisasi terhadap pembela kebenaran, serta membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat sipil. Ia turut mendirikan dan aktif dalam berbagai organisasi bantuan hukum dan jaringan advokat prodemokrasi, menjadi inspirasi bagi generasi muda pengacara untuk menempatkan nurani sebagai kompas profesi.

Tahun 2003 menjadi salah satu periode paling berat dalam perjalanan kemanusiaan di Indonesia. Konflik sosial dan kekerasan berlatar agama di Poso masih menyisakan luka mendalam, baik bagi korban maupun bagi mereka yang berjuang di garis depan untuk menegakkan keadilan. Di tengah situasi itu, saya berkesempatan mengenal dan bekerja bersama Johnson Panjaitan, seorang pembela hak asasi manusia yang dedikasinya melampaui batas profesi dan keberanian pribadi.

Saya mengenalnya bukan hanya sebagai advokat yang tajam dan tegas, juga sebagai pribadi yang hangat, penuh empati, dan memiliki keyakinan kuat bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan. Di lapangan, Johnson bukan tipe pembela yang hanya berbicara di ruang sidang atau meja diskusi; ia turun langsung ke tenda-tenda pengungsian, mendengarkan kisah para korban.

Di Poso, saya melihat sendiri bagaimana keberanian Johnson bukanlah tentang konfrontasi, melainkan tentang keteguhan hati. Ia berani bersuara ketika banyak orang memilih diam, berani mendekat pada korban ketika banyak yang menjauh karena takut. Ia mengajarkan kami menulis laporan, menyusun argumentasi hukum, dan menyiapkan langkah advokasi dengan ketelitian yang luar biasa, selalu menekankan bahwa kerja advokasi harus berbasis pada kebenaran dan empati, bukan pada kepentingan politik atau pencitraan.

Bersama Johnson, PBHI dan LPSHAM Sulawesi Tengah, kami membela dan mendampingi lima pemuda muslim di Desa Pandajaya, Poso yang ditangkap dan disiksa oleh polisi karena tuduhan terlibat aksi terorisme dalam kasus bom pasar Tentena. Dalam proses hukum yang berlangsung, kelima pemuda tersebut dibebaskan dalam putusan praperadilan karena tidak terbukti tindak pidana yang dituduhkan.

Kasus lain adalah kriminalisasi yang dialami oleh pemimpin Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Pdt. Rinaldy Damanik yang ditahan oleh pihak kepolisian pada September 2002. Pada saat itu, Pdt. Damanik tengah memimpin evakuasi warga di Desa Mayumba, Morowali pada 17 Agustus 2002.

Bersama Johnson Panjaitan di Poso, saya belajar bahwa perjuangan kemanusiaan bukan sekadar soal hukum, melainkan soal keberanian menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam situasi paling gelap. Ia meninggalkan jejak yang tak tergantikan — bukan hanya di ruang-ruang peradilan, tetapi juga di hati mereka yang pernah berjalan bersamanya di jalan panjang pembelaan terhadap hak asasi manusia.

Dalam kasus di mana pemerintah menerapkan hukuman mati pada pihak-pihak yang diduga terlibat konflik Poso. Tiga warga asal Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berdomisili di Morowali; Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva dan Marianus Riwu dijatuhi hukuman mati melalui proses peradilan yang sarat dengan rekayasa dan tekanan massa. Eksekusi ketiganya sempat batal dilakukan beberapa kali hingga pada 22 September 2006. Akhirnya ketiga terpidana menghadapi eksekusi di Palu, Sulawesi Tengah.

Lebih dari sekadar pembela hukum, Johnson adalah penjaga moral keadilan. Dalam setiap langkahnya, ia meyakini bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, melainkan harus menjadi instrumen bagi kemanusiaan.

Keteguhan, integritas, dan keberpihakannya kepada korban ketidakadilan telah menjadikannya figur teladan di tengah gelombang tantangan terhadap supremasi hukum di negeri ini.

Kini, kepergian Johnson Panjaitan meninggalkan duka mendalam sekaligus warisan semangat perjuangan yang tak ternilai. Karyanya, dedikasinya, dan idealismenya akan terus hidup di hati para sahabat, kolega, dan generasi penerus yang melanjutkan perjuangan untuk menegakkan hukum yang adil dan hak asasi manusia yang bermartabat.

Selamat jalan, Johnson Panjaitan! Jasa dan pengabdianmu akan terus dikenang dalam setiap upaya mempertahankan hak asasi manusia di Indonesia — terutama bagi mereka yang berada di pinggiran, di wilayah konflik, dan masyarakat adat yang kerap terpinggirkan. Semoga semangatmu terus menyala dalam perjuangan yang kamu mulai.

Syamsul Alam Agus, Direktur Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPSHAM) Sulawesi Tengah (2003 - 2005), staf Advokasi Wilayah Konflik PBHI Nasional (2005). Saat ini sebagai Ketua Badan Pelaksana Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN).

Email: duaelsaja@gmail.com

Akhirnya Lu Bersikap Adil, Son!

A.D. Handoko (Dedi)



Sumber foto : dokumen internal

Suatu sore di bulan Maret 2003, di sebuah kedai kecil di bilangan Blower, Banda Aceh. Aku duduk menikmati secangkir kopi bersama seorang advokat dari Koalisi NGO HAM Aceh, Imam Syafi'i Saragih. Kami berbincang tentang persidangan Muhammad Nazar (Nazar), Ketua Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), yang sedang ditangani PBHI di Pengadilan Negeri Banda Aceh atas tuduhan makar.

Imam, demikian sapaan akrabnya, dengan rasa penasaran bertanya, “Mas, siapa sebenarnya *beking* si Johnson? Aku tengok nyalinya besar kali, seperti *nggak ada takutnya sama siapa pun*”.

Dengan mimik serius dengan suara setengah berbisik, aku jawab, “Ini sebenarnya rahasia, Bang Imam. Aku buka sajalah. Tapi tolong, jangan ceritakan ini ke siapa-siapa, ya?!”

Dengan rasa makin penasaran dia pun menukas, “Pastilah kita jaga rahasianya. Siapa rupanya *beking* dia?”

“Yesus!” jawabku.

“Kimaak... Kimak,” umpat Imam spontan. Umpatan khas Sumatera Utara (Sumut). Kami berdua pun terbahak-bahak.

Johnson, demikian nama khas Batak, bukan Jhonson, sudah kukenal sejak aku masih menempuh studi hukum di Depok. Aku kenal Johnson saat dia menjadi relawan di Institut Sosial Jakarta (ISJ) awal 90-an. Maka akan terlalu panjang jika semua kisah bersamanya aku tuangkan di sini. Kisah-kisah yang unik adalah terkait advokasi PBHI di Aceh awal 2000-an.

Walk Out dari Persidangan

Suatu malam di bulan April 2003, di tengah proses persidangan Nazar, aku dan Johnson berada dalam satu kamar hotel sederhana, Rasamala. Saat itu, setiap ke Aceh, kami memang selalu memutuskan untuk tidur dalam satu kamar demi alasan keamanan.

Jelang tengah malam Johnson nyeletuk, “Ded, *gimana* kalau besok kita minta Nazar *walk out* dari persidangan kalau hakim *nggak* mau *mindahin* dia dari tahanan Polda ke Keudah?” Meskipun sedikit ragu, aku tetap menyambut, “Setuju gua, Son!”

Nazar ketika itu ditahan di Polda Aceh sebagai tahanan titipan jaksa dengan alasan keamanan. Surat permohonan pemindahan Nazar dari Polda ke LP Keudah sudah kami ajukan kepada hakim seminggu sebelumnya. Di samping menyalahi prosedur, penahanan Nazar di Polda ini pun membuat kami kurang leluasa melakukan pendampingan.

Ketika kami sampaikan ide untuk *walk out*, Nazar setuju. Pada sidang berikutnya, sesaat setelah hakim menolak menetapkan perpindahan penahanannya dengan alasan keamanan, aksi *walk out* pun terjadi.

Nazar berdiri meninggalkan ruang sidang, kami pun ikut bergegas. Suasana pun tegang. Perasaanku ketika itu campur aduk di tengah kawalan ketat aparat keamanan (Brimob) dengan senjata siaga.

Memang “gila” ide Johnson. Aku sempat membayangkan bagaimana seandainya saat itu kami diberondong dengan senjata oleh aparat keamanan.

Operasi Militer Terbatas di Aceh

Pada Mei 2003, Operasi Militer Terbatas (OMT) ditetapkan di Aceh menyusul kegagalan perundingan pemerintah dengan GAM yang menolak status otonomi khusus di bawah NKRI. Di akhir tahun, konflik bersenjata antara GAM dengan TNI pun pecah di Langsa. Sory Ersa Siregar, wartawan RCTI, yang sempat disandera GAM tewas dalam konflik itu. Aparat keamanan pun menangkap sekitar 100 orang terduga anggota/simpatisan GAM. Tak lama kemudian mereka dibebaskan dengan tetap menahan 37 orang di antaranya.

Johnson pun menelepon aku untuk melakukan pendampingan terhadap orang-orang ini. Dengan bantuan sekitar 12 LSM di Langsa, PBHI Sumut pun mulai mendata dengan mendatangi rumah keluarga mereka satu per satu untuk keperluan persidangan.

Sekitar sebulan sidang berjalan, aku mulai mendapat teror via SMS (waktu itu belum ada WhatsApp). Intinya, teror itu mengancam kami agar berhenti melakukan pembelaan dan tidak lagi menjadi “pahlawan” untuk sekadar membesarkan nama PBHI di Aceh.

Setelah seminggu terus menerus mendapat teror, aku pun menelepon Johnson. Dia bilang, “Gak usah takut, Ded! Kalau cuma teror lewat HP mah pengecut itu namanya!”

Mendapat suntikan semangat dari Johnson, aku pun tidak mau kalah galak. Pada suatu Sabtu sore di sebuah penginapan di Langsa, aku mengumpulkan perwakilan LSM-LSM yang selama ini membantu PBHI.

Aku sampaikan bahwa beberapa hari ini aku mendapatkan teror via SMS. Aku menduga, si peneror mendapatkan nomor HP-ku dari salah satu di antara mereka. Maka ketika itu aku sampaikan pesan kepada kawan-kawan yang hadir, “Bila diantara kawan-kawan ada yang bisa menduga-duga siapa gerangan peneror ini, tolong sampaikan salam sekaligus ajakan saya untuk bekerja sama melakukan advokasi ini. Jika salam dan ajakan saya ditolak, sampaikan pesan kepada yang bersangkutan: Intip-intipan kita. Biar kami saling intip, dan kita lihat siapa yang akan mati terlebih dahulu di jalan, saya atau dia.”

Apa yang terjadi selanjutnya? Keesokan harinya, teror itu pun lenyap!

Dalam hati aku berkata, “Gile juga resep si Johnson ini. Ternyata benar yang dia bilang. Teror lewat HP itu cuma dilakukan oleh pengecut.”

Anakku Mau Diculik

Bulan April 2004, aku dengan Johnson menghadiri sidang Komisi HAM PBB (sekarang Dewan HAM PBB) di Jenewa, Swiss. Ketika itu kami punya banyak waktu untuk ngobrol sambil menikmati bir lokal di sana. Dari obrolan ringan sampai berkisah soal teror-teror yang selama ini kami alami.

Ternyata sepulang dari Jenewa, teror masih berlanjut! Pertengahan 2004, anak perempuanku satu-satunya, Monica, yang waktu itu masih berusia 4 tahun mau diculik orang tak dikenal. Dijemput di gang depan rumahku di Medan. Anakku nyaris terlepas dari tangan pengasuhnya. Aku ingat, ketika itu PBHI Sumut sedang menangani kasus sengketa tanah masyarakat Ramunia melawan Puskopad Kodam I BB/Bukit Barisan. Tapi aku pun menduga teror ini tidak terlepas dari aktivitas PBHI di Aceh.

Setelah upaya penculikan digagalkan oleh pengasuh dan tukang becak langganan anakku, aku segera menelepon Johnson dan Mas Hendardi. Johnson bilang, "Jangan takut dan tetap waspada. Biar *gua* kontak jejaring di sini untuk antisipasi segala sesuatu." Hari-hari berikutnya Johnson tetap memantau keadaanku di Medan; dan harus ku akui, itu membuat aku tenang menghadapi situasi yang saat itu benar-benar mencekam keluargaku.

Requiescat in Pace

Nyali Johnson benar-benar membuat moral perjuangan kawan-kawan PBHI terus terjaga. Secara pribadi aku pun mendapat semacam "viagra" dari nyalinya itu, walaupun tetap dengan perhitungan dan kewaspadaan.

Nyalinya tidak pernah surut untuk memperjuangkan keadilan. Maka persis seperti yang dikatakan Usman Hamid, *roommate*-ku di Jenewa 21 tahun lalu, satu-satunya ketidakadilan yang dilakukan Johnson adalah terhadap dirinya sendiri. Dia sering kali abai untuk sejenak beristirahat di tengah banyaknya aktivitas yang menyita energi.

Akhirnya sekarang *lu* bisa adil terhadap diri *lu* sendiri, Son. Beristirahatlah dalam kedamaian. Nyali dalam setiap perjuangan *lu* menjadi *legacy* yang akan selalu *gua* kenang.

Medan, 29 Oktober 2025

A.D. Handoko (Dedi), Ketua PBHI Sumut 2001-2004, Majelis Anggota Nasional PBHI.

Selamat Jalan Pulang Kembali ke Haribaan Allah Maha Rahim, Johnson Panjaitan

I Sandyawan Sumardi



Sumber foto : dokumen internal

Telah meninggal dengan tenang, Johnson S. Panjaitan, sahabat pegiat hukum, hak asasi manusia serta demokrasi Indonesia.

Johnson S. Panjaitan wafat tadi pagi Minggu, 26 Oktober 2025 di RS PON Cawang, Jakarta Timur.

Jenazah disemayamkan di Rumah Duka RS UKI Cawang, Jakarta Timur.

Almarhum akan dimakamkan pada sore ini Minggu, 26 Oktober 2025, di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Berangkat pukul 15.00 dari Rumah Duka.

Duh sedih juga aku, John. Bagaimanapun, aku tetap tak menyangka kamu akan pergi dulu secepat ini.

Aku tersadar John, sejak awal kita bertemu di tahun 1990. Kamu masih di Kalabahu LBH Jakarta, saat kita berjuang bersama, bahkan saat aku sedang tidak setuju denganmu pun. Sampai saat pertemuan kita yang terakhir, kamu selalu memanggilku "Pak", "Bapak". Entah kenapa.

Memang dalam pertemuanku terakhir denganmu di pertemuan persahabatan Indonesia-Timor Leste di Jakarta 2022, ketika Aniceto Ketua DPR Timor Leste datang berkunjung. Waktu itu juga ada Helio Freitas, Hilmar "Fay" Farid dan Wilson Obrigados, Johnson sudah berbisik-bisik padaku, mengeluhkan kondisi kesehatanmu.

Kebetulan saat itu kita duduk bersebelahan. Aku sebenarnya waktu itu sudah mengundang Johnson untuk gabung kembali di WAG teman-teman lama eks-Institut Sosial Jakarta atau Tim Relawan untuk Kemanusian. Maksudku supaya Johnson dapat merasa lebih rileks di lingkungan teman-teman lama yang cukup mengenalmu. Tapi kamu enggan. Malah bilang, "Ah, nanti saya malah dikerjain, Pak," selorohmu sambil tertawa.

Selamat jalan John!

Bagaimanapun juga, dengan karaktermu yang begitu khas, suaramu yang lantang, kamu pernah begitu dekat berjuang bersamaku dan kawan-kawan gerakan hak asasi manusia, terutama sejak awal dan selama di Institut Sosial Jakarta tahun 1990-1999.

Terimakasih atas segala pengabdianmu John, terutama pembelaanmu pada masyarakat korban ketidakadilan: mulai ketika kamu di LBH Jakarta, ISJ, TRuK, PBHI, Walhi, sampai Peradi RBA. Kebetulan aku tidak jauh-jauh darimu, kecuali belakangan sesudah kamu membuka kantor "lawyer" sendiri.

Semoga anak, istri dan seluruh keluarga tercinta, dan para sahabat kemanusian yang berduka karena kepergian Johnson, mendapatkan penghiburan dari Allah sendiri melalui lingkungan sekitar.

Pulanglah dalam damai kembali ke pelukan Allah Maha Rahim, sobatku.. 😢✍️🙏

I Sandyawan Sumardi

Johnson Panjaitan dan Inspirasi Bagi Para aktivis

J. Danang Widoyoko

Ketika saya masih mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga di pertengahan 90-an, saya sudah mendengar nama Johnson Panjaitan. Ia salah satu pengacara muda yang waktu itu dikenal progresif dan berani mendampingi para korban rezim Orde Baru.



Sumber foto : tribunnews.com

Saya baru bertemu langsung dengan Johnson setelah saya bergabung dengan Indonesia Corruption Watch di Jakarta tahun 2000. Saya kerap hadir dalam beberapa kesempatan konferensi pers dan diskusi bersama Johnson.

Saya beruntung bisa menyaksikan langsung Bang Johnson di berbagai forum dan orasi di berbagai aksi demonstrasi. Ia seorang orator yang luar biasa, mampu menyampaikan persoalan hukum yang rumit dan kompleks ke bahasa sederhana. Ruang diskusi dan seminar mampu diubahnya menjadi panggung orasi. Massa dari beragam latar belakang dan pendidikan akan mampu memahami pesan yang disampaikan. Bukan hanya paham, melainkan kembali bersemangat. Orasi Johnson mampu membangkitkan

semangat massa. Mereka yang terpinggirkan, tidak berdaya bisa kembali bangkit setelah mendengar ceramah dan orasi Bang Johnson.

Kepergian Johnson sangat mendadak bagi saya. Sejak pandemi Covid-19 saya tidak pernah bertatap muka langsung, hanya melihatnya di berbagai forum televisi atau media online. Tetapi kemudian saya mendengar kabar duka kepergiannya. Rupanya Johnson sudah cukup lama sakit sampai akhirnya meninggal.

Peran Penting Pengacara Publik

Kepergian Johnson menyadarkan saya tentang pentingnya peran pengacara publik seperti yang dilakukan oleh Johnson. Apalagi hari-hari ini kita mengalami kemunduran demokrasi, bahkan ancaman otoritarianisme. Di tengah situasi politik seperti ini, kehadiran para advokat yang bekerja demi kepentingan publik sangat diperlukan. Bukan hanya aktivis yang membutuhkan pengacara publik, tetapi juga seniman, media, analis ekonomi, peneliti sosial dan politik dan mereka yang menyampaikan sikap kritis terhadap pemerintah.

Pergeseran politik yang semakin otoriter akhirnya mendorong aktivis sosial untuk mengambil jarak dengan kekuasaan dan bersikap kritis. Dalam situasi ini, pengacara publik seperti Johnson memegang peran penting untuk memberikan dukungan bagi gerakan sosial.

Di berbagai media online maupun jurnal akademik berkembang perdebatan penting tentang model gerakan sosial yang efektif. Amalinda Savirani, Diatyka Yash dan Rakhmani menulis tentang gerakan rimpang di situs The Conversation. Tulisan Amalinda itu memberikan simpati kepada generasi muda yang jatuh bangun membangun perlawanan dan menghindari serta bertahan dari represi aparat keamanan. Gerakan rimpang cenderung cair, tidak terorganisir, dan barangkali, tidak ada pemimpin tunggal. Tetapi model gerakan seperti ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan teknologi yang memungkinkan koordinasi dengan berbagai pendukung. Media sosial mampu menjangkau dan menginspirasi orang muda untuk turut melakukan perlawanan. Karena karakternya yang cair, gerakan rimpang tidak mudah untuk dipatahkan dengan kekuatan represif.

Model gerakan rimpang ini berbeda dengan pandangan dari para peneliti dan aktivis yang berangkat dari tradisi Marxis-Leninis yang mengandaikan gerakan sosial hanya efektif jika terorganisir. Melalui kepemimpinan dan organisasi yang kuat, gerakan sosial akan mampu

mengarahkan tuntutan dan memimpin massa untuk mencapai tujuan yang dirancang bersama. Tanpa organisasi yang solid dan progresif, perlawanan model rimpang tidak efektif karena hanya akan memperkuat sebagian faksi dari elit yang berkompetisi memperebutkan pengaruh dan kekuasaan.

Perdebatan yang cukup intensif tentang gerakan sosial itu melewatkkan aspek penting dalam gerakan sosial di Indonesia. Apa pun pilihan model gerakan sosial, baik kecil atau berhasil membangun gerakan besar, ada faktor penting yang luput dari diskusi dan perdebatan: peran pengacara publik seperti Johnson Panjaitan.

Para pengacara publik yang selalu mendampingi para aktivis saat aksi, maupun ketika menghadapi represi, merupakan faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Diskusi di media online sembari membayangkan gerakan ideal, atau gerakan perlawanan di jalan, pada akhirnya akan membutuhkan para pengacara publik. Barangkali bagi analis gerakan sosial, para pengacara publik bukan aktor penting, juga bukan faktor yang perlu diperhitungkan bagi keberhasilan gerakan sosial. Tetapi realitas menunjukkan, para pengacara publik seperti Johnson akan selalu dibutuhkan, apa pun model gerakannya.

Saat membaca kembali perdebatan tentang gerakan sosial, saya merasa kehilangan sosok Johnson Panjaitan. Menurut saya, para penulis gerakan sosial perlu mewawancarai, atau lebih baik, mengikuti langsung bagaimana para pengacara publik ini jatuh bangun memberikan bantuan kepada para aktivis untuk melakukan perlawanan.

Saya merasa kehilangan Johnson karena perannya justru semakin dibutuhkan saat ini. Pengacara publik sangat dibutuhkan ketika kekuasaan menjadi otoriter dan represif. Hanya dengan pengacara publik yang tangguh seperti Johnson, gerakan sosial akan mampu bertahan, apa pun model dan metode gerakannya. Kepergian Johnson tidak akan melemahkan, justru akan terus memberi inspirasi bagi para pengacara publik generasi baru yang akan terus mengawal, mendampingi, atau juga memimpin gerakan sosial.

J. Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia.

Johnson Panjaitan dan Perjuangan Pembelaan Hak-Hak Manusia

Suryadi Radjab



Sumber foto : antaranews.com

Dekade 1990-an ditandai dengan meningkatnya isu demokratisasi dan hak-hak manusia. Sebelumnya, tahun 1989, Fraksi ABRI di DPR membahas demokratisasi, namun Presiden Soeharto bereaksi keras dengan mengeluarkan istilah, “gebuk!” Tahun 1990, diprakarsai oleh Rahman Tolleng, Marsillam Simanjuntak, Abdurrahman Wahid tau Gus Dur, mereka membentuk Forum Demokrasi (Fordem) yang diketuai Gus Dur sebagai forum yang terbuka tanpa prasangka ras, agama, suku dan antar golongan (SARA) sebagai reaksi atas pembentukan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) oleh Soeharto dan Habibie. Fordem juga mengeluarkan kritik bahwa “demokrasi Pancasila itu sebagai demokrasi seolah-olah.”

Setelah penembakan demonstrasi di pemakaman Santa Cruz di Dili pada November 1991 yang memakan korban ratusan orang, lantas konsorsium Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) – diketuai JP Pronk, Menteri Kerjasama Pembangunan Kerajaan Belanda – memasukkan syarat bantuan kepada regim Soeharto dengan isu hak-hak manusia (*human*

rights). Namun Presiden Soeharto tidak terima dan marah atas syarat bantuan dengan isu hak-hak manusia. Soeharto mengambil keputusan untuk membubarkan IGGI, namun penggantinya dengan nama baru, yakni Consultative Group on Indonesia (CGI) tanpa ketua dari pemerintah Belanda.

Namun sebelumnya, pemerintah Soeharto telah memberlakukan tiga daerah yang disebut "daerah operasi militer" (DOM) di Aceh, Timor Timur dan Papua, karena di ketiga daerah ini dianggap munculnya "gerakan separatis bersenjata". Dengan DOM diharapkan militer Indonesia dapat membersihkan pemberontakan di ketiga daerah itu. Sampai akhirnya Soeharto tumbang dari kekuasaannya pada 1998, konflik di ketiga daerah itu masih berlanjut dan DOM pun masih berlaku.

Ketika pemerintah Soeharto kesulitan membiayai ekonominya setelah merosotnya penghasilan dari migas, kemudian beralih pada dua kebijakan. Pertama, mengundang modal asing dengan menyediakan upah buruh yang rendah. Kebijakan ini membangkitkan industri manufaktur ringan serta terbentuknya lapisan buruh industri. Namun bangkitnya industri ini juga menimbulkan kontradiksi, yakni maraknya protes dan pemogokan buruh di berbagai kawasan industri. Protes dan pemogokan buruh pada umumnya menuntut kenaikan upah minimum. Salah satu kasus pemogokan buruh ini berakhiran tragis dan menggegerkan pada Mei 1993, ketika seorang buruh perempuan PT Catur Putra Surya di Porong, Kabupaten Sidoarjo ditemukan terbunuh dan mayatnya ditemukan di Nganjuk. Peristiwa ini dikenal dengan pembunuhan Marsinah.

Kedua, pemerintah Soeharto juga melakukan intensifikasi modal di sektor pertanian dalam upayanya memacu ekspor non-migas sesuai arahan Bank Dunia. Namun kebijakan ini juga menuai kontradiksi yang ditunjukkan kasus-kasus penggusuran lahan yang banyak menimpakan petani penggarap di pedesaan. Banyak petani penggarap melakukan protes dan dibantu oleh sejumlah organisasi non-pemerintah atau dikenal lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka – dengan sejumlah massa – memprotes ke sejumlah instansi pemerintah seperti Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Beberapa petani penggarap ditangkap dan ditahan, bahkan ada yang diadili. Beberapa kasus sengketa lahan yang sempat terkenal antara lain kasus lahan di Gunung Badega (Garut), waduk

Kedungombo (Boyolali, Grobogan dan Sragen), serta kasus lapangan golf Cimacan (Cianjur).

Kasus-kasus sengketa lahan itu menandai dugaan pelanggaran hak-hak manusia (*human rights violation*) yang menimpa penduduk di pedesaan. Sedangkan di berbagai kawasan industri ditandai pelanggaran hak-hak buruh bukan saja hak atas upah, namun juga hak berserikat. Karena selama pemerintahan Soeharto hanya ada serikat buruh tunggal, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Dalam konteks ekonomi dan politik itulah seiring meningkatnya isu demokratisasi dan hak-hak manusia, Johnson Sotarduga Panjaitan menjalani kiprahnya dalam berbagai pembelaan setelah dia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI). Tahun 1988, Johnson sudah menjadi Asisten Pembela Umum di LBH Jakarta dan aktif di luar LBH. Tahun 1992, menjadi Koordinator Advokasi Undang-Undang Lalu Lintas. Tahun 1996, Jhonson menjadi Koordinator Forum Solidaritas Buruh (Forsol) seiring meningkatnya protes dan pemogokan buruh di Jakarta, Tangerang, Bogor dan Bekasi. Tahun 1998, Serikat Pengacara Indonesia (SPI) berdiri dan Johnson juga diminta mengisi Kepala Divisi Politik dan HAM. Dalam tahun yang sama, Johnson dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Pengurus PBHI. Setelah dari PBHI, Johnson Panjaitan juga pernah menjabat Ketua Indonesia Police Watch (IPW).

Ketika terjadi operasi militer besar-besaran di Timor Leste untuk membersihkan gerakan perlawanan yang digalang Dewan Perlawanan Nasional Timor Leste (*Conselho Nacional da Resistência Timorense/CNRT*) pimpinan Xanana Gusmao, pasukan TNI berhasil menangkap Xanana Gusmao yang bersembunyi di sebuah rumah di Dili pada 1992. Xanana Gusmao dibawa ke Bali dan kemudian diadili. Para advokat yang membela di pengadilan Xanana Gusmao antara lain Luhut MP Pangaribuan, Dwiyanto Prihartono dan Johnson Panjaitan. Namun pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Xanana Gusmao dan mendekam di penjara Cipinang sebelum dibebaskan sebagai tahanan politik (*political prisoner*) bersama tahanan politik lainnya setelah Soeharto tumbang sejak 1998.

Pada era pemerintahan Soeharto juga terjadi peristiwa penyerbuan Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada

27 Juli 1996 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Penyerbuan ini juga menimbulkan kerusuhan yang mengakibatkan 5 orang tewas, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, dan 136 orang ditahan. Dalam penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hak-hak manusia yang digerakkan oleh Markas Besar (Mabes) ABRI dengan massa yang menyamar seolah-olah massa pro-PDI Kongres Medan.

Seorang pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) – partai didirikan pada 1996 – Budiman Sudjatmiko ditangkap dan ditahan atas tuduhan mendalangi kerusuhan, namun fakta menggelar mimbar bebas menjelang penyerbuan Kantor DPP PDI yang pro-Megawati Soekarnoputri. Budiman juga diadili pada 1997 dan salah seorang pembelanya adalah Johnson Panjaitan dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) bersama almarhumah Tumbu Saraswati, Trimedy Panjaitan dan Petrus Selestinus. Budiman divonis 13 tahun penjara, namun dibebaskan dengan amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada Desember 1999.

Beberapa bulan setelah peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI itu, Johnson Panjaitan bersama Hendardi dan Trimedy Panjaitan menggalang para aktivis di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar dan Medan untuk mendirikan sebuah organisasi perkumpulan, bernama Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) pada 5 November 1996 lewat Kongres Pertama di Jakarta. Johnson Panjaitan diberi wewenang sebagai Wakil Ketua Badan Pengurus PBHI yang semakin dikenal publik sebagai pengacara dan pembela hak-hak manusia. Tahun 2004, digelar Kongres IV PBHI di Makassar, Johnson Panjaitan terpilih menjadi Ketua Badan Pengurus PBHI 2004-2007.

Sebagai Ketua Badan Pengurus PBHI, Johnson Panjaitan menggeluti pembelaan hak-hak manusia di Aceh dan Papua. Dia lantas dikenal sebagai seorang pengacara, namun juga pembela hak-hak manusia (*human rights defender*). Bahkan Johnson pernah mengalami teror, diduga mobil pribadinya ditembak oleh orang tak dikenal, karena sikapnya yang menentang pemberlakuan Keadaan Darurat Militer di Aceh pada 2003. Namun teror ini tidak membuat nyalinya ciut untuk tetap konsisten membela hak-hak manusia yang terjadi di mana pun, termasuk dalam konflik di Poso.

-  [pbhi_nasional](#)
-  [pbhi_nasional](#)
-  [PBHI Nasional](#)
-  [pbhi.or.id](#)